

# 2023

## LAPORAN EVALUASI

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN  
PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS

BAPPEDA PROVINSI BALI



## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 24 Ayat 1 yang mengamanatkan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD TPB dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya, serta Pasal 24 Ayat (4), Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Indikator TPB/SDGs sebagaimana tertuang dalam dokumen Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023 Provinsi Bali dipantau untuk dapat memastikan target-target yang akan dicapai di akhir periode dapat diakselerasi pencapaiannya.

Laporan ini disusun berdasarkan data-data capaian indikator TPB/SDGs yang bersumber dari Badan Pusat Statistik serta Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali, hasil monitoring dan hasil laporan realisasi fisik dan keuangan dari program dan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mendukung capaian indikator-indikator TPB/SDGs, laporan capaian program kegiatan pada organisasi non pemerintah (*Non State Actor*) di Provinsi Bali yang mendukung capaian TPB/SDGs yang bersifat sukarela (*voluntary*) melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*). Mekanisme pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Evaluasi RAD TPB/SDGs Provinsi Bali, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dan dipakai sebagai acuan dalam memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah serta menjadi acuan bagi organisasi non pemerintah (*Non State Actor*) dalam mengembangkan genre bisnis baru dan mendukung tercapainya “*no-one left behind*” yang menjadi tujuan utama dari TPB/SDGs.

Bali, April 2023

	Ditandatangani secara elektronik oleh:
	KEPALA BADAN
	<b>I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos, M.Si</b>
	Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19710814 200003 1 010



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Alur Pelaporan.....	4
1.4 Bahan Pemantauan dan Evaluasi.....	7
BAB II RINGKASAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGs DI PROVINSI BALI .....	8
TUJUAN 1: TANPA KEMISKINAN .....	8
TUJUAN 2: TANPA KELAPARAN.....	9
TUJUAN 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA .....	9
TUJUAN 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS.....	10
TUJUAN 5: KESETARAAN GENDER.....	11
TUJUAN 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK.....	11
TUJUAN 7: ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU .....	12
TUJUAN 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI .....	12
TUJUAN 9: INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR .....	13
TUJUAN 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN.....	14
TUJUAN 11: KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN .....	15
TUJUAN 12: KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB .....	16
TUJUAN 13 : PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM.....	16
TUJUAN 14: EKOSISTEM LAUTAN .....	17
TUJUAN 15: EKOSISTEM DARATAN .....	17
TUJUAN 16: PERDAMAIAN, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh .....	18
TUJUAN 17: KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN .....	19
BAB III TINJAUAN STATUS DAN UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGs .....	20
3.1 Perkembangan Status Pencapaian dan Upaya Percepatan TPB/SDGs .....	20
3.2 Kendala dan Rencana Tindak Lanjut .....	105
BAB IV PENUTUP .....	95
4.1 Kesimpulan.....	95
4.2 Saran.....	96
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional Tahun 2019 - 2023.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
Gambar 1.1.2 Kinerja Pencapaian Indikator Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Tahun 2023 Provinsi Bali .....	2
Gambar 1.3.1 Alur Informasi Evaluasi RAD TPB/SDGs.....	6
Gambar 1.3.2 Alur Informasi Monitoring Organisasi Non Pemerintah.....	6
Gambar 2.1 Tingkat Kemiskinan Bali dan Nasional Tahun 2019 – 2023 .....	8
Gambar 2.2 Prevalensi Penurunan Stunting Bali Tahun 2018 - 2023.....	9
Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan.....	12
Gambar 2.4 Gini Rasio Bali dan Nasional Tahun 2018 - 2022.....	14

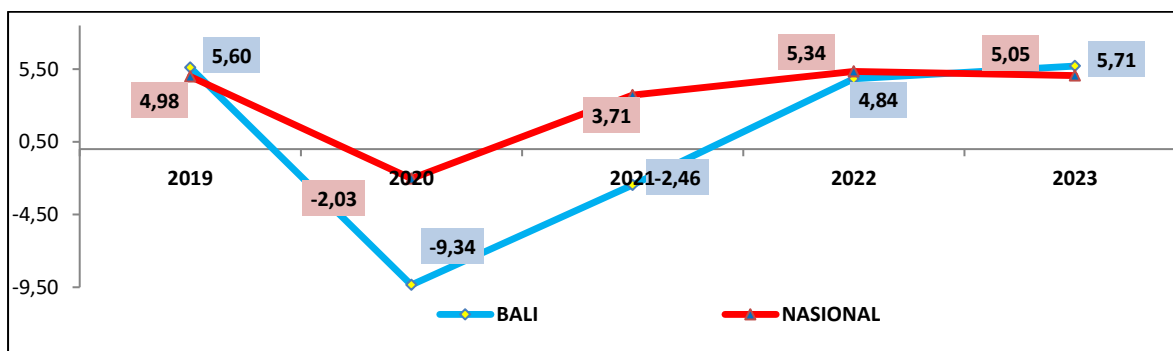
## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan TPB/SDGs memasuki *Decade of Action* di mana 7 tahun waktu yang tersisa dalam mencapai target-target TPB/SDGs sampai tahun 2030. Di Tengah tantangan global dalam pencapaian TPB/SDGs, Indonesia telah mencapai hasil yang cukup baik. Dalam *Sustainable Development Report* Tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat ke-75, meningkat dari posisi sebelumnya pada peringkat 102 4 tahun lalu. Di Bali khususnya, tantangan dalam melibatkan pelaku non Pemerintah masih menjadi isu. Dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan komitmen dari aktor non Pemerintah untuk meningkatkan percepatan pencapaian TPB/SDGs. Dalam rangka percepatan pencapaian target oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah, dilakukan pembaharuan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres terbaru tersebut memberikan penekanan pada peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), dan pembiayaan alternatif guna mengakselerasi pencapaian TPB/SDGs. Mulai kembali pulihnya perekonomian dan kembalinya mobilitas masyarakat, serta meningkatnya inflasi dan kenaikan harga komoditas pangan sebagai dampak ketidakpastian situasi global akibat perang Rusia-Ukraina. Masih terdapat tantangan pada sektor kesehatan, seperti peningkatan kasus penyakit menular dan tidak menular. Memasuki dekade aksi pencapaian SDGs, upaya percepatan pencapaian SDGs menemui tantangan ditengah pemulihan capaian indikator-indikator yang sempat mengalami penurunan karena terdampak Covid-19. Ekonomi Bali pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 tumbuh 5,71 persen. Peningkatan aktivitas transportasi khususnya angkutan udara dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh signifikan, diperkirakan menjadi faktor dengan kontribusi terbesar yang mendorong perekonomian Bali mampu tumbuh pada Tahun 2023 (y-on-y). Sementara itu, peningkatan

transaksi finansial pun mengikuti pertumbuhan ekonomi Bali yang semakin bergairah. Catatan tersebut menjadi gambaran terus bangkitnya perekonomian Bali pada Tahun 2023.

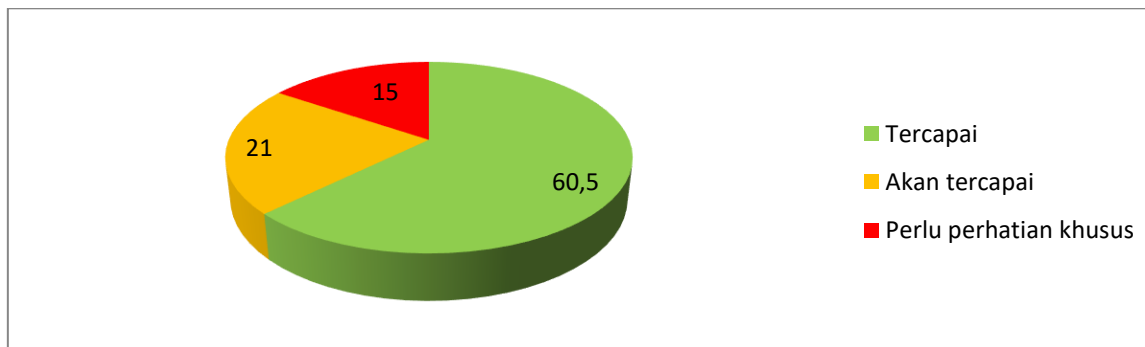
**Gambar 1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional  
Tahun 2019 – 2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara umum, berkaca pada pemantauan progres dari 276 indikator pada tahun 2023, masih terdapat catatan tantangan, baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal antara lain berupa situasi dan kondisi perekonomian global dan nasional. Sedangkan tantangan internal antara lain berupa cakupan, dan kualitas pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat Bali. Dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan TPB/SDGs diindikasikan dengan tercapainya indikator-indikator dari target-target dari setiap tujuan. Tercapainya setiap indikator tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu kategori tercapai dengan warna Hijau, akan mencapai target atau membaik dengan dibandingkan periode sebelumnya yang dikategorikan dengan warna Biru serta belum mencapai target dan perlu perhatian khusus yang ditunjukkan dengan warna Merah.

**Gambar 1.1.1 Kinerja Pencapaian Indikator Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs  
Tahun 2023 Provinsi Bali**



Gambar 1.1.2 menunjukkan kinerja pencapaian indikator-indikator TPB/SDGs pada Tahun 2023 di mana indikator TPB/SDGs Provinsi Bali sebanyak 121 indikator menunjukkan tren positif yang digambarkan dengan warna hijau (60,50%), akan mencapai target atau membaik sebanyak 42 indikator (21%), dan

mengalami kecenderungan memburuk dan perlu perhatian khusus sebanyak 30 indikator (15%). Capaian ini merupakan proporsi dari 193 indikator yang tersedia datanya di Tahun 2023.

Periodesasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Bali masih menyisakan satu tahun lagi bersamaan dengan berakhirnya periodesasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali. Untuk memastikan tercapainya target-target dalam RAD TPB/SDGs yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Provinsi Bali senantiasa melaksanakan pemantauan dan Evaluasi atas target-target serta capaian indikator SDGs.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Bali tahun 2022 didasarkan pada

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7).
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 39).

### 1.3 Alur Pelaporan

Alur pelaporan evaluasi RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

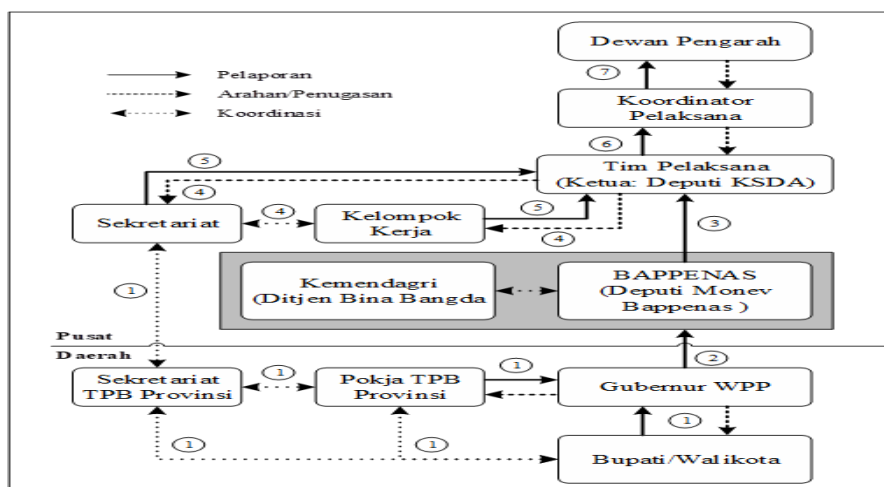
1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi bersama dengan nonpemerintah (termasuk



tingkat kabupaten, dan kota bila ada) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs pusat (*Langkah 1*).

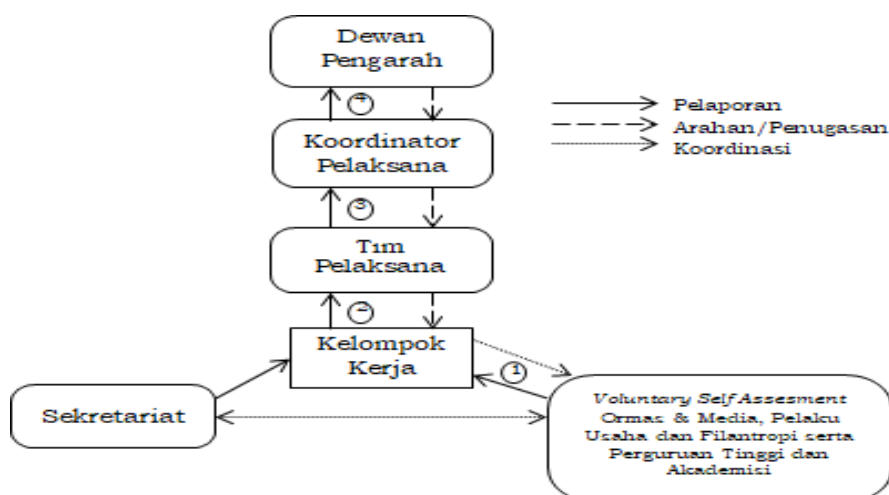
2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (*Langkah 2*).
3. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/ BAPPENAS (*Langkah 3*).
4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (*Langkah 4*).
5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 5*).
6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Nasional (*Langkah 6*).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017.



**Gambar 1.3.1 Alur Informasi Evaluasi RAD TPB/SDGs**

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak non pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak non pemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya pun juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self-assessment tool* (SAT) yang disepakati.



**Gambar 1.3.2 Alur Informasi Monitoring Organisasi Non Pemerintah**

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak non pemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Organisasi non pemerintah melakukan *voluntary self-assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan *format self-assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs

mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi non pemerintah dengan format yang ditetapkan. (*Langkah 1*).

2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana (*Langkah 3*).
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (*Langkah 4*).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi non pemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

#### **1.4 Bahan Pemantauan dan Evaluasi**

Bahan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi adalah:

1. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2018-2019;
2. Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs;
3. Data program dan kegiatan yang terkait dengan TPB/SDGs;
4. Data pencapaian sasaran indikator TPB/SDGs termutakhir;
5. Dokumen pencapaian kinerja non pemerintah.

## BAB II

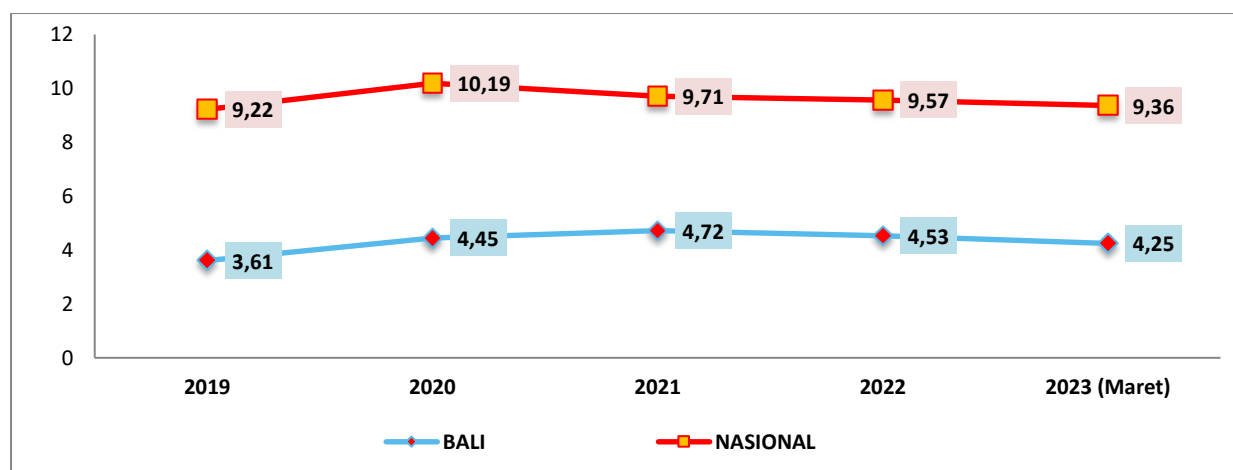
### RINGKASAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGs DI PROVINSI BALI



#### TUJUAN 1: TANPA KEMISKINAN

Kondisi kemiskinan di Bali pada Maret tahun 2023 sebesar 4,25 persen, turun 0,28 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2023 tercatat 193,78 ribu orang, dibandingkan dengan kondisi September 2022, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 11,58 ribu orang. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 turun 11,90 ribu orang. Untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Bali, perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Bali. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan bagi 40% penduduk terbawah telah mencapai 100 persen. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (indikator 1.3.1.(b) pada sektor formal sebesar 57,46 persen. Capaian ini masih di bawah target pada tahun 2023 sebesar 75 persen, di mana masih banyak Perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan jaminan sosial kepada pegawainya. Capaian indikator 1.31.(c) persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas pada semester I tahun 2023 sebesar 1,52 persen. Capaian indikator 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan pada tahun Semester I Tahun 2023 sebanyak 108.023 keluarga telah mendapat bantuan dari program tersebut.

**Gambar 2.1 Tingkat Kemiskinan Bali dan Nasional Tahun 2019 – 2023**



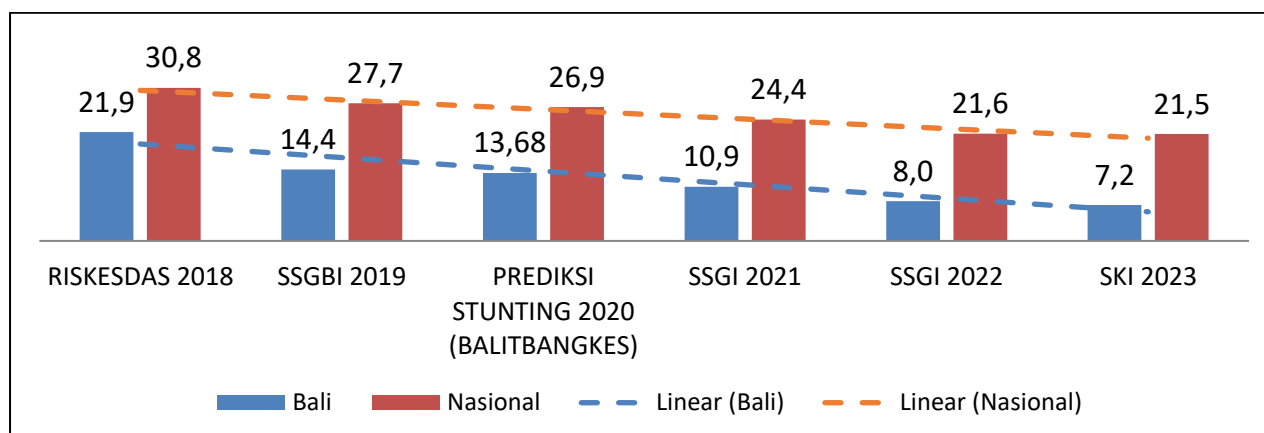
Sumber: Badan Pusat Statistik



## TUJUAN 2: TANPA KELAPARAN

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada Semester I Tahun 2023 sebesar 88,3% dan konsumsi ikan 4,2 Kg/Kapita/Tahun. Meningkat dari kondisi pada Semester I sebesar 86,9 persen di mana angka ini menunjukkan bahwa keragaman konsumsi pangan di Provinsi Bali tinggi, namun belum mencapai skor 100 untuk dapat dikategorikan tahan pangan. Prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun sebesar 4,05 persen, sedangkan prevalensi stunting pada anak di bawah dua tahun sebesar dua tahun sebesar 3,8 persen. Prevalensi malnutrisi anak pada usia kurang dari lima tahun sebesar 1,80 persen. Prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 8,46 persen. Hasil dari upaya menjaga keanekaragaman pangan berdasarkan indikator 2.5.1\* jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas sebesar 35.264 ekor di mana angka ini adalah kuota pengeluaran sapi potong yang dikonversikan ke daging. Indikator 2.5.2\* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui sebesar 441.366 ST. Adapun hewan yang kategori berisiko adalah babi bali dan kambing gembrong, hewan yang kategori tidak berisiko adalah sapi bali, kambing, babi, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik. Kemudian untuk hewan yang risikonya tidak diketahui adalah kerbau.

**Gambar 2.2 Prevalensi Penurunan Stunting Bali Tahun 2018 - 2023**



## TUJUAN 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera yang dipantau menunjukkan progres yang membaik terdapat pada indikator Angka Kematian Ibu pada tahun 2023 turun menjadi 63,89/100.000 Kelahiran Hidup (KH), lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 84,83/100.000 Kelahiran Hidup (KH). Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan

terlatih sebesar 84,55 persen. Meskipun angka ini masih lebih rendah dari target tahun 2023 dan masih di bawah capaian tahun 2022, namun capaian ini berangsur-angsur membaik sehingga angka kematian ibu dapat ditekan dengan proses persalinan yang dilakukan dengan bantuan tenaga terlatih. Namun capaian yang cenderung memburuk terjadi pada indikator berikut yaitu, Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup meningkat menjadi 10,5/1.000 KH dari tahun 2022 sebesar 6,4/1.000 KH. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup mengalami peningkatan menjadi 7,2/1.000 KH dari tahun 2022 sebesar 6,7/1.000 KH. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup mengalami peningkatan menjadi 9,6/1.000 KH dari tahun 2022 sebesar 6,2/1.000 KH.

Capaian Tujuan ketiga yang juga mengalami penurunan adalah pada tahun 2023, prevalensi HIV pada populasi dewasa sebesar 0,26 persen, meningkat sebesar 0,03 persen dari tahun 2022 sebesar 0,3 persen. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk sebesar 116/100.000 penduduk. Kejadian malaria per 1.000 orang sebesar 0,01/1.000 penduduk, menurun dari tahun 2022 sebesar 0,01/1.000 penduduk dan seluruh Kabupaten/Kota di Bali telah mencapai eliminasi malaria. Upaya dalam memberikan layanan kesehatan seksual dan reproduksi berdasarkan data dari BKKBN Provinsi Bali pada Tahun 2023, proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern sebanyak 362.082 akseptor. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern) sebanyak 43,2 persen. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) pada tahun 2023 sebesar 17,4 per 1.000 perempuan. Upaya dalam menjaga masyarakat dari penyakit menular dan tidak menular senantiasa dilaksanakan dengan persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas pada tahun 2022 mencapai 99 persen. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan di Bali pada tahun 2023 mencapai 80 persen dari sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 75 persen.



## **TUJUAN 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS**

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B di Bali sebesar 94,59 persen. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B sebesar 90,56 persen, meningkat dari tahun 2022 84,87 persen, dan persentase SMA/MA berakreditasi minimal B sebesar 96,77 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 102,7 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat sebesar 98,18 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/

SMK/MA/ sederajat sebesar 98,18 persen. Rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun sebesar 9,74 tahun. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat pada tahun 2023 sebesar 99,53 persen. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat sebesar 97,61 persen dan Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 98,13 persen. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Dengan capaian tersebut di atas, baik siswa perempuan dan laki-laki belum semua anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi tahun 2023 sebesar 98,13. Angka ini menunjukkan besaran tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sebesar 98,13 persen. Persentase guru SMA, SMK dan PLB sebesar 48,28 persen.



## TUJUAN 5: KESETARAAN GENDER

Capaian Indikator 5.1.1\* masih seperti pada capaian pada tahun 2023 di mana terdapat sembilan kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan (indikator 5.2.1.(a)) sebesar 9,07 persen. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir pada sebesar 4,43 persen. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada Tahun 2023 sebesar 87,33 persen. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di Bali masih relatif rendah. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah sebesar 16,36 persen dan proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial sebesar 36,38 persen. Masih rendahnya angka ini menunjukkan bahwa Dibutuhkan upaya pengarusutamaan yang lebih optimal terkait kesetaraan gender seperti yang telah diregulasikan, terutama dengan pendekatan-pendekatan yang inovatif.



## TUJUAN 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak pada tahun 2023 sebesar 98,31 persen. Indikator 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta

penyediaan air baku untuk pulau-pulau sebesar 2,78 m<sup>3</sup>/dtk. Untuk meningkatkan akses atas sanitasi layak program-program peningkatan kualitas sanitasi dilakukan di tingkat Desa. Capaian indikator 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 586 Desa/Kelurahan atau sebesar 81,84 persen. Indikator 6.3.2.(b) kualitas air Sungai sebagai sumber air baku 3 sungai yang dipantau oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali (Sungai Unda, Sungai Melangit dan Sungai Jinah) kualitasnya tidak memenuhi sebagai sumber air baku (air sungai kelas I) DKLH Provinsi Bali belum menetapkan kelas air sungai, sehingga untuk menetapkan status mutu kualitas air sungai menggunakan kelas II. Indikator 6.5.1.(b) Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi sebanyak 7 stasiun. Dan jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk sebanyak 2 jaringan. Dalam pelaksanaan pengelolaan daerah tangkapan Sungai dan danau, sebanyak 41 Komunitas (39 Komunitas Pencinta Sungai, 1 Komunitas Pecinta Sungai dan Pantai, 1 Komunitas Pecinta Danau) turut berpartisipasi.



## **TUJUAN 7: ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU**

Penggunaan energi listrik di Provinsi Bali berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, telah merata sebanyak 100 persen sejak tahun 2018. Konsumsi listrik per kapita (indikator 7.1.1.(a)) sampai dengan Tahun 2023 sebesar 1.190 Kwh. Bauran energi terbarukan di Provinsi Bali pada tahun 2018 sebesar 0,4% . Angka ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 0,5% hingga pada Tahun 2023 sebesar 3,80 persen yang ditargetkan akan meningkat menjadi 11,15 % pada tahun 2025, dan diharapkan porsi EBT menjadi 20,10 % pada tahun 2050 seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali Tahun 2020-2050. Data penggunaan/pemanfaatan EBT menurun dari tahun sebelumnya karena terdapat penambahan parameter penghitungan dari Setjen DEN (Dewan Energi Nasional). Kemudian, berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, intensitas energi primer di Bali Semester I tahun 2023 sebesar 0,0137 SBM/Miliar Rupiah.



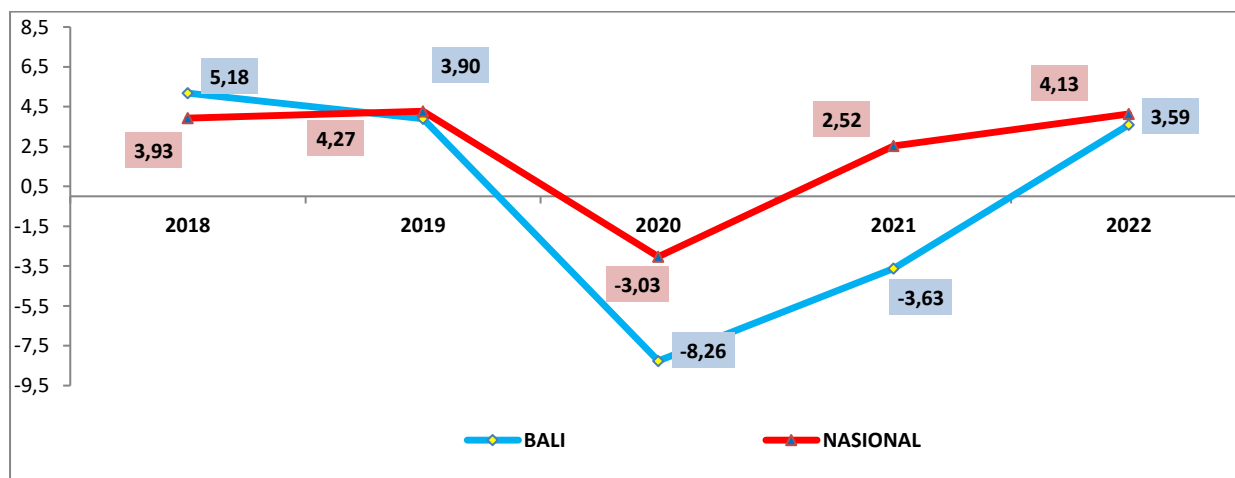
## **TUJUAN 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

Ekonomi Bali pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 tumbuh 5,86 persen. Pemulihan ekonomi Bali terus bergerak hampir menyamai kondisi ekonomi



seperti sebelum masa pandemi Covid-19. Peningkatan aktivitas transportasi khususnya angkutan udara dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh signifikan, diperkirakan menjadi faktor dengan kontribusi terbesar yang mendorong perekonomian Bali mampu tumbuh pada Tahun 2023 (y-on-y). Sementara itu, peningkatan transaksi finansial pun mengikuti pertumbuhan ekonomi Bali yang semakin bergairah. Catatan tersebut menjadi gambaran terus bangkitnya perekonomian Bali pada Tahun 2023.

**Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 2,69%, turun dibandingkan dengan Februari 2022 sebesar 4,80 persen. Namun TPT tersebut masih lebih tinggi dibandingkan TPT Bali sebelum pandemi Covid-19 pada Februari 2020 yang tercatat sebesar 1,25%. Persentase setengah pengangguran pada tahun 2023 sebesar 2,57 persen, menurun dari tahun 2022 sebesar 3,93 persen. Persentase tenaga kerja formal tercatat mengalami peningkatan menjadi 47,65 persen di tahun 2023 dari sebelumnya sebesar 46,57 persen di tahun 2022. Persentase akses UMKM ke layanan keuangan pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan menjadi 27,68 persen, dari sebelumnya sebesar 39 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 5,27 juta kunjungan wisman yang datang langsung ke Bali. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah wisman tercatat meningkat hingga 2,15 juta.



## **TUJUAN 9: INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR**

Pada tahun 2023, telah dikembangkan infrastruktur untuk menunjang aktivitas masyarakat di Bali. Jumlah bandara sebanyak 1 bandara, jumlah dermaga penyebrangan sebanyak 11 dermaga, dan jumlah pelabuhan strategis sebanyak 4 pelabuhan. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita sedikit mengalami penurunan menjadi 6,24 persen dari tahun 2022 sebesar

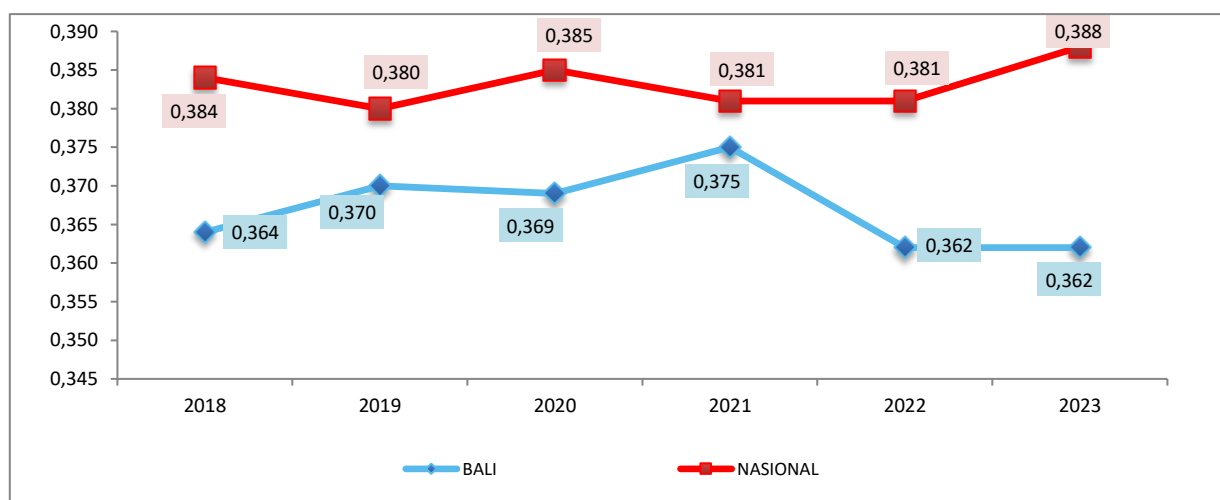
6,8 persen. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur tahun 2023 sebesar 2,26 persen, menurun dari tahun 2022 sebesar 5,63 persen. Persentase perubahan emisi CO<sub>2</sub>/Gas Rumah Kaca sebesar 12.089,85 GgCO<sub>2</sub>e. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam sebesar 73,2 persen, meningkat dari tahun 2022 sebesar 72,82 persen. Namun, proporsi individu yang menggunakan internet menurun menjadi 73,34 persen dari tahun 2022 sebesar 83,51 persen.



## TUJUAN 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN

Perekonomian Bali yang mulai berangsur normal dengan mulai Bergeraknya aktivitas-aktivitas dunia usaha dan dunia industri tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Inovasi-inovasi dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun pemangku kepentingan non pemerintah memberikan dampak peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Ketimpangan di Provinsi Bali yang ditandai dengan Rasio Gini mengalami penurunan menjadi 0,362 berdasarkan data tahun 2022 dan 2023, dari capaian tahun 2021 sebesar 0,375 persen. Persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,25 persen dari tahun 2022 sebesar 4,53 persen. Jumlah Desa mandiri pada tahun 2023 meningkat menjadi 502 Desa dari sebelumnya jumlah Desa mandiri di Provinsi Bali sebanyak 386 Desa di tahun 2022.

**Gambar 2.4 Gini Rasio Bali dan Nasional Tahun 2018 - 2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Peningkatan capaian pada Tahun 2022 menunjukkan kesenjangan yang mulai berkurang baik di perkotaan dan pedesaan. Penduduk mulai kembali dapat bekerja dan

memenuhi kebutuhannya. Pada Tahun 2022 data Indeks Desa Membangun Provinsi Bali sebesar 0,8269 dengan status Mandiri. Capaian indikator 10.1.1.(d) menunjukkan jumlah desa mandiri di Bali sampai dengan Semester I Tahun 2023 sebesar 502 Desa. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan data dari Kanwil Kemenkumham Bali sebanyak 8 kasus, namun jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan nihil atau tidak ada pengaduan.



## **TUJUAN 11: KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN**

Dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang maju, nyaman, dan ramah lingkungan, berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan tujuan kesepuluh Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau pada tahun 2023 sebesar 84,26 persen dari tahun 2022 sebesar 81,65 persen. Sebelumnya, pada tahun 2018 berada pada posisi sebesar 99,03 persen. Pada tahun 2020 angka ini menurun menjadi 77,05 persen dan tahun 2019 sebesar 77,24 persen, namun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 78,47 persen. Pencapaian ini meningkat dengan meningkatnya akses kredit pemilikan rumah dan program rumah dengan harga terjangkau yang menjadi program Pemerintah.

Tujuan kesebelas terwujud pula dengan meningkatnya ketangguhan Kota tersebut dalam mitigasi bencana dengan mengurangi jumlah kematian dan jumlah korban terdampak bencana serta kerugian ekonominya. Indikator 11.5.1\* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 11 orang. Capaian indikator 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Bali sebesar 123,98 persen. Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk di Provinsi Bali pada tahun 2022 sebanyak 9 (sembilan) yang merupakan seluruh Kabupaten/Kota di Bali dari sebelumnya pada tahun 2021 tercatat sebanyak tiga (3) kota yang terletak di Denpasar, Karangasem, dan Badung. Capaian Indikator 11.5.1.(c) Provinsi Bali memiliki 9 Sirine Peringatan Dini Tsunami dan 6 Sirine Peringatan Dini Erupsi Gunung api Agung sampai dengan Tahun 2023. Dari bencana yang terjadi di wilayah Bali, dampak kerugian ekonomi langsung akibat bencana berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali tercatat sebesar Rp 74.673.911.000. Untuk meningkatkan kesiapan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, maka setiap daerah harus sudah menentukan perencanaan dalam menghadapi bencana. Capaian indikator 11.b.1\* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana sebanyak 9 (sembilan)

Kabupaten/Kota. Kemudian indikator 11.b.2\* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah sebanyak satu dokumen Draft PRB. Peningkatan kenyamanan kota serta upaya pengurangan dampak lingkungan sebagai akibat dari meningkatnya penduduk perkotaan senantiasa dilaksanakan di mulai dari tingkat Desa. Indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, terdapat 2 indikator yakni capaian persentase pengurangan dan capaian persentase penanganan sampah, di mana capaian tahun 2023 penanganan sebesar 77,78 persen.



## **TUJUAN 12: KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB**

Capaian tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab yang telah dilaksanakan di Provinsi Bali diukur melalui penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan. PROPER adalah penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan yang memerlukan indikator yang terukur. Hal inilah yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan peran perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan sekaligus menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi, dan pengembangan masyarakat. Beberapa indikator berikut seperti Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU sebanyak 11 peserta, sampai dengan Tahun 2023. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) pada Tahun 2023 sebanyak 35.968,42 ton, kemudian jumlah timbulan sampah yang didaur ulang sebanyak 149.610,08 ton. Dalam upaya meningkatkan capaian tujuan kedua belas provinsi bali terus meningkatkan pencapaian implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dari tingkat Desa dan Desa Adat, serta menggenjot pembangunan TPS 3R di setiap banjar/lingkungan.



## **TUJUAN 13 : PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM**

Untuk mengantisipasi bencana akibat perubahan iklim yang merupakan tujuan ketiga belas SDGs tentang Penanganan Perubahan Iklim, maka perencanaan dan persiapan mitigasi bencana harus disiapkan. Provinsi Bali telah memiliki Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah sebanyak

satu dokumen pada tahun 2023 dari sebelumnya sebanyak enam dokumen di tahun 2022. Indikator 13.1.2\* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang pada sampai dengan tahun 2023 sebanyak 11 orang. Sampai dengan tahun 2023, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali telah menyusun Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak satu dokumen.



## **TUJUAN 14: EKOSISTEM LAUTAN**

Dalam mewujudkan Tujuan 14 TPB/SDGs tentang Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Bali telah berupaya dalam mewujudkan ekosistem kelautan yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Bali dalam tahapan penyusunan kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional sebanyak 1 dokumen Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pada tahun 2022 terkelola dua wilayah pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman pada tahun 2022 sebanyak 95,156 ton dari tahun 2021 sebanyak 100.755,76 Ton. Kawasan Konservasi Perairan di Bali bertambah sebanyak satu kawasan menjadi 6 kawasan pada tahun 2022 dari tahun 2021 sebanyak 5 wilayah. Kemudian, dalam upaya melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, pengawasan dan penegakan regulasi terus dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta lembaga non pemerintah terkait. Hasilnya, pada tahun 2022 persentase kepatuhan pelaku usaha telah tercapai seratus persen pengusaha patuh pada regulasi yang berlaku. Akses pendanaan kepada nelayan juga telah ditingkatkan di sembilan Kabupaten/Kota di Bali pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022, peningkatan akses pendanaan terdapat di dua Kabupaten. Pada tahun 2022, nelayan di Bali telah memiliki asuransi secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga tidak lagi dibiayai dari anggaran Pemerintah.



## **TUJUAN 15: EKOSISTEM DARATAN**

Dalam mewujudkan Tujuan 15 TPB/SDGs tentang Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan

Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati, Pemerintah Provinsi Bali telah memenuhi beberapa indikator seperti Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan sebesar 27,4 persen pada tahun 2023. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2023 sebesar 2.340 Ha.



## **TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH**

Dalam mendukung Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh di Provinsi Bali, dilaksanakan dengan menjaga keamanan dan ketertiban yang sinergis antar semua pihak. Pada Tahun 2023 berdasarkan data dari Polda Bali, jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir sebanyak 8 kasus dan belum ada kasus kematian karena konflik. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir sebanyak 743 korban. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir 30,06 persen untuk Perempuan dan 28,51 persen untuk laki-laki. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak Perempuan yaitu 52,05 persen untuk Perempuan dan 41 persen untuk laki-laki. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun sebesar 42,01 perempuan dan 39,41 persen laki-laki. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa Perempuan masih rentan terhadap kekerasan baik fisik maupun psikis. Indikator 16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi pada tahun 2023 sebanyak 124 orang memperoleh bantuan hukum litigasi dan 50 orang bantuan hukum non litigasi. Capaian indikator 16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan sebesar 1,42 persen. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) sebesar 75 pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh Pemerintah Daerah di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota dalam 5 tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, dengan ini seluruh Pemerintah Daerah di Bali telah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan terbuka. Indeks Lembaga demokrasi Bali pada tahun 2023 sebesar 79,83, indeks kebebasan sipil sebesar 83,9 dan nilai indeks hak-hak politik sebesar 85,78.



## **TUJUAN 17: KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN**

Per Triwulan III tahun 2023, indikator 17.1.1\* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya sebesar Rp 4.894.660.967.350. Indikator 17.1.1.(a) rasio penerimaan pajak terhadap PDRB sebesar 4.19 persen. Dalam meningkatkan kerjasama dan peningkatan komunikasi informasi juga dibangun infrastruktur penunjang. Pada tahun 2021 Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) telah mencapai 100 persen sejak tahun 2020. Proporsi individu yang menggunakan internet juga meningkat di tahun 2023 menjadi 73,34 persen dari tahun 2022 sebesar 70,59 persen. Pemerintah Provinsi Bali memiliki 1 proyek KPBU. Data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*) pada tahun 2023 mencapai 100 persen.



### BAB III

#### TINJAUAN STATUS DAN UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

##### 3.1 Perkembangan Status Pencapaian dan Upaya Percepatan TPB/SDGs

###### Tujuan 1 Tanpa kemiskinan

Kondisi perekonomian Bali yang mulai berangsur pulih tentunya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Pemerintah untuk melonggarkan aktivitas masyarakat dan dibukanya akses wisatawan mancanegara memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi Bali. Tingkat kemiskinan esktrim di Bali pada tahun 2023 menurun menjadi 0,19 persen dari sebelumnya sebesar meningkat menjadi 0,54 persen di tahun 2022, Tingkat Kemiskinan konvensional di Bali juga menurun menjadi 4,25 persen pada semester I Tahun 2023 (indikator 1.2.1\*).





Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.1.1*	Tingkat Kemiskinan Esktrim	BPS	%	N/A	N/A	0,19	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	3,91	1,0-1,50	4,25	

Dalam menjaga terpenuhinya layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, pemerintah senantiasa berupaya dalam memberikan layanan jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Capaian indikator 1.3.1(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan bagi masyarakat 40 persen terbawah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mengalami peningkatan pada di Tahun 2023 sebesar 100 persen. Indikator 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara dan Papua, untuk wilayah Bali meningkat menjadi 59,26 persen untuk pekerja formal atau sebesar, dan peserta bukan penerima upah sebesar 16.43 persen. Peningkatan pada sektor informal yang sangat signifikan ini dikarenakan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang memberikan Jaminan Sosial bagi seluruh Pemuka Agama di Bali dengan basis data dari Kementerian Agama RI Wilayah Bali. Secara akumulatif total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan antara pekerja formal dan informal sebesar 36,68 persen dibanding pada tahun 2022 30,69 persen (BPJS





Ketenagakerjaan, per 31 Januari 2023), masih di bawah target tahun 2023 sebesar 75 persen, namun diprediksi akan membaik seiring dengan upaya dalam meningkatkan kepesertaan baik dari pekerja formal maupun informal.








Indikator 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas dengan digiatkannya implementasi regulasi penyandang disabilitas meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk miskin penyandang disabilitas yang belum secara menyeluruh tercakup dalam bantuan sosial. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali pada Tahun 2023 capaian indikator 1.3.1.(c) sebanyak 95 orang. Upaya peningkatan layanan dasar juga ditingkatkan sebagaimana terlihat dalam capaian indikator 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan pada Tahun 2023 414.394 keluarga. Angka ini bersifat dinamis karena bisa mengalami penambahan dan pengurangan yang disebabkan penerima manfaat sebelumnya telah mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. (40% terbawah)	Dinas Kesehatan	%	40%	95	100,00%	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Disnaker ESDM	%	23,87	75	57,46 formal	
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	%	0,83	0,86	95 orang	
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	Keluarga	74.321	82.600	414.394	

Capaian indikator 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan pada tahun 2023 sebesar







99,51 persen. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 98,13 persen. Indikator 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap pada tahun 2023 sebesar 74,25 persen di mana capaian ini masih dibawah target tahun 2023 sebesar 100 persen. Indikator 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin pada tahun 2023 sebesar 49,4 persen, menurun dari tahun 2022 sebesar 63,03 persen. Indikator 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (40% ke bawah) meningkat menjadi 98,31 persen dari tahun 2022 sebesar 40,93 persen dan indikator 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan meningkat menjadi 95,70 persen dari tahun 2022 sebesar 95,95 persen. Capaian Partisipasi Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD sebesar 97,77 persen dari tahun 2022 sebesar 97,42 persen. APM pada jenjang SMP menurun menjadi 84,78 dari tahun 2022 sebesar 86,40 persen. APM jenjang SMA sedikit mengalami penurunan menjadi 75,60 persen dari tahun 2022 sebesar 76,18. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2023 sebesar 96,22 persen, meningkat dari tahun 2022 sebesar 95,55 persen. Dari capaian tersebut, secara umum upaya untuk menjamin bahwa bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan telah memiliki capaian yang baik.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya di fasilitas kesehatan.	BPS	%	99,87	100	99,51	
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	BPS	%	100	100	74,25	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin.	BPS	%	57,9	56,5	49,4	
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (40% ke bawah)	BPS	%	83,73		98,31	
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	BPS	%	94,1	100	95,7	
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (40% ke bawah)	BPS	%	2,75		N/A	
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	BPS	%	96,15	95,7	97,77	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	BPS	%	86,42	84,7	84,78	
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	BPS	%	73,00	72,61	75,6	
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	BPS	%	90,48	100%	96,22	

Capaian indikator 1.5.1\* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang pada tahun 2023 sebanyak 11 orang. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana (indikator 1.5.1.(a)) sebanyak 9 Kabupaten/Kota. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial (Indikator 1.5.1.(b) pada Tahun 2023 sebanyak 152 jiwa dan Indikator 1.5.1.(c) Pendampingan psikosial korban bencana sosial sebanyak 152 jiwa. Indikator 1.5.1.(d) Jumlah

kerugian ekonomi akibat bencana berdasarkan data dari BPBD Provinsi Bali pada Tahun 2023 sebesar Rp 74.673.911.000.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	meninggal 19 orang luka berat 19 orang luka ringan 15 orang		11	
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Lokasi	9 kab/kota		9 kab/kota	
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial	Jiwa	40	40	152	
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinas Sosial	Jiwa	626	726	152	
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Dinas Sosial	Daerah	1	1	0	
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD	%	14.98	6	Nilai IRBI 2023 belum keluar, belum bisa dihitung	
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rp.	2.494.000.000	pm	74.673.911.000	
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Buah	6	-	1	

### Tantangan dan Pembelajaran

Kebijakan sesuai prioritas pembangunan Bali antara lain peningkatan pelayanan dasar seperti sandang, pangan, papan serta penguatan jaminan sosial dan pendidikan utamanya menysasar kepada masyarakat dengan perekonomian 40% terbawah. Upaya

perlindungan kesehatan masyarakat dengan ekonomi rentan juga senantiasa ditingkatkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Ketidakpastian ekonomi global akibat perang dan meningkatnya harga minyak dunia berdampak pada peningkatan harga-harga yang menyebabkan kenaikan inflasi juga menjadi tantangan, di mana Pemerintah berupaya dalam menjaga daya beli masyarakat, utamanya masyarakat miskin dan rentan.

### **Kebijakan dan Strategi**

Kebijakan dan strategi dalam mewujudkan Tujuan 1 (satu) TPB/SDGs yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan Visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang tertuang dalam Misi ketujuh Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Secara Komprehensif dan Terintegrasi Bagi Kehidupan Krama Bali Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya. Peningkatan penyaluran Program Keluarga Harapan juga dipercepat dan dipastikan tepat sasaran dengan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemuktahiran data terpadu kesejahteraan sosial. Bantuan sosial baik berupa bahan pokok dan bantuan langsung tunai diberikan kepada masyarakat untuk menjaga daya belinya sebagai akibat dari kondisi perekonomian global. Selain itu dalam upaya mengentaskan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem dilakukan dengan memastikan kelompok miskin dan miskin ekstrem memperoleh program-program perlindungan sosial. Kemudian juga memperluas cakupan penjangkauan kelompok rentan yang belum terjangkau seperti lansia, penyandang disabilitas dan pekerja miskin di sektor informal. Upaya dalam pelibatan komunitas, lembaga non pemerintah dan pihak swasta juga dilakukan dalam upaya mengakselerasi percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.


### **Upaya Percepatan TPB/SDGs**










Upaya Percepatan TPB/SDGs tujuan kesatu sesuai dengan Visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang tertuang dalam Misi ketujuh Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Secara Komprehensif dan Terintegrasi Bagi Kehidupan Krama Bali Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya. Arah dan kebijakan kedepan untuk mempercepat pencapaian tujuan kesatu adalah dengan Meningkatkan jaminan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin) baik bersumber dari APBD, APBN atau sumber-sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Upaya membuka lapangan pekerjaan baru dan sektor-sektor perekonomian dari industri kecil dan menengah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja agar tidak hanya bergantung pada sektor

pariwisata yang rentan terdampak bencana, sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan. Upaya pemberian bantuan sosial dan penjangkauan cakupan penduduk miskin dan miskin ekstrem juga dilakukan dengan penguatan data sasaran *by name by address* sehingga intervensi penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem lebih tepat sasaran. Selain penggunaan anggaran Pemerintah dalam upaya memberikan bantuan dan jaminan sosial, penggunaan data eksternal dari non pemerintah dapat diarahkan untuk membantu kelompok rentan lebih cepat karena proses pencairan dana yang lebih fleksibel dibandingkan dengan anggaran pemerintah.




## Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Indikator 2.1.1\* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Pada tahun 2023 sebesar 3,77 persen. Prevalensi kekurangan gizi (*Underweight*) pada anak balita (indikator 2.1.1.(a)) sebesar 1,62 persen, menurun dari tahun 2022 sebesar 6,6 persen. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan menurun menjadi 2,17 persen dari tahun 2022 sebesar 4,04 persen. Sedangkan Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (indikator 2.1.2.(a)) sebesar 2,79 persen. Indikator 2.2.1\* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita di Bali pada Tahun 2023 sebesar 4,05 persen. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita sebesar 3,8 persen pada Tahun 2023. Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe sebesar 1,80 persen. Prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar sebesar 8,46 persen dari tahun sebelumnya sebesar 7,99 persen. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif pada tahun 2023 sebesar 69,01 persen, meningkat dari tahun 2022 sebesar 66,52 persen. Berdasarkan data Tahun 2023, kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan sebesar 99,2 persen dengan tingkat konsumsi ikan sebesar 16,2 Kg/Kapita per tahun. Capaian ini meningkat dari tahun 2022 dengan skor PPH sebesar 88,3 persen dan tingkat konsumsi ikan sebesar 4,2 Kg/kapita per tahun.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ).	Susenas	-	2,75	103,8	3,77	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Susenas	%	13,1	8,5	1,62	
2.1.2.*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Susenas Kor,	%	3.94	0	2,17	
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	BPS Susenas	%	3,21	-	2,79	
Target 2.2 Pada tahun 2030, mengilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinkes / Riskesdas	%	21,9	19	4,05	
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Dinkes / Riskesdas	%	24,6	13,5	3,8	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinkes / Riskesdas	%	6,3	1,7	1,80%	
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Riskesdas Dinas Kesehatan	%	5,2	7,8	8,46%	
2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Susenas	%	27.08 (Dashbo ard SDGs)	31,5	69,01	
2.2.2(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	%	96,4	98,9	SKOR PPH 99,2 dan tingkat konsumsi ikan 16,2 Kg/Kapita/t ahun	

Nilai tambah pertanian (indikator 2.3.1\*) dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Sampai dengan Tahun 2023 capaian indikator ini sebesar Rp 76.004.137 meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp 69.399.155,36. Angka ini diharapkan meningkat terus sehingga target 2.3 Tujuan kedua SDGs, untuk menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, dan sebagainya dapat tercapai, di mana makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.							
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS Sakernas	rupiah	70.608.381		76,004,137	
Target 2.5 mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional							
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Distan ( Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan )	ton	1.771.062,46	1.665.025,58	35.264	
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Distan ( Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan )	-	-		441.366	

Target 2.5 di Bali diukur dengan indikator 2.5.1\* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas sebesar 35.264 ton. 2.5.2\* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak



berisiko, dan risiko yang tidak diketahui. Pada semester I tahun 2023 Proporsi hewan ternak sebanyak 441.366.

### **Tantangan dan Pembelajaran**

Permasalahan anak kerdil atau stunting merupakan permasalahan yang disebabkan berbagai kondisi sosial selain kurangnya asupan gizi. Sanitasi layak dan perilaku masyarakat serta pola pangan sejak masa kehamilan ibu mempengaruhi gizi bayi sejak dalam kandungan. Tantangan dalam hal mengatasi permasalahan kekurangan gizi pada anak, erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua, buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan.

Pencegahan anak kerdil atau stunting memerlukan pendekatan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat umum. Permasalahan dalam pendataan juga menjadi permasalahan mendasar dalam mencatat angka stunting di Bali. Penggunaan metode yang selalu berubah menyebabkan kendala dalam melihat tren prevalensi stunting.

Kondisi penyebaran penyakit mulut dan kuku menjadi tantangan dalam menjaga ketersediaan daging hewan ternak. Selain berdampak ekonomi dan kesehatan hewan, juga berdampak dalam penyediaan pangan bergizi dari konsumsi daging dengan terjangkitnya hewan ternak.

### **Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan kedua, sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah Peraturan Daerah Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik yang bertujuan memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan. Terkait tantangan-tantangan diatas, terutama terkait peningkatan produktivitas dan nilai tambah, maka perlu transformasi pertanian ke arah digitalisasi pertanian (pertanian 4.0). Penerapan digitalisasi pertanian di sisi hulu diharapkan akan mengubah cara bertani, perilaku petani, hingga cara penyediaan input. Kemudian, digitalisasi sisi hilir memperluas cakupan pasar, efisiensi harga, hingga cara penjualan produk. Upaya digitalisasi pertanian ini sudah mulai kita lihat di Indonesia melalui berbagai model dan inovasi seperti pertanian vertikal, pertanian presisi, dan pertanian pintar (*smart*

*farming*). Untuk menjaga agar hewan ternak di Bali terjaga kesehatannya, pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku juga dipercepat, selain mengisolasi pasar hewan dan subsidi bagi pedagang hewan ternak yang sementara tidak bisa berjualan.




### **Upaya Percepatan TPB/SDGs**

Upaya Percepatan TPB/SDGs yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali sejalan dengan Visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dengan arah kebijakan ke depan penguatan kelembagaan dan sinergitas antar *stakeholder* di bidang pangan. Dalam mempercepat terwujudnya ketahanan pangan untuk meningkatkan gizi masyarakat tidak bisa dibebankan hanya pada satu sektor saja. Perlu adanya sinergitas dan koordinasi kuat antar sektor dan para pemangku kepentingan sehingga setiap permasalahan dari hulu ke hilir dapat dicapai. Upaya untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan kedua dilakukan dengan mendorong sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan diantaranya dengan Program Padat Karya untuk memperkuat program pemberdayaan petani dan padat karya berbasis pertanian di desa dengan model *cash for work*. Kedua, dengan Pemetaan Stok Pangan untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan melalui pemetaan stok pangan, deteksi dini wilayah potensi krisis pangan, serta menjamin kelancaran logistik antar wilayah. Ketiga, Subsidi Pupuk dilakukan untuk memperbaiki jalur distribusi subsidi pupuk kepada petani agar berjalan lebih efektif dan efisien. Keempat, Kredit untuk mengakselerasi peningkatan jumlah petani penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan menyederhanakan mekanisme dan persyaratan. Selanjutnya dengan upaya untuk mengawal ketat stabilisasi harga pangan di petani dan konsumen, disertakan peningkatan kegiatan pasar murah. Kemudian dengan memperkuat ekspor pertanian melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing, oprimalisasi negosiasi perdagangan, dan perluasan pasar terhadap produksi-produksi pertanian di Bali.

### **Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera**





Capaian tujuan ketiga mengalami penurunan pada beberapa indikator. Proses persalinan yang aman yaitu ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas kesehatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Meskipun cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan persalinan di fasilitas kesehatan cukup baik, namun kenyataannya kejadian kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Angka kematian ibu sampai dengan Tahun 2023 sebesar 53,85/100.000 kelahiran Hidup (KH) dari sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 63,89/100.000 kelahiran hidup (KH), menurun dari capaian tahun 2022 sebesar 84,83/100.000 Kelahiran Hidup(KH). Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49

tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih pada tahun 2023 sebesar 84,55 persen, menurun dari tahun 2022 sebesar 99,63 persen. Indikator 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan menurun menjadi 84,55 persen dari tahun 2022 sebesar 98,13 persen. Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa komplikasi kebidanan yang secara langsung menjadi penyebab terjadinya kematian ibu adalah pendarahan dan tekanan darah tinggi saat hamil. Sedangkan penyebab tidak langsung terjadinya kematian ibu adalah tingkat pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat yang masih rendah diantaranya 3 terlambat (terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai di tempat pelayanan, dan terlambat mendapatkan pelayanan yang adekuat). Keterlambatan pengambilan keputusan ditingkat keluarga dapat dihindari apabila ibu dan keluarga mengetahui tanda bahaya kehamilan dan persalinan.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes	/100.000 KH	54,03 (35 jiwa)	80	63,89	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinkes (Riskesdas)	%	99.87 (Dashboard SDGs BPS Susenas)	100	84,55	
3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinkes (Riskesdas)	%	99.87 (Dashboard SDGs BPS Susenas)	100	84,55	

Bersamaan dengan menurunnya angka capaian tersebut, angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup (indikator 3.2.1\*) sampai dengan tahun Tahun 2023 sebesar 10,5/1.000 KH, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022

sebesar 6,4/1.000 KH. Capaian indikator 3.2.2\* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup mengalami peningkatan menjadi menurun menjadi 7,2/1.000 KH dari tahun 2022 sebesar 5,5/1.000 KH. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi 9,6/1.000 KH dari tahun 2022 sebesar 6,2/1.000 KH. Capaian indikator 3.2.2(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2023 telah mencapai 100 persen.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes (SDKI)	/1000 KH	5,17	10	10,5	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes (SDKI)	/1000 KH	3,2	8	7,2	
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes (SDKI)	/1000 KH	4,55	8	9,6	
3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinkes (Risksedas)	%	100	100	100%	









Berdasarkan data yang telah dijabarkan di atas, perlu menjadi perhatian atas meningkatnya angka kematian bayi baru lahir dan balita. Oleh karena itu, peningkatan upaya pencegahan penyakit dan upaya pemenuhan kesehatan ibu dan anak perlu ditingkatkan.

Dalam mewujudkan tujuan ketiga ini mengurangi angka kematian akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental indikator-indikatornya mengalami pencapaian yang lebih baik di tahun 2023. Indikator 3.3.1.(a) prevalensi HIV pada populasi dewasa sampai dengan tahun 2023 menurun menjadi 0,26 % sebelumnya pada Tahun 2022 sebesar 0,3 persen. Indikator 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk pada Tahun 2023 sebesar 116/100.000 penduduk, di mana angka ini perlu mendapatkan perhatian khusus.



Kejadian Malaria per 1.000 orang (Indikator 3.3.3\*) pada Tahun 2023 sebesar 0,01 dengan jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria (indikator 3.3.3.(a)) sejumlah 9 (sembilan) Kabupaten/Kota atau seluruh Kabupaten/Kota di Bali telah mencapai eliminasi malaria. Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B (indikator 3.3.4.(a)) pada Tahun 2023 sebesar 100 persen. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) (Indikator 3.3.5\*) di Bali pada semester I tahun 2023 adalah sebanyak 115 untuk kusta, dan belum ada untuk filariasis, dengan jumlah Kabupaten (indikator 3.3.5.(a)) dengan eliminasi sebanyak 9 Kabupaten/Kota.

Indikator 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur  $\leq 18$  tahun pada tahun 2023 menurun menjadi 2,7 persen dari tahun 2022 sebesar 6,54 persen. Prevalensi tekanan darah tinggi (indikator 3.4.1.(b)) menurun menjadi 0,38 persen pada tahun 2023 dari tahun 2022 sebesar 26,50 persen. Indikator 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur  $\leq 18$  tahun pada tahun 2023 sebesar 0,07 persen dari tahun 2022 pada angka 23.30 persen. Kemudian, Indikator 3.4.2.(a) Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sebanyak 9 Kabupaten/Kota.






Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Dinkes	%	0,33	< 0,5	0,26	●
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinkes		n/a	n/a	116/100.000 pddk	▼
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinkes	pddk	0,02	< 1 / 1000	0.01/1000 pddk	●
3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinkes	Kab/Kota	9	9	9 kab/kot	
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinkes	%	60	100	100%	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinkes	Orang	0	0	Filariasis: 0 Kusta: 155 orang	
3.3.5(a)	Jumlah Kabupaten dengan eliminasi Kusta.	Dinkes	Kab/Kota	9	9	9	
3.3.5(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinkes	Kab/Kota	9	9	Bali bukan daerah Endemis Filariasis sehingga tidak ikut dalam survei penilaian transmisi tahap I	
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur $\geq$ 18 tahun.	Dinkes (Riskesdas)	%	23,50%	5,4	2,7	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinkes (Riskesdas)	%	29,97	18,5	0,38	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur $\geq$ 18 tahun.	Dinkes (Riskesdas)	%	23,30%	26,2	0,07	
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Riskesdas	Kematian Per 100.000 Penduduk	n/a	n/a	0	
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinkes	Kab/Kota	9	9	9	

Indikator 3.5.1.(a) Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis sebesar 195 orang pada tahun 2023. Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu sebanyak 13 lembaga.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Dinkes	Orang	75		195	
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Dinkes	Orang	78			
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Dinsos	Orang	100	100		
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	Dinsos	lembaga	2	2	13	
3.5.2.*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur <sup>3</sup> 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Dinkes (Risksdas)	Liter Per Kapita	n/a	n/a	n/a	


Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern sebesar 59,7 persen, meningkat dari tahun 2022 sebesar 57,37 persen. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin pada tahun 2023 sebesar 62,10 persen, meningkat dari tahun 2022 sebesar 57 persen. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern) tahun 2023 sebesar 43,2 persen, menurun dari tahun 2022 sebesar 47,7 persen. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) tahun 2023 sebesar 17,4 persen, sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 15,5 persen. *Total Fertility Rate* (TFR) Bali tahun 2023 sebesar 2,03 persen, dari target yang diharapkan sebesar 2,3 persen, namun angka ini lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 1,98 persen.



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	BKKBN	%	57,9	56,5	59,7	
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	BKKBN	%	63	423.944	62,10	
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	BKKBN	%	58	41	43,2	
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	BKKBN (SDKI)	/1000 perempuan	22 (SDKI 2017)	27,66	17,4	
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR).	BKKBN (SDKI)	Jumlah Anak Per WUS (15-49)	2,2	2,3	2,03	

Untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, cakupan layanan kesehatan senantiasa ditingkatkan setiap tahunnya. Indikator 3.8.1.(a) unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2022 sebesar 2,75 persen dari sebelumnya sebesar 2,42 persen pada tahun 2021. Capaian ini tergolong rendah di mana hanya sebanyak 2,75



persen penduduk Bali yang sakit namun enggan untuk berobat. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk pada tahun 2023 sebesar 4.269,402/1.000 penduduk atau sebesar 4,2 juta penduduk di Bali. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (Indikator 3.8.2.(a)) pada tahun semester I tahun 2023 sebesar 99,59 persen dan telah memenuhi standar Universal Health Coverage 95 persen sejak tahun 2022, di mana pada tahun 2022 cakupannya telah mencapai 95,80 persen. Persentase merokok pada penduduk umur  $\geq 15$  tahun juga mengalami penurunan menjadi 5,14 persen dari tahun 2022 sebesar 6,54 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan menjaga kualitas udara. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat ini tentunya dibarengin dengan ketersediaan obat dan tenaga kesehatan yang mumpuni. Indikator 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas pada tahun 2023 sebesar 99 persen dari tahun 2022 sebesar 94,17 persen. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (indikator 3.c.1) pada tahun 2023 sebesar 80 persen dan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	BPS	%	3.19 (Dashboard SDGs BPS Susenas)			
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinkes	orang		95 % dari total populasi penduduk		
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinkes	% dari total populasi penduduk	-	95		
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinkes	%	n/a	0	0	
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat							
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Dinkes (Riskesdas)	%	26,05	14,6		

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksindasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeluargaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinkes	%	99%	95%	99%	
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinkes	%	55	80	80	

### Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat diantaranya adalah meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak dengan meningkatkan pelaksanaan Promosi Kesehatan dan pemantauan kesehatan ibu hamil. Kemudian upaya dalam mengendalikan penyebaran penyakit menular dengan meningkatkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu peningkatkan promosi kesehatan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses penularan penyakit diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dari penyebaran penyakit menular. Kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat perlu ditingkatkan kembali sehingga tingkat kesehatan masyarakat Bali menjadi lebih baik, kerjasama dengan semua pihak baik pemerintah dan non pemerintah di Bali perlu ditingkatkan.

### Kebijakan dan Strategi

Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat maka, diperlukan strategi-strategi dalam memenuhi akses masyarakat ke layanan kesehatan.. Dengan data base yang akurat akan memudahkan dalam mendata masyarakat yang terpenuhi jaminan kesehatan terutama masyarakat yang rentan dengan pendapatan 40 persen terendah. Pemerintah Provinsi Bali dalam tahapan membangun data base kesehatan berbasis teknologi informasi dengan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK KBS) yang kedepan akan menjadi dashboard data kesehatan masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan dan strategi untuk memenuhi Tujuan ketiga TPB/SDGs. Upaya Promosi Kesehatan melalui kampanye Gerakan Masyarakat






Hidup Sehat (Germas) juga terus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar meningkatkan aktivitas fisik dan gaya hidup sehat agar tidak mudah terserang penyakit.

### **Upaya percepatan TPB/SDGs**



Upaya percepatan pencapaian Tujuan ketiga TPB/SDGs yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali terangkum dalam program/kegiatan yang mendukung misi ketiga RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali yang terdiri dari Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di mana melalui program-program ini diharapkan dapat menjamin masyarakat Bali terpenuhi kebutuhan akan pelayanan masyarakat yang akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Bali. Upaya dalam mengajak pihak non pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan promosi kesehatan bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan deteksi dini penyakit sebagai langkah preventif pencegahan penyakit.


### **Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas**

Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Capaian Indikator 4.1.1.(c) Presentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2023 sebesar 96,77 persen. . Indikator ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 87 persen namun masih di bawa target sebesar 100 persen. Indikator 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2023 sebesar 102,7 persen. Capaian ini menurun dari tahun 2022 sebesar 103,16 persen dan belum mencapai target tahun 2023 sebesar 106,90 persen. Indikator 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat tahun 2023 sebesar 98,18 persen di mana capaian ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 96,23 persen, namun masih belum mencapai target tahun 2023 sebesar 107,95 persen. Indikator 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat pada tahun 2023 sebesar 93,4 persen, meningkat dari tahun 2022 sebesar 90,82 pesen namun belum memenuhi target tahun 2023 sebesar 94,65 persen. Indikator 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun sebesar 9,74 persen, angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 rata-rata penduduk umur  $\geq 15$  tahun telah mengenyam pendidikan sampai 10 tahun. Dari capaian indikator tersebut di atas, capaian dari target 4.1 tujuan keempat SDGs di Bali sudah sangat baik, namun capaian-capaian tersebut masih kurang memenuhi target yang telah ditetapkan.





Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Disdikpora	%	58,17	60,17	N/A	
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Disdikpora	%	22,32	40,55	N/A	
4.1.1.(c)	Presentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Disdikpora	%	99,43	100	96,77	
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	BPS (Susenas)		103,02	106,90	102,7	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat	BPS (Susenas)	%	96,14	107,95	98,18	
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	BPS (Susenas)	%	87,74	94,65	93,4	
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	9,00	8,9	9,74	

Indikator 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tercapai sebesar 30,53 persen di mana capaian ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 29,58 persen namun belum memenuhi target tahun 2023 sebesar 78,92 persen. Indikator 4.3.1.(b) Perguruan Tinggi (PT) tahun 2023 menurun menjadi 36,46 persen dari tahun 2022 sebesar 38,46 persen.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar							
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	BPS (Susenas) Kor.	%	35,49	78,92	30,53	
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.							
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	BPS (Susenas)	%	87,74	105,6	93,4	





Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	BPS (Susenas)	%	36,40		36,46	

Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan telah memberikan kesempatan yang sama baik perempuan, laki-laki, maupun penyandang disabilitas. Indikator 4.5.1.(1)\* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat menunjukkan sedikit penurunan pada tahun 2023 yaitu sebesar 99,53 persen dari tahun 2022 sebesar 99,62 persen. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat tahun 2023 sebesar 97,03 persen, sedikit mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 98,13 persen. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat tahun 2023 sebesar 97,61, menurun dari tahun 2022 sebesar 103,77 persen. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi tahun 2023 menurun menjadi 98,13 dari tahun 2022 sebesar 98,80 persen.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1.(1)*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	Dashboard SDGs BPS Susenas		99,12		99,53	
4.5.1.(2)*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	Dashboard SDGs BPS Susenas		97,07		97,03	
4.5.1.(3)*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat	Dashboard SDGs BPS Susenas		101,7		97,61	
4.5.1.(4)*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Dashboard SDGs BPS Susenas		110,48		98,13	

Capaian indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur <sup>3</sup>15 tahun ke atas tahun 2023 sebesar 95,61 persen, meningkat dari tahun 2022 sebesar 92,28 persen. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun pada tahun 2023 sebesar 99,92 persen, masih sama dengan capaian tahun 2022. Persentase angka

melek aksara penduduk umur 15-59 tahun sebesar 99,42 persen dari tahun 2022 sebesar 97,01 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia produktif sebesar 99 persen telah memiliki kemampuan numerasi dan literasi dengan baik. Persentase guru SMA, SMK, SLB tahun 2023 sebesar 48,28 persen yang bersertifikat pendidik. Capaian ini kedepan akan diharapkan meningkat pada periode berikutnya dalam upaya memberikan pendidikan berkualitas bagi siswa-siswi.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur <sup>3</sup> 15 tahun ke atas.	BPS	%	92,98		95,61	
4.6.1.(b.1)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	BPS	%	99,92		99,92	
4.6.1.(b.2)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	Dashboard SDGs BPS Susenas	%	97,01		99,42	
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1.*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	DISDIK		PAUD/TK = 32,2 SD = 45,4 SMP = 50,8 SMA = 59,9 SMK = 33,9 PLB = 41,5		48,28 (SMA, SMK,SLB)	

### Tantangan dan Pembelajaran

Masyarakat kurang mampu di daerah pedesaan masih banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kurang mampu dalam menempuh jenjang pendidikan menengah, bantuan pendidikan diberikan secara merata. Peningkatan inklusivitas di sekolah juga perlu ditingkatkan

secara merata di setiap jenjang pendidikan agar penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya mendapat akses pendidikan yang sama. Infrastruktur di sekolah masih banyak yang belum ramah disabilitas, sehingga akses untuk mempermudah akses penyandang disabilitas perlu dibangun secara merata. Untuk meningkatkan daya saing masyarakat Bali, akses pendidikan tinggi perlu ditingkatkan. Untuk menyiapkan pekerja yang memiliki keterampilan khusus akses ke pendidikan vokasi juga perlu ditingkatkan. Pembangunan Sekolah Vokasi idealnya agar kompetensinya disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Sehingga tidak hanya menyiapkan pendidikan vokasi bidang pariwisata saja. Ketika akan melaksanakan transformasi ekonomi Bali selain sarana, sumber daya manusia yang berdaya saing juga penting untuk disiapkan sejak dini.

### **Kebijakan dan Strategi**

Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan yang Terjangkau, Merata, Adil dan Berkualitas Serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun yang merupakan salah satu Misi Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang selaras dengan tujuan keempat TPB/SDGs pendidikan berkualitas dengan sasaran meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, strategi yang diterapkan di Provinsi Bali adalah peningkatan sarana pendidikan yang ramah disabilitas. Kemudian pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial untuk memastikan program-program bantuan sosial pendidikan dapat tepat sasaran diterima oleh masyarakat pra sejahtera. Peningkatan sertifikasi guru di setiap jenjang pendidikan juga dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar dan menjaga kualitas pendidikan di Bali.



### **Upaya percepatan TPB/SDGs**

Upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs tujuan keempat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas adalah dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Pendidikan di Bali dengan meningkatkan sertifikasi pendidik. Kemudian penambahan gedung sekolah juga dilakukan untuk memastikan setiap anak di Bali mendapat sekolah sesuai kebijakan pendidikan yang berlaku. Penambahan jumlah sekolah dengan akreditasi minimal B di pedesaan juga ditingkatkan agar anak-anak di Desa juga mendapatkan akses yang mudah dalam mengenyam pendidikan.



### **Tujuan 5 Kesetaraan Gender**

Pada tujuan kelima ditunjukkan kondisi capaian untuk mewujudkan kesetaraan gender. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan

(indikator 5.1.1\*) yang dimiliki Provinsi Bali sebanyak sembilan kebijakan. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan pada Tahun 2023 sebanyak 9 kebijakan. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. (indikator 5.2.1.(a)) pada Tahun 2023 sebesar 9,07 persen, menurun dari tahun 2022 sebesar 9,27 persen. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir menurun menjadi 4,33 persen dari tahun 2022 sebesar 5,23 persen. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif (indikator 5.2.2.(a)) pada Tahun 2023 sebesar 87,33 persen, menurun dari tahun 2022 sebesar 93,44 persen. Upaya ini terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan atas hukum dapat terlayani dengan baik sehingga dapat memenuhi target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
<b>Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</b>							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinsos P3A	Kebijakan	0	2	9	
<b>Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</b>							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	BPS SPHPN	%	0,000187238	0,000170028		
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinsos P3A	%	N/A	N/A	9.07	





Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinsos P3A	%	N/A	N/A	4.33	
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinsos P3A	%	100	100	87.33	




Upaya dalam mencegah perkawinan anak atau di bawah umur juga diupayakan untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan peningkatan kualitas keluarga. Indikator 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (ASFR) (per 1.000 perempuan umur 15-19 tahun) pada tahun 2023 sebesar 19,80 persen, menurun dari tahun 2022 sebesar 22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan perempuan yang melahirkan pada kelompok umur 15-19 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat tahun 2023 sebesar 93,40 persen, meningkat dari tahun 2022 sebesar 90,82 persen. Hal ini menunjukkan bahwa baik remaja laki-laki maupun perempuan telah meningkat partisipasinya dalam pendidikan menengah atas.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1.(1)*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang kawin atau hidup bersama sebelum umur 15 tahun	Dashboard SDGs BPS Susenas	%	0,28			
5.3.1.(2)*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun	Dashboard SDGs BPS Susenas	%	8,55			
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dashboard SDGs BPS Susenas	Tahun	N/A	N/A		

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (ASFR) (per 1.000 perempuan umur 15-19 tahun)	Dashboard SDGs BPS Susenas	%	36	N/A	19,8	
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dashboard SDGs BPS Susenas	%	87,74	100	93,4	

Indikator 5.5.1\* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah sebesar 16,36 persen, lebih besar dari capaian pada tahun 2023 sebanyak 16,36 persen. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial sebesar 36,38 persen. Indikator 5.6.1.(a) Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi pada tahun 2023 10,05 persen, menurun dari tahun 2022 sebesar 15,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada sebesar 10,05 persen perempuan kawin tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi pada tahun 2023 sebanyak 12 peraturan. Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam pada tahun 2023 sebesar 73,20 persen.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinsos P3A	%	32 (dari 405) / 7,9%	45 (dari 405) / 11,11%	16,36	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinsos P3A	%	14,58%	18,75%	36,38%	
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.							

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	BKKBN	%	N/A	N/A	N/A	
5.6.1.(a)	Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi	Dashboard SDGs BKKBN dan BPS: SDKI	%	13	-	10,05	
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur tentang metode kontrasepsi modern	Dashboard SDGs BKKBN dan BPS: SDKI	%	27,8	-	N/A	
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Dinsos P3A	Peraturan	N/A	-	12	
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	BPS	%	67,99	0	73,2	

### Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan dalam meningkatkan peran dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan antara lain budaya patriarki yang posisi manajerial sebagai ranah laki-laki dan rumah tangga sebagai ranah perempuan, kurangnya pemahaman individu baik laki-laki maupun perempuan itu sendiri mengenai hak-hak perempuan, termasuk hak dalam bidang politik dan ekonomi. Lemahnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender serta belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; (5) serta belum optimalnya koordinasi dan kerja sama multipihak antara

pemerintah (pusat-daerah), masyarakat, media massa, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kondisi kesetaraan Gender di Bali secara umum telah tercapai dengan baik di mana pekerja dan pengusaha di Bidang Informal banyak yang berasal dari kalangan perempuan. Selain itu peningkatan peran serta perempuan dalam lembaga adat juga diberdayakan dengan dibentuknya organisasi wanita berbasis Desa Adat yaitu Paiketan Krama Istri Bali (PAKIS Bali) di bawah naungan Majelis Desa Adat Bali. Lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi perempuan di dalam Desa Adat.

### **Kebijakan dan Strategi**

Visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dalam misi ke-20 (dua puluh) Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali mengarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang berbasis adat dan budaya Bali. Strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan kesetaraan gender tersebut adalah dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang meningkatkan perekonomian industri kecil dan menengah, yang kedepannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi perempuan sehingga diharapkan mampu berkontribusi meningkatkan perekonomian Bali. Sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki regulasi terkait yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 42 tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan Pemerintah Provinsi Bali juga telah mengeluarkan regulasi terkait yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.

### **Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs**


Dalam mempercepat kesetaraan Gender, sesuai dengan misi misi ke-20 (dua puluh) pada Visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, yaitu Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali mengarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang berbasis adat dan budaya Bali, dilaksanakan dengan Program Peningkatan Kesetaraan Gender dengan kegiatan Peningkatan





Kesetaraan Gender bagi Partai politik untuk memberikan pemahaman gender bagi partai politik agar terpenuhinya kuota perempuan minimal 30%.

### Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak menjadi penunjang kehidupan layak, kesehatan serta meningkatkan sektor perekonomian. Dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih, maka kesehatan masyarakat juga diharapkan akan meningkat, serta peningkatan kualitas produksi barang yang memerlukan air bersih juga akan meningkat. Peningkatan akses terhadap air bersih juga akan meningkatkan kualitas pariwisata yang memberikan jaminan rasa aman dan kesehatan bagi wisatawan yang berkunjung. Secara umum tujuan keenam SDGs tentang Air bersih dan sanitasi layak di Provinsi Bali mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak pada tahun 2023 sebesar 98,31 persen, menurun dari tahun 2022 sebesar 98,42 persen. Indikator 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau pada tahun 2023 sebesar 2,7827 m<sup>3</sup>/detik, meningkat dari tahun 2022 sebesar 0,02 m<sup>3</sup>/detik.

Upaya pencapaian target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Indikator 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) sebanyak 586 atau 81,84 persen Desa/Kelurahan di Tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 sebanyak 400 desa/kelurahan. Jumlah Kabupaten/Kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal (indikator 6.2.1.(e)) terdapat di 2 Kabupaten/Kota yaitu di Badung dan Denpasar. Indikator 6.2.1(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat pada tahun 2023 sebesar 87,9 persen, menurun dari tahun 2022 sebesar 93,42 persen.


Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1.(a).	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Susenas Kor.	%	93,76		98,31	



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	PU/Satker PLP	(m3/dtk).	0,0064	0,35	2,7827	
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Susenas Kor		84,28			
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinkes	Desa/Kelurahan	179	400	586 desa/kelurahan (81,84%)	
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	PU/Satker PLP	Kabupaten/kota		2 (Badung & Denpasar) n/a	2	
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	PU/Satker PLP	%	100		87,9	

Indikator 6.3.2.(b) Kualitas air Sungai sebagai sumber air baku pada tahun 2023, 3 sungai yang dipantau oleh Dinas Kelautan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali (Sungai Unda, Sungai Melangit dan Sungai Jinah) kualitasnya tidak memenuhi sebagai sumber air baku (air sungai kelas I). Upaya dalam mencapai target 6.5, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat terus ditingkatkan. Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi (indikator 6.5.1.(b)) pada tahun 2023 sebanyak



9 stasiun. Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk sebanyak 2 jaringan informasi. Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau sebanyak 2 wilayah Sungai dengan melibatkan 41 Komunitas (39 Komunitas Pencinta Sungai, 1 Komunitas Pecinta Sungai dan Pantai, 1 Komunitas Pecinta Danau). Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air sebanyak 1 lembaga di tahun 2023.



Target 6.6 untuk melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau juga terus ditingkatkan. Indikator 6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya sebanyak 4 danau. Indikator 6.6.1.(d) luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi seluas 2.340 Ha, meningkat dari tahun 2022 sebesar 680 Ha.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	DKLH	Status kualitas	tercemar	85,71	DKLH tidak melakukan pemantauan kualitas air danau	
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DKLH	Indeks Kualitas	60,67	85,71	3 sungai yang dipantau oleh DKLH Prov Bali (Sungai Unda, Sungai Melangit dan Sungai Jinah) kualitasnya tidak memenuhi sebagai sumber air baku (air sungai kelas I) DKLH Provinsi	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
						Bali belum menetapkan kelas air sungai, sehingga untuk menetapkan status mutu kualitas air sungai menggunakan kelas II	
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.							
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Disnaker ESDM	%	45	70		
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Disnaker ESDM	%	55	80		
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.							
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	LH/P3E	RPDAST				
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.	ESDM	Stasiun	17	20	9	
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.		Jaringan Informasi	1	1	2	



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> lintas Negara.	LH	DAS				
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	LH	Ha				
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	PU	WS Bali-Penida	1	2	41 Komunitas (39 Komunitas Pecinta Sungai, 1 Komunitas Pecinta Sungai dan Pantai, 1 Komunitas Pecinta Danau)	
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	PU	Lembaga (TKPSDA)	1	1	1	
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	LH / DisHutan / PU / BWS	DAS	-			
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	PU / BWS	DAS	1	4		
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.							

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	LH / BWS / P3E					
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	BWS	Danau	4	4	4	
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	LH / P3E	Danau	4	4	Data dari BWS	
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	LH / P3E	Danau	4	4	Data dari BWS	
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	LH / DisHut / P3E	Ha.	-	680	2340	
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dishut	DAS	0	0	0	

### Tantangan dan Pembelajaran

Upaya untuk meningkatkan akses air minum layak tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Tingginya intensitas penggunaan air tanah yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan oleh rumah tangga dan dunia usaha serta dunia industri menyebabkan terkikisnya permukaan tanah. Kemudian pembuangan limbah industri secara sembarangan mencemari sumber air yang berdampak terhadap memburuknya kualitas air. Meskipun secara umum pencapaian sanitasi di Provinsi Bali mengalami peningkatan, namun tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan dan memperluas akses bagi masyarakat terutama di kawasan kumuh perkotaan dan pedesaan. Untuk beberapa daerah yang memiliki potensi pariwisata yang bernilai tinggi seperti Nusa Penida, akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan dan isu strategis. Akses terhadap air bersih masih terbatas dan perlu dilakukan upaya oleh semua pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan ini.

### Kebijakan dan Strategi

Dalam mengotimalkan potensi yang ada di Provinsi Bali, untuk mencapai tujuan keenam dilakukan. Strategi yang digunakan diantaranya adalah dengan bekerjasama dengan badan usaha dalam membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Adapun SPAM yang dibangun dengan kerjasama pihak badan usaha adalah SPAM Unda yang telah dimulai

sejak tahun 2018 dan SPAM Ayung dari tahun 2019. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan air bersih dan sanitasi layak untuk masyarakat. Kemudian, untuk menjaga kualitas air bersih dari sumbernya, Pemerintah juga mengajak masyarakat agar menjaga kebersihan sumber air dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta mengeluarkan peraturan-peraturan yang terkait perlindungan atas lingkungan hidup. Selain dengan usaha-usaha tersebut, Strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam mencapai tujuan keenam air bersih dan sanitasi layak dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang bertujuan untuk melakukan monitoring kegiatan konservasi air tanah dan pengamatan jaringan 17 unit sumur pantau yang tersebar di Kabupaten/Kota di Bali. Kegiatan ini bertujuan juga untuk memantau pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah dari pelaku pengambilan dan pengusahaan air tanah, serta mendapatkan data-data fluktuasi muak air tanah. Tujuan serupa juga dilakukan dengan kegiatan Pengembangan Air Tanah dan Geologi lingkungan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan air tanah yang juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pendapatan di Kabupaten/Kota, Badan Geologi Kementerian ESDM RI serta aparat hukum dalam optimalisasi pengelolaan air tanah di Bali.






### **Upaya percepatan TPB/SDGs**

Upaya percepatan pencapaian tujuan keenam kedepan adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta dalam membangun Sistem Penyediaan Air Minum. Dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi pembiayaan alternatif bagi Pemerintah dalam menjalankan proyek-proyek strategis khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar seperti penyediaan air minum. Dalam peningkatan sanitasi layak juga dilakukan di tingkat desa selain membangun infrastruktur yang komunal dan terpusat juga dengan sosialisasi ke masyarakat mengenai sanitasi layak dengan memberdayakan Desa dan Desa Adat. Upaya percepatan juga dilakukan melalui kegiatan pengelolaan air tanah yang bertujuan untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis air tanah terkait izin pengusahaan air tanah. Kegiatan ini berupa peninjauan lapangan sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, mengendalikan kegiatan pengambilan air tanah, sehingga keberadaan air tanah dapat lestari dan pemanfaatannya berkelanjutan.

### **Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau**

Provinsi Bali dalam menjamin akses layanan energi yang terjangkau, andal dan modern telah berhasil dicapai dengan sangat baik yang diindikasikan dengan tercapainya

indikator 7.1.1\* tentang rasio elektrifikasi di Provinsi Bali yang telah mencapai 100 persen, meningkat dari tahun 2018 sebesar 90 persen. Indikator 7.1.1.(a) konsumsi listrik per kapita mengalami penurunan pada Tahun 2023 sebesar 1.190 Kwh dari sebelumnya sebesar tahun 2022 sebesar 1.275,18 Kwh. Indikator 7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2023 2022 sebesar 87,55 persen, meningkat dari tahun 2021 sebesar 82,10 persen. Komitmen Provinsi Bali dalam mendukung penggunaan energi bersih terbarukan terlihat pada pemenuhan indikator 7.2.1\* bauran energi terbarukan pada tahun Tahun 2023 sebesar 3,80 persen dari 2022 sebesar 1,29 persen, namun belum memenuhi target sebesar 11 persen. Bauran Energi Terbarukan mengalami peningkatan seiring dengan komitmen Provinsi Bali untuk mewujudkan penggunaan energi bersih. Indikator 7.3.1\* Intensitas energi primer sebesar 0,00137, di mana angka ini masih di bawah target Tahun 2023 sebesar 1 persen.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Tujuan 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Disnaker & ESDM	%	90	100	100	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Disnaker & ESDM	Kwh	2155	2405	1190	
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Disnaker & ESDM	SR	-	-	N/A	
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Susenas	%	74,95	-	85,61	
Tujuan 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Disnaker & ESDM	%	0,40	11	3,80	
Tujuan 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.							
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Disnaker & ESDM		1,00	1,00	0,00137	

### Tantangan dan Pembelajaran

Peningkatan penggunaan listrik per kapita mengharuskan agar ketersediaan pasokan listrik agar selalu terjaga. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga ketersediaan pasokan listrik yang tinggi namun secara berkelanjutan agar dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan. Bali tidak memiliki sumber daya alam yang

melimpah, tidak memiliki sumber energi berbasis fosil atau energi tidak terbarukan (minyak, batu bara), namun memiliki sumber energi bersih berupa energi baru terbarukan (sinar matahari, aliran air, air terjun, angin, panas bumi, bioenergi, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan hidrogen) cukup melimpah sebagai potensi energi daerah. Dalam mewujudkan tujuan ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau, perlu dilakukan pemetaan dan inventarisasi dengan cermat meliputi potensi, peluang, dan kendala untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi daerah yang berwawasan kedepan yaitu menuju Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih. Kebutuhan dasar strategis tersebut dipenuhi dengan kebijakan berupa pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali Tahun 2020-2050. Pemberlakuan Perda ini sesuai dengan amanat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Saat ini Bali memiliki ketersediaan energi dengan kapasitas 1.261,2 MW yang bersumber dari pembangkit lokal Bali dengan kapasitas 921,2 MW bersumber dari pembangkit energi dari (Buleleng, Jembrana, dan Denpasar) dan bergantung pada saluran dari luar Bali (kabel laut dari Paiton ke Gilimanuk) dengan kapasitas 340 MW. Pembangkit energi lokal Bali merupakan energi bersih/ramah lingkungan, sedangkan yang disalurkan dari Paiton merupakan energi yang tidak ramah lingkungan, karena memakai bahan bakar batu bara. Beban puncak kebutuhan energi di Bali pada tahun 2019 adalah sebesar 902 MW. Berdasarkan data ini, Bali belum mandiri energi, dan belum sepenuhnya menggunakan energi bersih/ramah lingkungan. Bauran energi terbarukan di Provinsi Bali pada tahun 2018 sebesar 0,4%. Angka ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 0,5% dan meningkat sebesar 0,6% pada tahun 2020, ditargetkan akan meningkat menjadi 11,15 % pada tahun 2025, dan diharapkan porsi EBT menjadi 20,10 % pada tahun 2050 seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali Tahun 2020-2050.

### **Kebijakan dan Strategi**

Untuk mencapai tujuan ketujuh kebijakan dan strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali melalui Program Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral yang didukung dengan kegiatan Pengembangan Ketenagalistrikan yang bertujuan untuk menginventarisir data potensi energi terbarukan dan kondisi eksisting ketenagalistrikan, melakukan kegiatan pengembangan energi terbarukan dan ketenagalistrikan, menyiapkan regulasi sektor energi dan ketenagalistrikan untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen di wilayah Bali. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang merupakan energi bersih, adalah bagian dari kebijakan energi nasional dalam rangka mencapai target 23% bauran energi di tahun 2025 dan menjaga

keberlangsungan aspek lingkungan. Bali menjadi salah satu provinsi yang sangat progressif dalam peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi melalui Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan energi di Bali secara mandiri, ramah lingkungan, berkelanjutan dan berkeadilan dengan menggunakan energi bersih. Selain itu telah disusun Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Peraturan ini mendukung program Pemerintah untuk efisiensi energi dan pengurangan polusi di bidang transportasi. Strategi percepatan pemanfaatan kendaraan tersebut dilakukan dengan mewajibkan penggunaannya di lingkungan pemerintahan, otoritas pengelola kawasan, BUMN/BUMD, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum secara bertahap. Kemudian kewajiban bagi industri kendaraan bermotor listrik beserta usaha pendukungnya untuk menggunakan konten lokal.




### **Upaya Percepatan pencapaian TPB/SDGs**

Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung peralihan energi dari yang sebelumnya bersumber dari sumber daya tidak terbarukan ke energi yang bersumber dari sumber daya terbarukan. Upaya ini dilakukan dengan kegiatan Percepatan Pembangunan Politeknik Energi Baru terbarukan dan Ketenagalistrikan di Provinsi Bali yang bertujuan untuk pembebasan lahan seluas 10 Ha sebagai lokasi pembangunan yang diharapkan dapat menjadi tempat untuk meningkatkan sumber daya manusia berbasis kompetensi di bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi, menjadi pusat unggulan energi bersih di Bali (*Centre of Excellence for Clean Energy*) serta mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan Bali Energi Bersih sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 tahun 2019. Selain itu, langkah-langkah awal dimulai dengan pemasangan panel surya di beberapa kantor Pemerintahan di Bali serta mendukung dipasarkannya pengusaha alat kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Beberapa infrastruktur pendukung seperti tempat pengisian daya listrik juga telah dibangun di kantor PT. PLN yang ada di Kota Denpasar dan akan menyasar di Kabupaten lainnya.




### **Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, dan mulai kembali membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Indikator 8.1.1\* Laju pertumbuhan PDB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2023 sebesar 5,71 persen, meningkat dari tahun 2022 sebesar 3,59 persen. Indikator 8.1.1 (a.1) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 sebesar 62,29 Juta Rupiah, meningkat dari tahun 2022 sebesar 55,54 juta Rupiah namun masih belum memenuhi target tahun 2023

pada kisaran 66-71 Juta Rupiah. Indikator 8.2.1\* Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun sebesar -1,81 persen dari tahun 2021 sebesar -3,2 persen. Meskipun capaian ini masih dalam posisi terpuruk, namun sudah mulai menunjukkan pemulihan sejak pandemi.





Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Tujuan 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1*.	Laju pertumbuhan PDB per kapita atas dasar harga konstan (%)	BPS	%	5,18		5,71	
8.1.1.(a.1)	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ribu rupiah)	BPS	Ribu Rupiah	54.433,46	66-71	62,29	
Tujuan 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS (Sakernas)	%	0,94		N/A	

Capaian target 8.3 menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan di masa pandemi Covid-19 cenderung mengalami penurunan. Persentase tenaga kerja formal (indikator 8.3.1.(a)) pada Tahun 2023 sebesar 47,65 persen, meningkat dari tahun 2022 sebesar 46,57 persen namun masih di bawah target tahun 2023 sebesar 63 persen. Indikator 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 27,68 persen dari tahun 2022 sebesar 39 persen. Capaian ini juga masih belum memenuhi target tahun 2023 sebesar 32 persen. Dari sisi perbankan, terdapat beberapa alasan mengapa akses UMKM terhadap perbankan rendah. Beberapa diantaranya adalah Perbankan kurang atau tidak menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UKM, dan pemberian kredit kepada UKM dianggap masih beresiko tinggi.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Tujuan 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS(Sakernas)	%	38,37%	63%	N/A	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS(Sakernas)	%	50,62%	63%	47,65	
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	BPS(Sakernas)	%	93,37%	8%	N/A	
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Bank Indonesia	%	35%	32%	27,68%	

Capaian indikator 8.5.1\* upah rata-rata per jam kerja mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 17.588 setelah sedikit penurunan sebesar Rp 16.857 pada tahun 2022 dari capaian pada tahun 2021 sebesar Rp 17.662. Indikator 8.5.2\* Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali kembali menurun pada Tahun 2023 menjadi sebesar 2,69 persen, di mana tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun menjadi 4,80 persen sejak tahun 2022 dari tahun 2021 sebesar 5,37 persen setelah sebelumnya mengalami kenaikan secara tajam sebesar 5,63 persen di tahun 2020. Indikator 8.5.2.(a) persentase setengah pengangguran juga mengalami penurunan menjadi 2,57 persen pada Tahun 2023 dari sebelumnya sebesar 3.93 persen pada tahun 2022. Target 8.6 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan pada tahun 2022 juga menunjukkan tren positif dengan indikator 8.6.1\* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) yang mengalami penurunan menjadi 10,03 persen dari tahun 2022 sebesar 11,32 persen. Indikator 8.8.1(a) jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 pada tahun 2023 sebanyak 38.378 perusahaan.



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	BPS(Sakernas)	rupiah	15972.21 (Dashboard SDGs)		N/A	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka menurut Provinsi, Kabupaten/Kota	BPS(Sakernas)	%	1.37 (dashboard SDGs)		2,69	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	BPS(Sakernas)	%	2.36 (dashboard SDGs)		2,57	
Tujuan 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS(Sakernas)	%	8,59		10,03	
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.							
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Dinas Tenaga Kerja & ESDM	Perusahaan	187		38.378	

Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PRDB sebesar 19,93 persen (lapangan usaha akomodasi dan makan minum). Sedangkan, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali pada tahun 2023 sebesar 5,27 juta, meningkat dari tahun 2022 sebanyak 2,2 juta wisman. Jumlah perjalanan yang dilakukan penduduk Indonesia menurut provinsi asal sebanyak 18.825,68 ribu. Sektor Perbankan juga turut berkontribusi dalam upaya menggerakkan perekonomian Bali. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada Tahun 2023, Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit sebesar 44 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2023, hampir separuh dari kredit yang disalurkan atau sebesar 44 persen diberikan kepada UMKM. UMKM sendiri memiliki peran sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya akses dalam pembiayaan, terbatasnya akses pembiayaan, kesiapan digital, dan akses pemasaran.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	BPS, Dinas Pariwisata	%	23,38	57	19,93	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	BPS, Dinas Pariwisata	juta	6,07	11.1 juta	5,27	
8.9.1.(b)	Jumlah perjalanan yang dilakukan penduduk Indonesia menurut provinsi asal	BPS, Dinas Pariwisata	ribu	6.621.617	11,3	18.825,68	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	BPS, Dinas Pariwisata	Rp	133.331.125.870.000,00	306.277.599.750.000	N/A	
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	BPS, Dinas Pariwisata	persen	12,88	10.800		
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia (SSKI)	-	Jumlah Kantor Bank: 673			
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Bank Indonesia (Data UMKM), Biro Perekonomian	%	37.58%		44,00%	

### Tantangan dan Pembelajaran

Belajar dari terpuruknya perekonomian Bali ketika terjadi bencana, maka Bali harus merubah struktur perekonomian agar tidak bergantung pada sektor pariwisata saja. Untuk itu perlu dilakukan transformasi struktural ekonomi yang salah satunya dengan inovasi dalam sektor keuangan. Struktur perekonomian Bali masih sangat rentan dengan sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata. Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan maka diperlukan transformasi ekonomi Bali yang bertujuan untuk menemukan keseimbangan (*Equilibrium*) baru. Penurunan kondisi perekonomian yang dibarengi dengan peningkatan jumlah pengangguran karena banyaknya lapangan pekerjaan yang harus tutup sementara dan permanen menjadi tantangan yang sangat besar bagi Bali dalam mewujudkan tujuan kedelapan

TPB/SDGs. Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian Bali, berbagai kebijakan dilakukan seperti pemberian stimulus usaha dan relaksasi kredit, Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Sosial Pangan. Bencana alam dan non alam yang berdampak pada pariwisata yang menopang sektor-sektor penggerak ekonomi Bali menjadi sektor yang paling terdampak. Oleh karena itu, Bali harus beralih agar tidak hanya mengandalkan sektor pariwisata. Sektor-sektor pertanian industri kecil dan menengah serta industri kreatif yang potensial di Bali harus ditingkatkan sehingga ketika terjadi bencana sejenis maka sektor-sektor non pariwisata mampu menopang perekonomian Bali. Digitalisasi dunia usaha dan industri dapat membantu perekonomian dalam menuju era kenormalan baru.

### **Kebijakan dan Strategi**

Kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah seperti bantuan melalui kartu pra-kerja bagi calon pencari kerja dan pekerja yang telah di rumahkan dan terpaksa menganggur agar para pencari kerja dapat memiliki keahlian lainnya sehingga bisa bekerja di bidang lainnya dan diharapkan mampu berwirausaha. Bantuan tunai bagi pekerja dari Kementerian Tenaga Kerja RI melalui data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan penghasilan dibawah lima juta Rupiah, serta Bantuan Tunai bagi pekerja terdampak pandemi dan masyarakat dengan pendapatan 40% terendah diberikan agar dapat melakukan kegiatan konsumsi sehingga perekonomian dapat bergerak. Inovasi-inovasi lainnya perlu dilakukan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah untuk memulihkan perekonomian Bali sehingga masyarakat dapat sejahtera. Strategi yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi Bali adalah dengan melakukan transformasi ekonomi Bali, di mana transformasi ini dengan membagi proporsi sektor ekonomi yang sebagian besar di sektor tersier, dibagi proporsi nya secara berimbang ke sektor primer dan sekunder. Sehingga perekonomian Bali tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata saja yang rentan terdampak krisis. Pemerintah Provinsi Bali telah bersama dengan Bappenas RI telah menyusun Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dengan menunangkan dalam konsep-konsep kearifan lokal Bali dan nilai-nilai Sad Kerthi yaitu Atma Kerthi (Penyucian Jiwa), Segara Kerthi (Penyucian Laut), Danu Kerthi (Penyucian sumber air), Wana Kerthi (Penyucian tumbuh-tumbuhan), Jana Kerthi (Penyucian manusia), Penyucian Jagat Kerthi (Penyucian alam semesta) yang disinergikan dengan strategi transformasi ekonomi Bali yaitu meningkatkan Bali Pintar dan Sehat, Bali Produktif, Bali Hijau, Bali Terintegrasi, Bali *Smart Island*, dan Bali Kondusif yang selaras dengan 4 (empat) pilar SDGs. Prioritas Pembangunan Bali ke depan dalam bidang ekonomi perlu memperhatikan isu strategis terkait ketahanan ekonomi. Prioritas pembangunan Bali kedepan didesain

dengan memperhatikan prioritas daerah. Pemerintah Provinsi Bali dengan Bappenas RI telah menyusun transformasi ekonomi Kerthi Bali yang memperhatikan 6 strategi utama yaitu: (1) Bali Sehat dan Pintar; (2) Bali Produktif; (3) Bali *Smart Island*; (4) Bali Hijau; (5) Bali Terintegrasi; serta (6) Bali Kondusif dan Berintegritas.

### **Upaya percepatan TPB/SDGs**

Dalam rangka mempercepat capaian TPB/SDGs pasca Pandemi Covid-19 stimulus usaha bagi UMKM diberikan sebagai bantuan usaha agar dapat memproduksi. Untuk mewujudkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan maka perlu digali sektor-sektor ekonomi lainnya yang potensial seperti pertanian modern, meningkatkan industri kreatif, *refocusing* pariwisata dari *mass tourism* menjadi *quality tourism* di mana wisatawan yang datang diharapkan akan memiliki masa tinggal yang lama, membeli produk-produk lokal asli Bali dan akan melakukan kunjungan kembali di masa depan. Sektor-sektor potensial lainnya yang dapat digali dengan investasi di bidang pendidikan dan penggunaan *digital payment* dalam setiap kegiatan perekonomian di Bali yang lebih mudah dan modern bagi konsumen. Pemerintah Daerah Bali juga bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam skema pendanaan alternatif untuk menggerakkan sektor ekonomi melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang wajib dilaksanakan. Untuk mempercepat peningkatan perekonomian Bali, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu dengan mengembangkan komoditas unggulan yang dapat menjadi daya ungkit ekonomi Bali, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi untuk pemerataan pembangunan wilayah, pelestarian fungsi lahan lindung dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

### **Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Capaian target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua pada tahun 2021 tidak mengalami penambahan infrastruktur. Indikator 9.1.1.(a) kondisi jalan mantap nasional tahun 2021 sepanjang 615,96 Km (97,87 persen). Pada tahun Tahun 2023 proses pembangunan Tol Jagat Kerthi yang menghubungkan Mengwi-Gilimanuk sedang proses tahap awal pembebasan lahan. (indikator 9.1.1.(b). Indikator 9.1.2.(a) jumlah bandara sebanyak satu bandara, indikator 9.1.2.(b) jumlah dermaga penyeberangan sebanyak 11 dermaga, dan indikator 9.1.2.(c) jumlah pelabuhan strategis sebanyak 4 pelabuhan.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Dinas PUPR (Renstra Kementerian PUPR 2015-2019)	-	621,57 km, 98,76%	629,45 km, 100,00%		
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Dinas PUPR	-	12,7km, 100,00%	12,7km, 100,00%		
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Dinas Perhubungan	Unit	1	1	1	●
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Unit	7	7	11	●
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan	Unit	2	2	4	●

Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang dengan kebijakan pelonggaran pembatasan sosial mulai membaik. Indikator 9.2.1\* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita pada Tahun 2023 sebesar 6,24 persen, sedikit mengalami penurunan dari Tahun 2022 sebesar 6,8 persen. Capaian indikator 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur Tahun 2023 sebesar 2,26 persen, dan proporsi tenaga kerja pada sektor industry manufaktur sebesar 14,68 persen

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	BPS	%	6,00		6,24	▼
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS	%	5,67		2,26	▼
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS	%	14,63		14,68	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	BPS	%	-		N/A	
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	BPS	%	-		N/A	

Untuk meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, setiap Pembangunan di Bali diupayakan untuk tetap ramah lingkungan. Persentase perubahan emisi Co2/emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2023 sebesar 12.089,85 Gg CO2e. Untuk meningkatkan industri yang cepat dan ramah lingkungan, meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet terus diupayakan dengan mengurangi *blank spot internet* di beberapa wilayah. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya Proporsi individu yang menguasai/menggunakan telepon genggam menjadi 73,2 persen di tahun 2023, dari sebelumnya sebesar 72,82 di tahun 2022. Namun, proporsi individu yang menggunakan internet mengalami penurunan menjadi 73,34 persen dari tahun 2022 sebesar 83,51 persen. Penurunan ini diperkirakan karena kegiatan yang dikerjakan dari rumah secara daring akibat pandemi telah berkurang.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Dinas Lingkungan Hidup				Inventarisasi GRK tidak menghitung industri manufaktur (yang dihitung di sektor energi termasuk transportasi, pertanian, kehutanan, dan limbah).	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca.	Dinas Lingkungan Hidup	%	0,015 (115,962,383)	0,015 (106,667,417)	12.089,85 Gg CO2e	●
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020							
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	BPS Susenas	%	67,99		73,2	●
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS Susenas	%	46.42 (Dashboard SDGs)		73,34	▼

### Tantangan dan Pembelajaran

Secara umum Bali tidak memiliki potensi alam yang besar seperti pertambangan, sehingga pada sektor industri Bali lebih banyak bergantung pada industri manufaktur dan pengolahan. Industri pengolahan dan manufaktur lebih banyak tergolong dalam kategori industri kecil dan menengah (IKM) dengan memanfaatkan sumber daya kearifan lokal dan kreativitas masyarakat Bali. Selain itu di masa pandemi Covid-19 selain Pemerintah berfokus dalam penanganan dampak sosial dan pengendalian penyebarannya, dapat menjadi momentum bagi masyarakat dalam berinovasi untuk beradaptasi atas kebiasaan-kebiasaan baru yang mengandalkan teknologi informasi dan mulai beralih dari cara-cara konvensional. Untuk mendukung pengembangan industri, dan inovasi yang efisien maka pembangunan infrastruktur menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan sebagai sarana penunjang aktivitas pengembangan industri di Bali dan inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi.

### Kebijakan dan Strategi

Memperkenalkan produk-produk lokal Bali seperti tenun ikat endek Bali ke dunia internasional dilakukan untuk mengangkat dan melestarikan warisan budaya Bali, meningkatkan pemasaran kerajinan endek Bali, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menerapkan teknologi informasi ditengah pandemi COVID-19. Sasaran inovasi adalah memberdayakan para pelaku UMKM/IKM dan perajin agar tetap eksis, semakin terpacu dan terus berkarya dengan inovasi-inovasi di tengah pandemi COVID-19. Pengembangan produk UMKM berbasis lokal berstandar global dengan proses produksi yang ramah lingkungan serta peralatan yang masih tradisional dengan

mempertahankan kearifan lokal daerah Bali, produk yang dihasilkan oleh para IKM yang ada di Bali sangat diminati baik nasional sampai internasional sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Bali. Selain itu, turut menggandeng PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk metode transaksi secara digital (*cashless*) melalui aplikasi *QRIS*. Kebijakan baru tersebut merupakan implementasi langsung dari 3 peraturan yakni UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali; Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali; dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.

### **Upaya Percepatan TPB/SDGs**

Upaya percepatan pencapaian tujuan kesembilan dalam memajukan industri di Provinsi Bali dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dengan menyusun Peraturan Daerah Bali Nomor 8 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali Tahun 2020-2040. Peraturan Daerah ini akan untuk menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri berbasis budaya *branding* Bali yang berkualitas, produktif, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan yang dijiwa filosofi *Tri Hita Karana*, bersumber dari nilai-nilai *Sad Kerthi* yang diselenggarakan dalam satu-kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Industri unggulan Provinsi Bali berdasarkan potensi daerah yang terdiri dari industri pangan, industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal, industri tekstil dan produk tekstil, industri kerajinan, industri elektronika dan telematika, serta industri transportasi. Selain industri unggulan Provinsi Bali, dapat juga dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan dari masing-masing Kabupaten/Kota di Bali. Pembangunan industri sebagaimana diatur di dalam Perda tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan struktur perekonomian Bali agar tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata.

Pemerintah Provinsi Bali mulai meningkatkan kegiatan administrasi secara elektronik seperti administrasi persuratan dengan aplikasi berbasis Web, Absensi *online* bagi pegawai, dan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan melalui aplikasi *e-procurement*. Beberapa proyek infrastruktur pada Semester I Tahun 2022 untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Bali yang akan dilaksanakan diantaranya Pembangunan Taman Teknologi Turyapada Tower KBS 6 0 Kerthi Bali untuk mengatasi terbatasnya jangkauan siaran televisi (*blank spot*), khususnya di wilayah Buleleng. Tanpa bantuan antena parabola, masyarakat Buleleng tidak dapat menikmati siaran televisi. Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali yang menghubungkan (Mengwi-Gilimanuk) juga dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten






dan Pemerintah Pusat. di mana Jalan Tol ini direncanakan memiliki panjang total 96,21 Km. Jalan Tol Jagat Kerthi Bali merupakan satu-satunya jalan Tol yang pertama dibangun di Indonesia dengan tambahan fasilitas jalur sepeda, dan Trase Jalan Tol ini akan melalui 3 Kabupaten, 13 Kecamatan, hingga 58 Desa.



### Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Gini rasio Provinsi Bali berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun 2022 sebesar 0,362 persen Indikator 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada Tahun 2023 sebesar 4,25 persen dari tahun 2022 sebesar 4,53 persen. Daerah tertinggal di Provinsi Bali sudah seratus persen terentaskan (indikator 10.1.1.(b)) demikian pula indikator 10.1.1.(c) di mana tidak ada lagi desa tertinggal di Provinsi Bali. Indikator 10.1.1.(d) jumlah desa mandiri pada tahun 2023 sebanyak 502 desa dari sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 386 desa (per 23 Mei 2022).

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS Susenas	%	0.377	0,2500	0,362	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	4.01	1,0-1,50	4,25%	
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas PMD Capil	Daerah	0	0	tidak ada daerah tertinggal	
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas PMD Capil	Desa	0	0	0	
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Dinas PMD Capil	Desa	43	15,725% (100 Desa)	502	
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Dinas PMD Capil	%	N/A	N/A	tidak ada daerah tertinggal	
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Dinas PMD Capil	%	N/A	N/A	tidak ada daerah tertinggal	

Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut, di mana target ini mengharuskan untuk mengurangi kesenjangan hak hukum bagi masyarakat. Indikator 10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil menunjukkan capaian yang cukup tinggi sebesar 85,78 persen di tahun 2023. Indikator 10.3.1.(b) jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Tahun 2023 sebanyak 17 kasus. Sedangkan indikator 10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap Perempuan dan indikator 10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional tercatat nihil. Upaya perlindungan sosial yang setara bagi para pekerja juga terus ditingkatkan. Dalam target 10.4 mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar, pada indikator 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2023 pekerja formal sebesar 57,48 persen sedangkan pekerja informal sebesar 15,35 persen dengan cakupan keseluruhan sebesar 34,97 persen. Capaian ini menunjukkan upaya untuk mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar dengan intervensi program-program pengawasan tenaga kerja yang dilakukan pemerintah meningkat.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS Susenas	%			85,78	
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Kanwil KumHAM	komunikasi	7		17 kasus	
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap	Kanwil KumHAM	komunikasi	nihil	247	nihil	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
	perempuan.						
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kanwil KumHAM	Dokumen	0	0	nihil	
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	-	%	2,43	2,43		
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan	-	-	-	formal: 57,48 persen; informal: 15,35 persen; total: 34,97 persen	

### Tantangan dan pembelajaran

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan dalam mengatasi kesenjangan di Bali. Bali yang masih tergantung pada sektor pariwisata dan terkonsentrasi di Bali Selatan mengalami keterpurukan ketika tidak ada wisatawan yang berkunjung karena kebijakan pembatasan sosial dan *lockdown* di beberapa negara. Akibatnya, ketimpangan semakin meningkat karena sektor dan daerah yang menopang perekonomian Bali lumpuh dan berdampak pada sektor lainnya yang juga bertumpu pada sektor pariwisata. Kebijakan pemerataan di daerah lainnya di Bali harus ditingkatkan dengan menggali potensi-potensi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkenalkan potensi-potensi daerah khususnya di wilayah pedesaan. Optimalisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur teknologi berbasis internet untuk

memperkenalkan potensi daerah ke dunia luar seperti industri manufaktur, dan pertanian yang berbasis adat dan kearifan lokal yang tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tapi juga meningkatkan penjualan akan hasil-hasil produksi pertanian dan industri sehingga dapat meningkatkan perekonomian di wilayah pedesaan dan mengurai pergerakan ekonomi tidak hanya dominan di satu wilayah.

### **Kebijakan dan Strategi**

Kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam mengatasi ketimpangan di Provinsi Bali sesuai dengan Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru misi pertama yaitu Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, dan Papan dalam Jumlah dan Kualitas yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali melalui Bantuan Sosial Pangan dan Bantuan Sosial Tunai bagi masyarakat yang berpendapatan 40% terbawah di Bali. Selain itu juga diberikan bantuan melalui Program Keluarga Harapan yang bersumber dari APBN.

### **Upaya Percepatan TPB/SDGs**


Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat pencapaian tujuan kesepuluh untuk mengurangi ketimpangan adalah dengan memberdayakan Desa dan Desa Adat dalam menggerakkan perekonomian Bali. Hal ini untuk meningkatkan perekonomian di tingkat Desa agar semakin maju dan mandiri sehingga tidak tertinggal dengan daerah perkotaan. Sejalan dengan misi keenam belas Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” yaitu Membangun dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai dengan Potensi Kab/Kota di Bali dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dalam Arti Luas. Untuk mewujudkan misi ini dilakukan dengan mengembangkan produk-produk lokal masyarakat Bali agar memiliki nilai tambah dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan menggandeng BUMDes yang ada di masing-masing Desa untuk memasarkan produk-produk tersebut.


### **Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan**




Capaian tujuan kesebelas di Provinsi Bali dapat dilihat dalam capaian-capaian pada indikator yang terdapat di RAD TPB/SDGs Provinsi Bali. Capaian indikator 11.1.1 (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 84,26 dari tahun 2022 sebesar 81,65 persen di tahun 2022, yang senantiasai menurun pada tahun 2021 sebesar 78,47 persen di mana angka ini menunjukkan tren positif dari tahun 2020 sebesar 77,05 persen. Indikator 11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan

yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP) diantaranya Sarbagita (Denpasar mencakup 5 kecamatan; Badung mencakup 5 Kecamatan; Gianyar mencakup 4 kecamatan; Tabanan mencakup 2 kecamatan (data 2017). Indikator 11.2.1.(a) persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan pada tahun 2022 sebesar 0,01 persen. Provinsi Bali memiliki kawasan metropolitan di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) hal ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Perpres tersebut mengatur mengenai peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, cakupan, tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita. Selain itu, Perpres juga memuat Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, dan Indikasi Program Utama Lima Tahunan Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar mencakup 5 kecamatan; Badung mencakup 5 Kecamatan; Gianyar mencakup 4 kecamatan; Tabanan mencakup 2 kecamatan).

Dalam memitigasi bencana, Pemerintah berusaha untuk mengurangi jumlah korban dalam kejadian bencana. Indikator 11.5.1\* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 11 orang. Capaian indikator 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Bali sebesar 123,98 persen, pada tahun 2023 nilai IRBI belum dirilis. Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk (indikator 11.5.1.(b)) di Provinsi Bali pada tahun 2022 sebanyak 9 kota tangguh, hal ini menunjukkan seluruh Kabupaten/Kota di Bali telah memiliki kota tangguh bencana. Indikator 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan terdiri dari 9 Sirine TEWS (Tsunami), 6 Sirine EWS Gunung Api. Dari bencana yang terjadi di wilayah Bali, dampak kerugian ekonomi langsung akibat bencana berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali tahun 2023 (indikator 11.5.2.(a) tercatat sebesar 74.673.911.000, meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp 51.318.532.129.



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.							
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan	BPS	%	99,03	95,51	84,26	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
	terjangkau.						
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Disperkim; BASIS DATA PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN Kementerian PUPR	Kawasan Perkotaaan	Sarbagita (Denpasar mencakup 5 kecamatan; Badung mencakup 5 Kecamatan; Gianyar mencakup 4 kecamatan; Tabanan mencakup 2 kecamatan (data 2017)	-	Sarbagita (Denpasar mencakup 5 kecamatan; Badung mencakup 5 Kecamatan; Gianyar mencakup 4 kecamatan; Tabanan mencakup 2 kecamatan (data 2017)	
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Disperkim	Kota	-	-	N/A	
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan, untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.							
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	BPS	%	60		N/A	
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas PUPR	5	5		N/A	
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							


Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per100.000 orang.	BPBD	orang	meninggal 19 orang luka berat 19 orang luka ringan 15 orang		11	
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	%	14,98		Nilai IRBI 2023 belum keluar, belum bisa dihitung	
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD (Kabupaten/Kota)	Kota Tangguh	3 kota tangguh: Denpasar, Karangasem, Badung		9	
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	Menara TEWS + Peta Evakuasi	9 Menara TEWS + 2 pendeteksi gerakan tanah		Provinsi Bali memiliki 9 Sirine Peringatan Dini Tsunami dan 6 Sirine Peringatan Dini Erupsi Gapi Agung	
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rp.	2.494.000.000		74.673.911.000	

Untuk meningkatkan kesiapan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, maka setiap daerah harus sudah menentukan perencanaan dalam menghadapi bencana baik bencana alam maupun bencana non alam yang disebabkan oleh wabah penyakit yang berpotensi menjadi pandemi. Perencanaan mitigasi bencana ini dapat disusun melalui dokumen rencana kontijensi, dokumen perencanaan resiko bencana. Dampak dari pembangunan perkotaan tidak terlepas dari limbah konsumsi penduduk yaitu sampah. Untuk mengurangi dampak lingkungan tersebut maka sampah sisa konsumsi masyarakat perkotaan maupun pariwisata harus tertangani dengan baik. Indikator 11.6.1.(a) persentase sampah perkotaan yang tertangani pada tahun 2023

sedikit mengalami penurunan menjadi 77,78 persen pada tahun 2023 yang diakibatkan terjadinya kebakaran pada TPA Suwung, dari tahun 2022 sebesar 85,86 persen. Indikator 11.b.1\* menunjukkan pada tahun 2023 9 Kabupaten/Kota di Bali telah 100 persen memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana. Dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah telah menyiapkan 1 draft RPB (indikator 11.b.2\*).

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas LHK	-	-		77,78	
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas PUPR	-	-			
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka							
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas PU & Penataan Ruang, DLH	%				
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS	-	-			
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimple-mentasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>							
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	Dokumen	3		9 Kab/Kota	



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target (2023)	Capaian (2023)	Status
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	4		1 Draft RPB	

### Tantangan dan Pembelajaran

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Provinsi Bali pada bulan September 2020 sebanyak 4,32 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Bali mengalami penambahan sekitar 426,65 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 42,66 ribu setiap tahun. Dengan luas daratan Provinsi Bali sebesar 5.780,06 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Bali sebanyak 747 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2000 yang mencatat kepadatan penduduk Bali sebanyak 544 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2010 yang mencapai 673 jiwa per kilometer persegi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), rata-rata laju pertumbuhan penduduk Bali sebesar 1,01 persen per tahun. Terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13 poin jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 2,14 persen per tahun. Berdasarkan data ini kebutuhan akan perumahan tinggal bagi masyarakat Bali yang tinggi serta potensi meningkatnya kemacetan di kawasan perkotaan. Perlunya upaya dalam meningkatkan sarana transportasi dan infrastruktur jalan untuk mengurai kemacetan yang semakin tinggi serta tata ruang yang baik dalam penataan perumahan yang merata di setiap wilayah agar kepadatan penduduk tidak menumpuk hanya di beberapa wilayah saja serta peningkatan sarana penunjang layanan masyarakat seperti sarana pendidikan dan layanan kesehatan. Kesiapsiagaan antar resiko bencana juga menjadi tantangan bagi Provinsi Bali. Bali yang memiliki dua gunung api aktif dan pantai dengan gelombang ombak yang cukup tinggi pada kondisi tertentu memiliki resiko terjadi bencana alam. Kemudian, tantangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak dan terjangkau masih menghadapi kendala. Masih terbatasnya akses pembiayaan perumahan terutama pada kelompok berpenghasilan rendah serta penghasilan tidak tetap menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan. Paradigma masyarakat masih belum merata secara menyeluruh dalam memilah sampah rumah tangga sebelum dibawa ke pembuangan sementara maupun akhir. Sehingga program-program pemilahan sampah perkotaan.

### **Kebijakan dan Strategi**




Dalam menciptakan kota yang tangguh dan tanggap bencana, kebijakan dan strategi yang dilakukan Provinsi Bali melalui Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran menghadapi ancaman bencana serta mengurangi risiko bencana. Program ini didukung dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman kebencanaan kepada masyarakat untuk tanggap dan mampu menghadapi bencana sebelum bantuan dari pemerintah datang. Kemudian, Program Penanganan Darurat Bencana, Peralatan, dan Logistik Kebencanaan untuk mewujudkan penanganan keadaan darurat kebencanaan pasca bencana dan merespon kejadian darurat bencana secara cepat terkait ketersediaan kebutuhan dasar dan peralatan. Pemerintah Provinsi Bali juga terus meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber di tingkat banjar/lingkungan. Sehingga, sampah terpilah dapat dengan cepat tertangani dan tidak menimbulkan timbunan tinggi.

### **Upaya Percepatan TPB/SDGs**

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam mencapai tujuan kesebelas diantaranya dengan membangun infrastruktur jalan yang dilakukan dengan pembangunan *shortcut* Denpasar-Singaraja. Kemudian, Pemerintah Provinsi Bali juga melaksanakan proyek infrastruktur di sepanjang tahun 2020-2024 di antaranya jalan tol Gilimanuk-Denpasar, pembangunan jaringan air minum dan pengelolaan sampah. Sarana transportasi sebagai alternatif untuk mengurangi kemacetan bersama dengan Kementerian Perhubungan telah meluncurkan Bus Transportasi Umum “Trans Dewata” yang telah ditingkatkan layanannya agar masyarakat tidak menunggu lama Bus yang datang dan diharapkan meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan sarana transportasi umum. Upaya percepatan dalam memitigasi bencana juga dilakukan dengan merealisasikan kegiatan-kegiatan yang tertunda akibat Covid-19 dengan melaksanakan penyamaan persepsi dan memperkuat koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pengurangan risiko bencana, pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, sekolah aman bencana, dan peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana untuk menambah relawan terlatih dan berkapasitas kebencanaan untuk terlibat aktif dalam penanggulangan bencana secara sukarela penuh tanggung jawab membantu dan bekerjasama, terkoordinasi, terarah, efektif dan efisien dalam rangka pengurangan risiko bencana.

## Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab

Target 12.4 menargetkan pada tahun 2030 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dalam upaya meningkatkan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab khususnya bagi perusahaan-perusahaan di Bali telah dilakukan evaluasi dan pemberian penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang mentaati melalui Proper. Capaian indikator 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU sebanyak 11 perusahaan. Indikator 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 35.968,42 ton. Kemudian, capaian indikator 12.5.1.(a) Timbunan sampah yang didaur ulang pada Tahun 2023 sebanyak 149.610,08 lebih banyak dari tahun 2022 sebanyak 93.512,89 di mana Provinsi Bali lebih siap dalam mengelola sampah dengan kuota yang lebih besar.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target 2023	Capaian Tahun 2023	Status
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	DLH	Peserta Proper	19	25	11	
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	Ton	15000	19000	35.968,42	
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	DLH	Ton	101,33	149,5	149.610,08	
Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.							
12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	DLHK		-		N/A	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target 2023	Capaian Tahun 2023	Status
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DLH	-	-		N/A	

### Tantangan dan Pembelajaran

Sampah masih menjadi polemik di Bali. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berdampak pada segala bidang, baik pariwisata, kesehatan dan lingkungan. Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan sampah dari sumber. Dengan adanya regulasi ini diharapkan agar sampah dapat dikelola dan dipilah sebelum ke tempat pembuangan akhir untuk mempercepat proses daur ulang sampah yang tidak bisa terurai. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan sampah diarahkan berbasis di Desa/Desa Adat. Belum adanya persepsi sama dalam hal kewenangan, keterbatasan lahan tempat pengelolaan sementara (TPS), keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan alat, keterbatasan jejaring, dan belum adanya perarem desa adat, adalah enam permasalahan mendasar pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber di desa/desa adat. Tidak semua desa/desa adat memiliki lahan untuk TPS-3M. Ketersediaan lahan merupakan syarat utama dari pengelolaan sampah berbasis sumber.

### Kebijakan dan Strategi

Dalam menangani permasalahan dan isu strategis terkait lingkungan dilakukan dengan pelaksanaan program/kegiatan untuk menangani perubahan-perubahan kondisi lingkungan yang cenderung memburuk. Dalam mengarusutamakan kebijakan dan kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan kapasitas penyerapan GRK ke dalam perencanaan pembangunan daerah Bali yang berkelanjutan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, maka dilaksanakan kegiatan inventarisasi GRK yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca. Dalam upaya pengelolaan sampah yang menjadi permasalahan besar dalam isu lingkungan dilakukan dalam Program Peningkatan Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengurangi sampah


rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Di dalam program tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan Pengendalian Pencemaran Limbah B3 yang bertujuan untuk mengetahui jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola di Provinsi Bali dan memberikan pembinaan kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tata kelola limbah B3.



### Upaya Percepatan TPB/SDGs

Untuk mempercepat pencapaian tujuan kedua belas, dalam pengelolaan sampah Pemerintah Provinsi Bali memberdayakan Desa dan Desa Adat dalam menjalankan Peraturan Gubernur Bali No 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan menyiapkan sarana pengelolaan sampah di setiap wilayah di Bali serta menyiapkan Pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa dan Desa Adat agar masyarakat dapat memilah sampah organik dan non organik dari rumah sehingga memudahkan dalam mengelola sampah yang dapat didaur ulang.

### Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani perubahan iklim, terutama dalam memitigasi bencana alam yang terjadi tidak terduga-duga yang ditunjukkan dengan capaian indikator 13.1.1\*, Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah Bali tersedia pada Tahun 2023 sebanyak satu dokumen. Indikator 13.1.2\* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang berdasarkan data dari BPBD Provinsi Bali pada tahun 2022 tercatat korban meninggal sejumlah 11 jiwa, dan luka berat sebanyak 14 orang. Indikator 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target 2023	Capaian Tahun 2023	Status
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.							
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	6		1	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target 2023	Capaian Tahun 2023	Status
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	meninggal 19 orang luka berat 19 orang luka ringan 15 orang		11	
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.							
13.2.1*	Dokumen <i>Biennial Update Report (BUR) Indonesia</i> .	DLH	-	1			
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH	-	1	-	1	

### Tantangan dan Pembelajaran

Perubahan iklim merupakan isu tingkat global yang dapat menjadi ancaman khususnya bagi Bali. Potensi bencana yang terjadi karena perubahan iklim dapat meningkat dengan perubahan kondisi yang ekstrim. Upaya yang dilakukan Provinsi Bali dalam menekan perubahan iklim adalah dengan ditanda tangannya nota kesepahaman tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (RPKB) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama-sama dengan Provinsi Riau. Oleh karena itu, upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca akan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dan akan dilaksanakan secara seimbang dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Sejalan dengan hal tersebut maka nantinya tidak akan ada kesenjangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Berbagai strategi yang dilakukan dalam pembangunan rendah karbon ini di antaranya berupa pembangunan energy berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengembangan industri hijau.

### Kebijakan dan Strategi

Upaya yang dilakukan Provinsi Bali dalam menekan perubahan iklim adalah dengan ditanda tangannya nota kesepahaman tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (RPKB) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama-sama dengan Provinsi Riau. Oleh karena itu, upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca



akan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dan akan dilaksanakan secara seimbang dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Sejalan dengan hal tersebut maka nantinya tidak akan ada kesenjangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Berbagai strategi yang akan dilakukan dalam pembangunan rendah karbon ini di antaranya berupa pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengembangan industri hijau untuk kawasan pesisir laut. Belum disahkannya Peraturan Daerah RZWP-3-K menjadi hambatan dalam pemberian izin lokasi dan belum bisa memberikan rekomendasi sebagai kelengkapan izin usaha.

### Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs



Upaya untuk mempercepat pencapaian dalam menangani perubahan iklim yang pesat adalah dengan menindaklanjuti nota kesepahaman tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (RPKB) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama-sama dengan Provinsi Riau. Upaya lanjutan yang akan dilakukan dengan merancang Rencana Aksi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

### Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Menjaga ekosistem laut menjadi salah satu bagian dari visi misi pembangunan daerah Provinsi Bali. Capaian indikator 14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional di Provinsi Bali sebanyak satu dokumen. Berdasarkan data tahun 2022 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang dikelola secara berkelanjutan di Bali sebanyak dua wilayah (indikator 14.2.1.(b)).

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target 2022	Capaian 2022	Status
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.							
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Dinas Kelautan & Perikanan	Dokumen Perencanaan WP3K	1	1	1	
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Dinas Kelautan & Perikanan	-	2		2	



Dalam menjaga ekosistem lautan yang berkelanjutan, upaya dalam menjaga praktek illegal penangkapan hasil laut juga ditegakkan oleh pemerintah bersama-sama dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang aktif dalam menjaga pelestarian biota laut Bali. Indikator 14.4.1\* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman menunjukkan pada tahun 2022 sebanyak 95.156 ton, dari tahun 2021 sebanyak 100.755,76 ton hasil tangkapan ikan berada dalam batasan aman secara biologis. Kemudian kawasan konservasi perairan di Bali yang terus dijaga pada tahun 2022 sebanyak 1 kawasan.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target 2022	Capaian 2022	Status
14.4 Pada Tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya							
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ton	109,331.82	105,166.51	95,156.00	
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.							
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Dinas Kelautan & Perikanan; BPS	Ha	20,057	4	1	

Penegakkan hukum dalam menjaga laut dari praktik-praktik illegal tergambar dalam indikator-indikator pada target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan, tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the *World Trade Organization* indikator 14.6.1.(a) persentase kepatuhan pelaku usaha berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pada tahun 2021 sebesar 100 persen. Indikator 14.b.1.(a) jumlah kabupaten dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan pada tahun 2022 sebanyak 2 Kabupaten. Sedangkan indikator 14.b.1.(b) jumlah nelayan yang



terlindungi tidak lagi masuk dalam penganggaran pemerintah karena nelayan telah memiliki asuransi mandiri.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target 2022	Capaian 2022	Status
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization</i> .							
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	250 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)		100%	
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil ( <i>small-scale artisanal fishers</i> ) terhadap sumber daya laut dan pasar.							
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Regulasi/ Kebijakan/ Kelembagaan	4		N/A	
14.b.1.(a)	Jumlah kabupaten dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	kabupaten/kota	0		2 Kabupaten	
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	5200		Anggaran sudah dipotong, nelayan memiliki asuransi mandiri	

### Tantangan dan Pembelajaran

Kawasan perairan di wilayah Bali menghadapi tantangan sampah dan pencemaran air. Sampah-sampah sisa kemasan makanan dan plastik yang berada di laut dapat mengancam ekosistem lautan karena bisa termakan oleh hewan-hewan yang berada di laut. Selain itu, sampah yang terbawa hingga ke pesisir pantai disamping dapat

mencemari lingkungan juga mengurangi kebersihan dan keindahan kawasan pantai di Bali hingga dapat mengurangi daya tarik wisata di Bali. Masih minimnya kepedulian penangkap ikan dan pelaku usaha atas regulasi-regulasi yang berlaku juga menjadi tantangan dalam menjaga ekosistem lautan yang berkelanjutan. Masih ditemukan nelayan-nelayan yang melakukan aktifitas penangkapan ikan di daerah konservasi perairan. Oleh karena itu, diperlukan adanya komitmen bersama dari semua pihak baik Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menjaga kawasan perairan di Wilayah Bali.

### **Kebijakan dan Strategi**

Kebijakan pengelolaan ekosistem lautan dilakukan dengan berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Untuk menjaga dan mengembangkan kawasan konservasi perairan di wilayah Bali dilaksanakan program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dengan kegiatan Konservasi dan rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, berupa penanaman terumbu karang sebanyak 2 (dua) paket di dua Kawasan yaitu di kawasan Tulamben dan Amed yang bertujuan untuk merehabilitasi karang di kawasan perairan di dua lokasi tersebut. Kegiatan ini selain menambah keindahan dasar laut untuk memberikan nilai tambah ekonomi, juga menjadi tempat berlindung dan mencari makan bagi ikan dan tempat berkumpulnya ikan. Strategi yang dilakukan dalam menjaga wilayah perairan di Bali adalah dengan melakukan patroli dengan bekerjasama dengan beberapa LSM dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran penangkapan ikan di kawasan perairan untuk menjaga keberlanjutan dari ekosistem lautan. Selain itu pencegahan penggunaan alat tangkap yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam regulasi yang berlaku juga dilakukan. Selain pengawasan terhadap pelanggaran penangkapan ikan baik di kawasan konservasi maupun non konservasi, upaya menjaga keberlanjutan ekosistem lautan juga dilakukan dengan membersihkan sampah di pantai dan laut baik dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah.


### **Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs**



Dalam melaksanakan upaya pencapaian tujuan kelima belas masih terbentur dengan kurangnya regulasi yang mendukung. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menyusun regulasi-regulasi pendukung untuk menjaga dan meningkatkan keberlanjutan ekosistem lautan. Provinsi Bali telah memiliki 3 (tiga) dokumen terkait Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan untuk tiga kawasan yaitu perairan Buleleng, Karangasem, dan Nusa Penida. Sehingga memperjelas kawasan konservasi dan perikanan tangkap agar keberlanjutan ekosistem biota laut dapat terjaga. Kedepan akan ditingkatkan penetapan kawasan konservasi di daerah lainnya di Bali. Selain itu, Pemerintah berupaya dalam

mempercepat finalisasi Dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2020-2040.

### Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Provinsi Bali senantiasa berupaya dalam menjaga keberlangsungan ekosistem daratan dan menjaga keasrian Bali. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali seluas 132.528,23 Ha. Indikator 15.1.1.(a) proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2023 sebesar 27,4 persen. Untuk menjaga ekosistem daratan di Provinsi Bali juga memiliki sebanyak 5 (lima) kesatuan pengelolaan hutan yang dimiliki Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang terdiri dari 4 UPTD PKH dan 1 Tahura (Indikator 15.2.1.(d)). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan sebesar 2.340 Ha pada tahun 2023 (Indikator 15.3.1.(a)). Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara illegal terus ditingkatkan melalui berbagai program Pemerintah Daerah maupun pihak pemerintah yang aktif dalam kegiatan lingkungan hidup Indikator 15.7.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kasus.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target 2023	Capaian Tahun 2023	Status
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	DKLH	%	23,51		27,4	
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.							
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.	DKLH	-	-		-	
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	DKLH	-	-		-	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target 2023	Capaian Tahun 2023	Status
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	DKLH	-	-		-	
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	DKLH	-	4 UPT KPH		4 UPT KPH	
		DKLH		1 Tahura		1 Tahura	
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.							
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	DKLH	Ha	8.337		2.340	
Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.							
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	P3E Bali-Nusra	-	-		-	
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.							
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	DKLH	%	2 (P21) untuk kehutanan			
15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.	DKLH	-	-		-	

### Tantangan dan Pembelajaran

Meningkatnya pembangunan secara masif menjadi tantangan bagi Provinsi Bali dalam menjaga keberlangsungan ekosistem daratan. Jumlah Ruang Terbuka Hijau karena

masifnya pembangunan semakin berkurang setiap tahunnya. Diperlukan komitmen dari setiap pihak dalam menjaga keberlangsungan ekosistem daratan dan menjaga ketersediaan Ruang Terbuka Hijau. Dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur di Bali yang mengharuskan membuka lahan di kawasan hutan menjadi tantangan besar dalam menjaga ekosistem daratan di Bali. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan kawasan hijau di daratan Bali. Masih perlunya rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah UPTD KPH se-Bali. Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem kehidupan tetap terjaga. Peredaran flora dan fauna belum optimal karena rendahnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang konservasi serta belum optimalnya pengelolaan hutan. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi tantangan dalam menjaga ekosistem daratan. Persepsi yang berbeda dalam terhadap pengelolaan hutan dan masih tingginya gangguan keamanan hutan terutama kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan dan penebangan liar (*illegal logging*). Masih banyaknya permasalahan tata batas, pemanfaatan potensi sumber daya hutan belum optimal karena belum tersedianya *data base* yang akurat. Tertib tata usaha kayu pada industri hasil hutan belum optimal karena rendahnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang tata usaha kayu, pembinaan dan pengawasan penangkaran/lembaga konservasi. Perlu dilakukan upaya peningkatan rehabilitasi kawasan kritis sebagai kawasan ekosistem daratan di Bali untuk menjaga keanekaragaman hayati dan hasil hutan sebagai bahan baku produksi. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan Pemerintah Provinsi Bali harus melaksanakan realokasi anggaran agar difokuskan ke dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 yang juga merupakan tantangan besar bagi Pemerintah dalam melaksanakan program-program untuk meningkatkan kualitas ekosistem daratan di Provinsi Bali.

### **Kebijakan dan Strategi**

Kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam memenuhi capaian tujuan kelima belas TPB/SDGs dilakukan melalui program-program yang mendukung capaian tersebut. Dalam upaya mengurangi lahan kritis di dalam hutan dan luar hutan dilakukan melalui Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial. Upaya untuk menurunkan kerusakan kawasan hutan dilakukan melalui Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Wana Kerthi.



### Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” terkandung konsep *Wana Kerthi* yang merupakan upaya untuk melestarikan hutan. Upaya percepatan pencapaian tujuan kelima belas Pemerintah Provinsi Bali dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun peta jalan (*road map*) program penghijauan di sejumlah kawasan di Bali. Baik berupa penanaman hutan baru, taman maupun pemanfaatan lahan tidak produktif, seperti di pinggir-pinggir jalan. Selain *roadmap* tersebut, juga didukung dengan rencana pelaksanaan program-program untuk meningkatkan kualitas ekosistem daratan seperti Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial; Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai *Wana Kerthi*, dan Program-program dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan perhutanan yang dilaksanakan oleh UPTD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup provinsi Bali yang mengelola kawasan hutan di Bali.




### Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Pemerintah Provinsi Bali dalam menegakkan hukum dan meningkatkan tata kelola yang baik melakukan berbagai langkah-langkah strategi dalam mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Menurut catatan Polda Bali, sepanjang tahun 2021 untuk indikator 16.1.1.(a) jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir sampai dengan semester I Tahun 2023 sebanyak 8 kasus. Upaya dalam menjaga perdamaian dari konflik antar kelompok atau perorangan juga dilaksanakan dengan berbagai program baik dari pemerintah dan non pemerintah. Indikator 16.1.2 (a) kematian disebabkan konflik tidak ada kejadian pembunuhan yang dilaporkan menunjukkan tidak ada kasus yang terjadi sepanjang tahun 2023. Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 743 orang. Berdasarkan data-data tersebut maka perlu ditingkatkan upaya-upaya pencegahan tindak pidana kejahatan tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target 2023	Capaian (2023)	Status
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							
16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	POLDA	Orang	2			
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada	POLDA	Orang	1		8	▼

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target 2023	Capaian (2023)	Status
	satu tahun terakhir.						
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	POLDA	Orang	0		0	
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POLDA	%	L : 1362 S : 951		743	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS	%	-		N/A	

Pencapaian target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak juga menunjukkan peningkatan capaian indikator 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir terdiri dari 30,06 persen Perempuan dan 28,51 persen laki-laki. Dari capaian tersebut, meskipun tergolong rendah, namun anak-anak Perempuan yang mendapat hukuman fisik dan psikis masih menunjukkan adanya kesenjangan gender. Sebagaimana pada capaian Indikator 16.2.1.(b) prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan sebesar 52,05 persen Perempuan dan 41,00 persen laki-laki. Kasus ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 41,05 persen untuk Perempuan dan 34 persen laki-laki. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun pada tahun 2023 sebesar 42,01 persen untuk perempuan dan 39,41 persen untuk laki-laki.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target 2023	Capaian (2023)	Status
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.							
16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	DP3A, Kanwil KumHAM	-	0		N/A	
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS	-	0		30.06 Perempuan dan 28.51 Laki-Laki	
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinsos P3A	%	0,0192%		52.05 Perempuan dan 41.00 Laki-laki	
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Dinsos P3A	-	0		42.01 Perempuan dan 39.41 Laki-laki	





Pencapaian target 16.3 menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua menunjukkan peningkatan pencapaian. Indikator 16.3.1.(a) proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi pada tahun 2022 sebesar 57,55 persen. Indikator 16.3.1.(b) jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi pada Tahun 2023 yaitu 124 orang untuk litigasi dan 50 orang untuk non litigasi. Indikator 16.3.2.(a) proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023 menjadi 1,42 persen.




Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target 2023	Capaian (2023)	Status
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.							
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS	-	-			
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Biro Hukum & HAM (Kanwil KumHAM)	Orang	58		Litigasi sebanyak 124 Orang Non Litigasi sebanyak 50 Kegiatan	
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Biro Hukum & HAM (Pengadilan Tinggi)	-	-		0	
16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	Biro Hukum & HAM (Kanwil KumHAM)	%	0		N/A	
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Biro Hukum & HAM (Kanwil KumHAM)	%	0		1,42	






Dalam menciptakan kelembagaan yang tangguh dan transparan Pemerintah Daerah di Bali baik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen dalam melaksanakan program/kegiatan dan penyerapan anggaran yang bersih dan tertib administrasi. Indikator 16.6.1\* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui tahun 2023 sebesar 83,37 persen (*unaudited*) di mana angka ini masih dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan RI. Angka ini menurun dari realisasi tahun 2022 sebesar 89,49 persen (*audited*) dalam rangka kebijakan anggaran. Indikator

16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) secara 6 tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas laporan keuangannya sampai tahun 2022, untuk tahun 2023 masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Indikator 16.6.1.(b) Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan nilai 75. Indikator 16.6.1.(c) persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan telah mencapai 100 persen.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target 2023	Capaian (2023)	Status
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD	%	89,49 (audited)		83,37 (unaudited)	
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPK RI	%	100		100	
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi	%	77,05		75	
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro APBJ	%	40		100	



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target 2023	Capaian (2023)	Status
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi	%	66		N/A	
16.6.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Biro Organisasi	-	75		N/A	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi	Kategori	hijau		N/A	

Dalam meningkatkan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan sesuai target 16.7, capaian tersebut terlihat pada indikator 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Tahun 2023 sebesar 16,36 persen. Indikator 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) per Semester I Tahun 2023 adalah 0,013 persen. Untuk itu, peningkatan kabalitas bagi perempuan di lingkungan Pemerintah Daerah harus ditingkatkan agar kesempatan dalam menjadi pengambil keputusan dapat diraih oleh pegawai perempuan. Indikator 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi tahun 2023 sebesar 79,83 persen, indeks kebebasan sipil (indikator 16.7.2.(b) sebesar 83,9 persen, dan indeks hak-hak politik (indikator 16.7.2.(c) sebesar 85,78 persen.


Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target 2023	Capaian (2023)	Status
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.	BKD	Pejabat Pemprov Bali	-			
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinsos P3A	%	32 (dari 405) / 7,9%		16,36	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinsos P3A	%	14,58%		0,0013%	
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS	%	89,55		79,83	
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS	%	94,72		83,9	
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS	%	68,08		85,78	



Untuk meningkatkan layanan publik, dengan meningkatkan catatan kependudukan bagi semua sesuai target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran, Capaian target ini menunjukkan peningkatan dari capaian tahun sebelumnya. Indikator 16.9.1\* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur meningkat pada tahun 2023 sebesar 99,33 persen dari tahun 2022 sebesar 88,42 persen.

Persentase anak yang memiliki akta kelahiran meningkat pada Tahun 2023 sebesar 97,56 persen dari tahun 2022 sebesar 91,50 persen.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target 2023	Capaian Tahun 2023	Status
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS	%	77,33%		99,33%	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	BPS	%	86,66%			
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dispmd dukcapil	%	77,05%		97,56 %	

Pemerintah juga senantiasa meningkatkan layanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia. Indikator 16.10.1.(a) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebanyak 17 kasus dari tahun 2022 sebanyak 9 kasus. Indikator 16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan sampai dengan tahun 2023 sebanyak 172 kasus. Capaian Indikator 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional pada Tahun 2023 adalah nihil.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target 2023	Capaian Tahun 2023	Status
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Biro Hukum & HAM, Kanwil KumHAM	Kasus	11		17 kasus	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target 2023	Capaian Tahun 2023	Status
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	DP3A, Kanwil KumHAM	Kasus	2		172	
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Diskominfo	-	100			
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi non litigasi.	Diskominfo	%	100			
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo	-	-			
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakanyang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DP3A, POLDA, Kanwil KumHAM	Kebijakan	0		nihil	

### **Tantangan dan Pembelajaran**

Tantangan dalam mempertahankan tingkat akuntabilitas dan kualitas kinerja Pemerintahan yang diindikasikan dengan mempertahankan capaian opini WTP dan SAKIP bertumpu pada komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan agar berjalan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pencapaian peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif pada posisi manajerial menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan tata kelola dari isu kesetaraan gender. Isu radikalisme dan terorisme juga masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Bali.

### **Kebijakan dan Strategi**

Dalam meningkatkan capaian Indeks Demokrasi di Provinsi Bali didukung dengan Program Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat yang didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Partai Politik dan Aparatur Pemerintahan serta kegiatan Penguatan Demokrasi Lokal dalam Meningkatkan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Untuk menegakkan hukum dan ketenteraman di wilayah Bali Pemerintah Provinsi Bali khususnya terus melaksanakan upaya koordinasi dengan lembaga kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan di wilayah Bali dan penanganan kasus-kasus hukum. Selain upaya dalam koordinasi juga didukung dengan Program Sistem Keamanan Terpadu dengan melaksanakan kegiatan pemantauan orang asing, pemantauan dan penanganan konflik sosial, serta kegiatan kewaspadaan dini daerah.

### **Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs**

Upaya yang dilakukan dalam mempercepat pencapaian tujuan keenam belas dan tantangan-tantangan yang dihadapi diantaranya adalah dengan memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah. Kemudian, Pemerintah Provinsi Bali juga terus melaksanakan koordinasi intelijen daerah secara insentif, koordinasi aparat keamanan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan dan mempercepat pencapaian tujuan keenam belas adalah dengan membuat inovasi wadah aspirasi untuk demokrasi, dalam rangka menyalurkan opini sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Peran partai politik dan lembaga pendidikan sangat strategis dalam pengembangan etika serta budaya politik di Bali khususnya bagi generasi muda.


### **Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan**

Untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs dan memaksimalkan setiap potensi dalam mewujudkan tujuan agar tidak ada seorang pun yang tertinggal, maka diperlukan




kerjasama yang tidak hanya melibatkan Pemerintah, namun juga pihak non pemerintah dari unsur dunia usaha, akademisi, dan lembaga sosial masyarakat. Target 17.1 menargetkan untuk memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Indikator 17.1.1\* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya pada Tahun 2022 sebesar Rp 6.768.699.676.073,02 (*unaudited*). Indikator 17.1.1.(a) rasio penerimaan pajak terhadap PDRB sebesar 4,19 persen (Triwulan III) pada tahun 2023, meningkat dari tahun 2022 sebesar 2,27 persen. Pendapatan Daerah Bali mulai mengalami peningkatan seiring dengan mulai membaiknya masyarakat dan kebijakan penghapusan denda tunggakan pajak untuk meningkatkan pembayaran pajak oleh masyarakat, setelah mengalami penurunan karena kemampuan ekonomi masyarakat yang menurun akibat usaha yang terhambat dan banyaknya pekerjaan yang mengalami pemotongan upah dan dirumahkan karena perusahaan tempat bekerja yang harus berhenti beroperasi selama Pandemi Covid-19.


Teknologi informasi juga telah membuka kesempatan yang luas bagi komunikasi data. Kebutuhan ketersediaan data yang dapat diandalkan dan dipercaya merupakan basis penting untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Bali. Proporsi individu yang menggunakan internet tercatat sebanyak 73,74 persen. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada tahun tercatat ada satu proyek (indikator 17.11.1.(a)).

Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. Capaian target ini menunjukkan peningkatan di tahun 2021 sebagaimana tergambar pada indikator 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*) pada Semester I tahun 2023 sebesar 100 persen.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	Capaian Tahun 2023	Status
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pendapatan Daerah	Rp		6.768.699.676.073,02 ( <i>unaudited</i> )	



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	Capaian Tahun 2023	Status
					4.623.648.906.938,02 (unaudited)	
					4.048.571.031.769 (unaudited)	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pendapatan Daerah	Rp		4,19	
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/ Kota (IKK).	Diskomin fos	%		N/A	
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.						
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS, Diskomin fos	%		73,34	
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.						
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	-		N/A	
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.						
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro Pemerintahan & Otda	-		1	
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	Capaian Tahun 2023	Status
geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.						
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS Survey Kebutuhan Data	%		N/A	
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS Survey Kebutuhan Data	-		N/A	
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	-		N/A	
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/ Lembaga.	BPS	persen			
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	BPS	-			
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian ( <i>Vital Statistics Register</i> )	Disdukcapil & KB, BPS	%		100	
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	orang			

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	Capaian Tahun 2023	Status
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS Survei Kebutuhan Data	%			
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS Survei Kebutuhan Data	%			

### Tantangan dan Pembelajaran

Provinsi Bali tidak memiliki sumber daya seperti pertambangan sebagai salah satu sektor perekonomian potensial dan hanya mengandalkan alam sebagai penunjang sektor pariwisata, pertanian, serta industri kecil dan menengah. Meskipun sumber pendapatan pariwisata dan Pajak Kendaraan Bermotor tergolong tinggi, namun masih banyak program pembangunan yang belum maksimal dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Bali perlu menjelajahi potensi-potensi pembiayaan pembangunan yang tidak hanya berasal dari APBN atau APBD, namun juga dari Pembiayaan yang diberikan dari sektor non pemerintah. Sejalan dengan kemajuan pembangunan yang dicapai, pembiayaan pembangunan selalu menjadi tantangan bagi daerah. Sumber-sumber domestik sudah barang tentu harus dimobilisasi di luar pajak antara lain dengan pendanaan yang inovatif tetapi sumber-sumber eksternal juga perlu dioptimalisasi. Pada saat yang sama, kombinasi utang pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi tantangan besar daerah dalam mengelola defisit anggaran belanja daerah. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Bali banyak yang belum tersalurkan dengan tepat sasaran karena perusahaan banyak yang bingung ke mana harus menyalurkan dana TJSL-nya. Pemerintah dalam hal ini perlu melakukan pemetaan atas isu-isu strategis dan lokus pembangunan yang dapat dibiayai dari TJSL KPBU, pembiayaan dari filantropi, dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

### Kebijakan dan Strategi

Meskipun pandemi Covid-19 sedang melanda dunia termasuk Bali, namun dengan pesatnya kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi diharapkan dapat memudahkan dalam menyusun kebijakan dan inovasi dalam meningkatkan

penerimaan daerah. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan mengarahkan kepada masyarakat selaku wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya melalui pembayaran pajak secara *online*. Pemerintah Provinsi Bali juga telah mengeluarkan kebijakan penghapusan denda atas samsat dan pembebasan bea balik nama yang diatur dalam Peraturan Gubernur. Selain meningkatkan penerimaan pajak sebagai pendapatan asli daerah Bali, Pemerintah Provinsi Bali juga mengupayakan sumber pendanaan dari pihak non pemerintah dari berbagai pelaku usaha dan industri yang di Bali khususnya dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana pendukung pengendalian Covid-19. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka memulihkan perekonomian Bali juga ditingkatkan dengan melakukan pameran UMKM dan hasil produk industri asli Bali, dengan memperkenalkan sistem pembayaran dengan aplikasi QRIS bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam rangka implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk transaksi pembayaran non-tunai. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Bali agar menggunakan transaksi yang aman dan bersih untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Sebagai salah satu strategi promosi produk budaya lokal Bali dalam kancah dunia yang bermanfaat secara ekonomi dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali dengan tetap melestarikan warisan budaya, serta langkah nyata dari visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

### **Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs**

Dalam upaya percepatan pencapaian tujuan ketujuh belas Pemerintah Provinsi Bali dalam tahapan memetakan potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan dan didanai dengan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari para pelaku usaha dan industri yang ada di Bali sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah untuk mempercepat tercapainya prioritas daerah dan nasional di Bali. Upaya pelibatan pihak non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan dan menginventarisir isu-isu strategis daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari level Desa hingga ke level Provinsi. Terobosan yang dilakukan juga dengan meningkatkan platform digital dalam transaksi keuangan dan kerjasama lainnya yang mendukung pembangunan daerah. Untuk mempercepat target-target yang sangat besar ini Pemerintah harus bekerjasama dengan pihak non pemerintah baik pelaku usaha, masyarakat dan akademisi dalam meningkatkan inisiatif dan praktik-praktik baik pencapaian TPB/SDGs.

### 3.2 Kendala dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil tinjauan atas capaian 17 (tujuh belas) tujuan TPB SDGs di atas terdapat indikator-indikator yang telah tercapai, mengalami penurunan namun mulai menunjukkan kondisi untuk kembali membaik, serta indikator-indikator yang cenderung menurun dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Atas beberapa permasalahan dan percepatan penyelesaian atas permasalahan-permasalahan yang menghambat tercapainya target-target yang telah ditetapkan perlu diinventarisasi permasalahan-permasalahan dan rencana tindak lanjut untuk mencapai percepatan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana
	Kategori	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Tujuan Kesatu (Tanpa kemiskinan)	Data	Kriteria pendataan penduduk yang bekerja pada sektor informal masih belum bisa mengukur pendapatan masyarakat, sehingga terjadi informasi yang bias, hal ini menyebabkan pengukuran indikator penduduk miskin belum akurat.	Pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan Peningkatan cakupan Program Keluarga Harapan serta Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali; Bappeda Provinsi Bali
Tujuan Kedua (Tanpa Kelaparan)	Sumber Daya Manusia	Perlunya peningkatan kapasitas SDM dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan	Peningkatan Kapasitas penyuluh pertanian dalam rangka Percepatan Pertanian dari hulu ke hilir	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
Tujuan Ketiga (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)	Keuangan	Meningkatnya Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita	Peningkatan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	Data	basis data kesehatan yang belum optimal menyebabkan layanan kesehatan masyarakat belum maksimal	Peningkatan basis data kesehatan berbasis digital	

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana
	Kategori	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Tujuan Keempat (Pendidikan berkualitas)	Pendidikan	Rata-rata lama sekolah masih belum mencapai target	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
Tujuan Kelima (Kesetaraan Gender)	Regulasi	Belum efektifnya peraturan-peraturan responsif gender diluar lingkungan pemerintah.	Meningkatkan sosialisasi pengarusutamaan gender di masyarakat dengan sasaran instansi-instansi swasta	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
Tujuan Keenam (Air bersih dan Sanitasi layak)	Operasional	perlu nya peningkatan peran daerah terkait pengelolaan sanitasi	Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air bersih	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
Tujuan Ketujuh (Energi bersih dan terjangkau)	Sumber Daya Manusia	Kesadaran dan komitmen bersama dalam beralih ke energi bersih dan terjangkau	Peningkatan kapasitas SDM dalam mewujudkan pemanfaatan energi hijau	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
	Keuangan	Tantangan dalam meningkatkan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah dan berkelanjutan	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri	
Tujuan Kedelapan (Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan layak)	Sumber Daya Manusia	SDM Bali yang sebagian besar masih bergantung pada sektor pariwisata yang rentan	transformasi Ekonomi Bali pada sektor primer dan sekunder yang berkualitas	Bappeda Provinsi Bali
	Keuangan	Tantangan dalam meningkatkan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah dan berkelanjutan	Pemetaan Sumber pendapatan non pemerintah	

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana
	Kategori	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Tujuan kesembilan Infrastruktur, industri dan inovasi	Operasional	kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur	Perluasan cakupan dukungan pemerintah terhadap investasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
Tujuan Kesepuluh (Berkurangnya kesenjangan)	Kesehatan	Kriteria pendataan penduduk yang bekerja pada sektor informal masih belum bisa mengukur pendapatan masyarakat, sehingga terjadi informasi yang bias, hal ini menyebabkan pengukuran indikator penduduk miskin belum akurat.	Pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan Peningkatan cakupan Program Keluarga Harapan serta Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
Tujuan Kesebelas (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)	Keuangan	Tantangan dalam meningkatkan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah dan berkelanjutan	Pemetaan Sumber pendapatan non pemerintah	Bappeda Provinsi Bali
	Regulasi	Dukungan regulasi dalam peningkatan sumber pendanaan pembangunan di daerah	Regulasi terkait dana tanggung jawab sosial dan lingkungan	
Tujuan Keduabelas (Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab)	Sumber Daya Manusia	Masih banyaknya industri yang melanggar aturan dengan membuang limbah industri sembarangan	Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan pelaksanaan Pergub Bali No. 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber serta penegakan hukum atas pencemaran lingkungan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali; Satpol PP Provinsi Bali

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana
	Kategori	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Tujuan Ketigabelas (Penanganan perubahan iklim)	Data	Ketersediaan data series yang berkelanjutan	Penyusunan Rencana Aksi dan Data terkait Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
Tujuan Keempatbelas (Ekosisten Lautan)	Regulasi	Pembangunan kelautan dan perikanan belum didukung dengan tata kelola yang baik, terutama kebijakan dan regulasi	Penyusunan dan percepatan finalisasi regulasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Tujuan Kelimabelas (Eksosistem Daratan)	Sumber Daya Manusia	Perlunya peningkatan kapasitas dalam pelestarian hutan	Pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan pelestarian hutan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
Tujuan Keenambelas (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh)	Sumber Daya Manusia	perlunya peningkatan kapasitas dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintahan Daerah baik Provinsi dan Kabupaten Kota	Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Agen Perubahan dan inovasi Pelayanan Publik	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
Tujuan Ketujuhbelas (Kemitraan untuk mencapai tujuan)	Keuangan	Tantangan dalam meningkatkan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah dan berkelanjutan	Pemetaan Sumber pendapatan non pemerintah	Bappeda Provinsi Bali
	Regulasi	Dukungan regulasi dalam peningkatan sumber pendanaan pembangunan di daerah	Regulasi terkait dana tanggung jawab sosial dan lingkungan	



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berbagai upaya dalam mencapai tujuan TPB/SDGs telah dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun non pemerintah di Provinsi Bali. Dengan Bergeraknya sektor ekonomi setelah Pandemi Covid-19 yang melanda berbagai belahan dunia khususnya Bali sehingga pencapaian target-target yang mengalami penurunan mulai mengalami kecenderungan meningkat sesuai target yang telah ditetapkan di dalam dokumen RAD. Pada pilar pembangunan sosial yang terdiri dari 5 tujuan terfokus pada upaya pemenuhan hak dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan pemerintah yang berfokus dalam penanganan dampak dari pandemi Covid-19 cenderung berpengaruh positif dalam pemenuhan capaian indikator-indikator pada TPB/SDGs di dalam pilar pembangunan sosial. Meskipun demikian, tujuan pertama mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebagai akibat dari aktivitas perekonomian yang terhenti sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Data capaian masih banyak yang belum tersedia hingga Tahun 2023, menjadi tantangan dalam pengukuran pencapaian target-target TPB/SDGs di Bali.

Capaian pilar pembangunan ekonomi mengalami perbaikan walaupun belum sepenuhnya pulih, dengan telah dibukanya pariwisata dan berdampak pada sektor lainnya. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,71 persen. Pada pilar pembangunan lingkungan, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dan non pemerintah dalam mencapai target pada indikator-indikator TPB/SDGs yang tergabung di dalamnya mengalami kecenderungan positif, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga kearifan lokal Bali. Kebijakan dan strategi yang direncanakan ke depan diharapkan dapat meningkatkan capaian-capaian dalam pilar pembangunan lingkungan dalam mewujudkan Bali sebagai barometer ekonomi hijau di Indonesia.

Pilar hukum dan tata kelola, berbagai terobosan dan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Bali berkontribusi dalam peningkatan capaian indikator yang juga mengalami kecenderungan tren positif. Meskipun beberapa indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RAD TPB/SDGs tahun 2019-2023, namun dengan kebijakan dan strategi yang dilakukan diprediksi akan membaik pada tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan indikator-indikator TPB/SDGs masih banyak yang capaiannya tidak dapat dipenuhi karena tidak adanya ketersediaan data yang berkesinambungan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan target-target strategis pembangunan Bali yang mengalami penurunan, Pemerintah Provinsi Bali bersama pihak non pemerintah baik dunia usaha dan akademisi diharapkan dapat meningkatkan komitmen bersama dalam mewujudkan TPB/SDGs agar tidak ada seorang pun yang tertinggal (*no one left behind*). Untuk meningkatkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, maka perlu dilakukan transformasi ekonomi Bali dari sektor tersier ke sektor primer dan sektor industri dengan proporsi yang lebih berimbang. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak perlu ditingkatkan baik dengan dunia usaha dan dunia industri serta akademisi dan masyarakat untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs. Pemerintah Provinsi Bali perlu meningkatkan alternatif sumber pendanaan pembangunan baik dari CSR, KPBU dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan agar program-program yang telah ditetapkan dapat berjalan dan tidak tertunda karena tidak mendapatkan pembiayaan dari APBD. Selain Transformasi Ekonomi, juga perlu dilakukan perluasan cakupan layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat utamanya kelompok rentan yang belum secara menyeluruh terjangkau. Untuk mempercepat pencapaiannya kolaborasi penganggaran dan pembangunan dengan melibatkan pihak non pemerintah yang belum optimal dilaksanakan perlu ditingkatkan.

# LAMPIRAN

## FORMULIR REALISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI BALI

### PILAR 1: PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)		
			2023								
			I	II							
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>											
<b>INDIKATOR 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</b>											
<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>											
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Laporan			54	3.614.900,00	3.355.500,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah /Kabupaten/Kota	Laporan						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.</b>											
<b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>											
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	orang			51	28.699.700,00	22.683.800,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
1.06.04.1.02	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Calon orang tua			2	350.833.900,00	363.119.500,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	orang			2	292.135.200,00	150.322.300,00	APBD		UPTD. Pelayanan Sosial
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			64	184.401.000,00	45.711.500,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
		Pemulasaraan	orang			13	107.734.200,00	104.610.800,00	APBD		UPTD. Pelayanan Sosial

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	orang			1	2.384.397.800,00	2.307.915.489,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Pengasuhan	orang			42	40.000.000,00	39.368.400,00	APBD		UPTD. Pelayanan Sosial
		Penyediaan Makanan	orang			42	269.546.000,00	134.839.550,00	APBD		UPTD. Pelayanan Sosial
		Penyediaan Sandang	orang			42	89.750.000,00	34.950.000,00	APBD		UPTD. Pelayanan Sosial
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	orang			42	10.000.000,00	7.244.460,00	APBD		UPTD. Pelayanan Sosial
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental spiritual dan sosial	orang						APBD		UPTD. Pelayanan Sosial
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	orang			42	47.914.000,00	44.051.400,00	APBD		UPTD. Pelayanan Sosial
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang			42	260.340.668,00	35.942.000,00	APBD		UPTD. Pelayanan Sosial
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			42	17.480.000,00	4.180.000,00	APBD		UPTD. Pelayanan Sosial
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	orang			81	465.000.000,00	464.418.875,00	APBD		UPTD. Pelayanan Sosial
		Penyediaan Sandang	orang			42	89.750.000,00	34.950.000,00	APBD		UPTD. Pelayanan Sosial

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	orang			81	60.000.000,00	15.568.800,00	APBD		UPTD. Pelayanan Sosial
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	orang			81	109.798.800,00	116.608.542,00	APBD		UPTD. Pelayanan Sosial
		Pemulasaraan	orang			11	36.000.000,00	10.000.000,00	APBD		UPTD. Pelayanan Sosial
<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>											
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Laporan			54	3.614.900,00	3.355.500,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah /Kabupaten/Kota	Laporan				3.614.900,00	3.532.500,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>											
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang			620	255.937.800,00	255.874.400,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1. (b) Proposi peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan</b>											
<b>2.07.06 Program Pengawasan Ketenagakerjaan</b>											
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Perusahaan			26	11.279.900,00	11.044.800,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
		Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Perusahaan			49	138.248.002,00	137.075.550,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Bali Hyperkes dan Keselamatan Kerja
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1. (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.</b>											
<b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	51		28.699.700,00	22.683.800,00	APBD	2	56.624.300,00	29.136.800,00	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali	
<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>												
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang			620	620	255.937.800,00	255.874.400,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB: 1.3.1. (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.</b>												
<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>												
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Laporan			54	54	3.614.900,00	3.355.500,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah /Kabupaten/Kota	Laporan			1		3.614.900,00	3.532.500,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</b>												
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	layanan			0	100	37.748.098.852,00	30.751.265.024,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	persen							APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap</b>												
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	layanan		0	1	307.851.600,00	272.913.910,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan</b>											
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab/Kota		0	1	174.880.000,00	171.470.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Perbaikan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen				31.814.936.672,00	30.878.634.003	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		Sub Kegiatan: Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Paket						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		Sub Kegiatan: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Paket						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (e) Persentase RT yg memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</b>											
1.02.05 PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab/Kota		0	1	174.880.000,00	171.470.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Perencanaan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen				31.814.936.672,00	30.878.634.003	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		Sub Kegiatan: Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Paket				9.264.682.600,00		APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		Sub Kegiatan: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Paket				1.141.218.100,00	266.444.220,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	persen		5	5	31.814.936.672,00	30.878.634.003,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Air Minum
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
1.03.05.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	SR		1	1	11.504.884.800,00	10.185.596.361,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Air Limbah
<b>INDIKATOR TPB 1 :1.4.1 (j) Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran</b>											
<b>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>											
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Skala Provinsi	Kali		4		140.195.744,00	65.294.850,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
		Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Kali						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB :1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</b>											
<b>INDIKATOR TPB 1 : 1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.</b>											
<b>1.05.03 Program Penanggulangan Bencana</b>											
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kabupaten/kota		0	24	458.304.000,00	435.743.988,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengendalian Bencana Daerah
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupaten/kota		3		771.586.960,00	234.779.627,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengendalian Bencana Daerah
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten/kota						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	personil Tim ESR						APBD	Provinsi Bali	UPTD Pengendalian Bencana Daerah
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	dokumen		0	2	25.889.000,00	25.759.100,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		0					APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	persen		0	1	1.745.290.000,00	1.665.135.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengendalian Bencana Daerah

**INDIKATOR TPB 1.5.1. (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.**

1.05.03 Program Penanggulangan Bencana											
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten/kota						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	personil Tim ESR						APBD	Provinsi Bali	UPTD Pengendalian Bencana Daerah
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA											
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang		620	620	255.937.800,00	255.874.400,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Peremuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali

**INDIKATOR TPB 1.5.1. (c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.**

1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA											
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang		620	620	255.937.800,00	255.874.400,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB 1 : 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.</b>											
<b>1.05.03 Program Penanggulangan Bencana</b>											
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kabupaten/kota		0	24	458.304.000,00	435.743.988,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengendalian Bencana Daerah
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupaten/kota		3		771.586.960,00	234.779.627,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengendalian Bencana Daerah
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten/kota						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	personil Tim ESR						APBD	Provinsi Bali	UPTD Pengendalian Bencana Daerah
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	dokumen		0	2	25.889.000,00	25.759.100,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		0					APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	persen		0	1	1.745.290.000,00	1.665.135.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)		
			2023								
			I	II							
<b>INDIKATOR TPB 1 : 1.5.3 (b) Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.</b>											
<b>1.05.03 Program Penanggulangan Bencana</b>											
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	dokumen		0	2	25.889.000,00	25.759.100,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		0					APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	persen		0		1.745.500.000,00	4.750.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
<b>Indikator TPB 1: 2.1.1.* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)</b>											
<b>2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>											
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	1	203.753.880,00	184.918.532,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam	Unit		0	1	315.662.168,00	312.503.368,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
<b>2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>											



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	layanan		0	1	36.490.000,00	36.034.500,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	layanan		0	1	32.780.000,00	31.443.400,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persen		4	12	24.068.338.200,00	21.895.752.300,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Lembaga		0	2	603.785.000,00	539.127.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab/Kota		0	1	174.880.000,00	171.470.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Kab/Kota						APBD	3 Kab/Kota, 5 Kab/Kota	Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
			2023							
			I	II						
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Peringkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen			31.814.936.672,00	30.878.634.003,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		Sub Kegiatan: Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Paket		30	9.434.382.600,00	7.069.800.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		Sub Kegiatan: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Paket		230,11	965.365.200,00	538.971.700,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	SPAM		5	31.814.936.672,00	30.878.634.003,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Air Minum
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah										
1.03.05.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	SR		1	11.504.884.800,00	10.185.596.361,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Air Limbah
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Laporan		54	3.614.900,00	3.355.500,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Peremuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah /Kabupaten/Kota	Laporan		1	3.614.900,00	3.532.500,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Peremuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat										



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	kelompok		0	3	701.906.952,00	696.841.852,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	unit						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	dokumen						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan											
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	1	203.753.880,00	184.918.532,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam	Unit		0	1	315.662.168,00	312.503.368,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
<b>2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>											
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Sampel		0	1	155.434.788,00	149.062.188,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha PSAT		0		668.549.364,00	127.920.853,00	APBD		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Kemanan Pangan
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha PSAT		3		187.297.484,00	40.154.746,00	APBD		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Kemanan Pangan

**INDIKATOR 2.5.1.\* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.**

2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	kelompok		0	1	701.906.952,00	696.841.852,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	unit						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	dokumen						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan											
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	1	203.753.880,00	184.918.532,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam	Unit				312.503.368,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	
							315.662.168,00				
2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan											
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Sampel			1	149.062.188,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	
		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha PSAT					APBD		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Kemanan Pangan	
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha PSAT					APBD		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Kemanan Pangan	
3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian											
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jenis			2	10.389.816.180,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	
							10.473.712.130,00				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	baglog			3	3.857.792.640,00	3.737.976.804,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	kelompok				530.992.676,00	525.094.976,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	kelompok			3	7.313.522.860,00	7.097.856.512,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	kelompok						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terbinanya Perusahaan Besar Swasta/Negara Komoditas Perkebunan, Tersedianya Alat Panjat Kelapa, Tersedianya Alat Pamarut Kelapa, Tersedianya Gerobak Dorong/Arco, Tersedianya Mesin Pemotong Rumput	Kawasan		0	2	1.316.330.464,00	1.293.385.416,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
		Terlaksananya Kategori Penataan Prasarana Pertanian di 9 kabupaten/Kota	kelompok		0		196.942.480,00	46.798.470,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB : 3.1.1* Angka Kematian Ibu</b>											
<b>1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>											
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	layanan		0	100	37.748.098.852,00	30.751.265.024,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	layanan						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	layanan		0	1	36.490.000,00	36.034.500,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	layanan		0	1	32.780.000,00	31.443.400,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persen		4	12	24.068.338.200,00	21.895.752.300,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>											
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Lembaga		0	2	603.785.000,00	539.127.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab/Kota		0		174.880.000,00	171.470.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Kab/Kota						APBD	3 Kab/Kota, 5 Kab/Kota	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB : 3.1.2 * Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya terakhir ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih</b>											
<b>INDIKATOR TPB : 3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</b>											
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	persen		0	100	37.748.098.852,00	30.751.265.024,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	persen						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB : 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup</b>											
<b>INDIKATOR TPB : 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup</b>											
<b>INDIKATOR TPB : 3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup</b>											
<b>1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>											
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	layanan		0	100	37.748.098.852,00	30.751.265.024,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	layanan		0	1	36.490.000,00	36.034.500,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	layanan		0	1	32.780.000,00	31.443.400,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persen		4	12	24.068.338.200,00	21.895.752.300,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>											



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Lembaga		0	2	603.785.000,00	539.127.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab/Kota		0	1	174.880.000,00	171.470.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Kab/Kota						APBD	3 Kab/Kota, 5 Kab/Kota	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB: 3.2.2 (b) Persentase kab/kota yg mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi</b>											
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>											
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	layanan		0	100	37.748.098.852,00	30.751.265.024,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	layanan						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
<b>1.02.05 PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Kab/Kota					APBD	3 Kab/Kota, 5 Kab/Kota	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa</b>											
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.2.(a) Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk</b>											
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang</b>											
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.3(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria</b>											
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B</b>											
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)</b>											
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5(a) Jumlah Kabupaten dengan eliminasi Kusta</b>											
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)</b>											
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>											
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	layanan		0	100	37.748.098.852,00	30.751.265.024,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	layanan						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	persen						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	layanan		0	1	32.780.000,00	31.443.400,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	layanan		0	3	1.245.831.572,00	1.060.090.817,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persen		4	12	24.068.338.200,00	21.895.752.300,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	persen		31	49	37.335.000,00	18.335.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	dokumen						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	sistem			0	19.083.000,00	12.726.030,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Lembaga		0	2	603.785.000,00	539.127.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab/Kota		0	1	174.880.000,00	171.470.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Kab/Kota						APBD	3 Kab/Kota, 5 Kab/Kota	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur &gt;=18 tahun</b> <b>INDIKATOR TPB: 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.</b> <b>INDIKATOR TPB: 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur &gt;=18 tahun</b>											
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Lembaga		0	2	603.785.000,00	539.127.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab/Kota		0	1	174.880.000,00	171.470.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Kab/Kota						APBD	3 Kab/Kota, 5 Kab/Kota	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB: 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan</b>											
<b>1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>											
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen			28500	9.454.400,00	8.066.500,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	orang		30,00	1,00	47.398.900,00	40.974.400,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB: 4.1.2.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.</b>											
<b>INDIKATOR TPB: 4.1.2. (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.</b>											
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
1.01.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	sekolah		66,7		390.433.013.022,00	83.285.559.907,00	APBD	9 Kab/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahaga Provinsi Bali
		Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Kelas		0		12.372.662.900,00	591.638.315,00	APBD	9 Kab/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahaga Provinsi Bali
		Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Dokumen		80		114.824.800,00	35.414.840,00	APBD	9 Kab/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahaga Provinsi Bali
		Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	sekolah		2498		53.333.752.772,00	20.049.730.110,00	APBD	9 Kab/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahaga Provinsi Bali
		Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	sekolah		89		378.706.500,00	91.237.700,00	APBD	9 Kab/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahaga Provinsi Bali
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	sekolah		414		170.437.760.000,00	59.061.688.706,00	APBD	9 Kab/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahaga Provinsi Bali
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	sekolah		0		42.994.700,00	13.768.800,00	APBD	9 Kab/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahaga Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
1.01.02.1.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	sekolah		37,2		323.000.262.872,00	99.252.567.573,00	APBD	9 Kab/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahaga Provinsi Bali
		Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	sekolah		0		5.533.000.000,00	0,00	APBD	9 Kab/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahaga Provinsi Bali
		Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Dokumen		173		78.611.000,00	45.047.000,00	APBD	9 Kab/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahaga Provinsi Bali
		Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	sekolah		2650		47.036.478.472,00	17.612.419.898,00	APBD	9 Kab/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahaga Provinsi Bali
		Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	dokumen		0		532.053.600,00	91.085.000,00	APBD	9 Kab/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahaga Provinsi Bali
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	sekolah		350		169.551.590.000,00	73.906.405.757,00	APBD	9 Kab/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahaga Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	SMK						APBD	9 Kab/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahaga Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB : 5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan</b>											
<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>											
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	peserta						APBD	9 Kab/Kota	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB : 5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan</b>											
<b>INDIKATOR TPB : 5.2.2 (a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif</b>											
<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>											
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Orang			2	93.750.000,00	91.786.250,00	APBD	9 Kab/Kota	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	orang/kasus			7	4.940.000,00	1.900.000,00	APBD	9 Kab/Kota	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB : 5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah</b>											
<b>INDIKATOR TPB 5.5.2 : Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.</b>											
<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>											
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	peserta						APBD	9 Kab/Kota	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali

**PILAR 2: PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)			
			2022									
			I	II								
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 7.2.1* Bauran energi terbarukan</b>												
3.29.05 Program Pengelolaan Energi Terbarukan												
3.29.05.1.04	Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Pengusaha dan persen		8	1	46.414.600,00	43.131.394	APBD	Provinsi Bali	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita atas dasar harga konstan (%)</b>												
<b>INDIKATOR TPB 8.1.1 (a.1) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ribu rupiah)</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.</b>												
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja												
2.07.04.1.01	Kegiatan: Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	kawasan		160	160	173.010.100,00	168.316.500	APBD	Provinsi Bali	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
2.07.04.1.03	Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	orang		-		3.000.000,00	543.000	APBD	Provinsi Bali	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
		2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	-		-	-	566.700,00	543.000	APBD	Provinsi Bali	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri												
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	perajin		-		4.982.730.957,00	4.982.730.957	APBD	provinsi Bali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
				I	II						
3.30.05 Program Pengembangan Ekspor											
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	pelaku usaha		-	14.629.700,00	7.545.600	APBD	Provinsi Bali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
		3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	pelaku usaha		8	8.405.700,00	7.545.600	APBD	Provinsi Bali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
INDIKATOR TPB : 8.3.1* Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian, Berdasarkan Jenis Kelamin											
INDIKATOR TPB : 8.3.1(b) Presentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian											
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja											
2.07.04.1.01	Kegiatan: Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	kawasan		160	173.010.100,00	168.316.500	APBD	Provinsi Bali	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
3.30.05 Program Pengembangan Ekspor											
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	pelaku usaha		-	14.629.700,00	7.545.600	APBD	Provinsi Bali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	pelaku usaha		8	25	8.405.700,00	7.545.600	APBD	Provinsi Bali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB : 8.3.1(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.</b>												
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												
2.17.07.1.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	UMKM		33	195	822.315.360,00	672.551.385	APBD	Provinsi Bali	Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB : 8.5.1* Upah rata-rata per jam kerja</b>												
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN												
2.07.06.1.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Perusahaan		26	26	11.279.900,00	11.044.800	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB : 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.5.2(a) Persentase Setengah Pengangguran</b>												
2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja												
2.07.03.1.04	Kegiatan: Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	orang		30	30	30.997.600,00	30.948.000	APBD	Provinsi Bali	Dinas ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
2.07.04.1.01	Kegiatan: Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	kawasan		160	160	173.010.100,00	168.316.500	APBD	Provinsi Bali	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
2.07.04.1.03	Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	orang		-		3.000.000,00	543.000	APBD	Provinsi Bali	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
		2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	-		-	-	566.700,00	543.000	APBD	Provinsi Bali	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
<b>2.07.06 Program Pengawasan Ketenagakerjaan</b>												
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Perusahaan		26	26	11.279.900,00	11.044.800	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB : 8.8.1(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.</b>												
<b>2.07.06 Program Pengawasan Ketenagakerjaan</b>												
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Perusahaan		30	26	11.279.900,00	11.044.800	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
		2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	persen		49		138.248.002,00	137,075,550,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Bali Hyperkes dan Keselamatan Kerja
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1(a) Jumlah wisatawan mancanegara.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1(b) Jumlah perjalanan yang dilakukan penduduk Indonesia menurut provinsi asal</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.</b>												
3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata												
3.26.03.1.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tayangan		-	1	178.681.588,00	178.122.448	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		3.26.03.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Event			20.983.336	541.311.564,00	537.770.074	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		3.26.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen		-	1	162.525.584,00	162.139.334	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		3.26.03.1.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Video		-	1	200.104.392,00	197.508.292	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.</b>												
3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif												
3.26.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	3.26.05.1.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	orang			35	174.038.288,00	151.434.458	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
						129						

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		3.26.05.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	kelompok dan orang		44	44	175.931.488,00	172.548.028	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		3.26.05.1.01.03	Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	orang						APBD	Provinsi Bali	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		3.26.05.1.01.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang		50	50	241.795.684,00	238.711.034	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB : 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 9.2.1(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.</b>												
3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri												
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	perajin		-	11	7.551.068.348,00	6.473.191.241	APBD	provinsi Bali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB : 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.</b>												
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja												
2.07.04.1.01	Kegiatan: Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	kawasan		160	160	173.010.100,00	168.316.500	APBD	Provinsi Bali	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
<b>INDIKATOR TPB : 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.</b>												
3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri												
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	perajin		-	11	7.551.068.348,00	6.473.191.241	APBD	provinsi Bali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR TPB : 9.4.1* Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 9.4.1(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca.</b>												
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sungai		-		108.446.200,00	100,862,763,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</b>												
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Laporan		54	54	3.614.900,00	3.355.500	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Peremuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
		1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah /Kabupaten/Kota	Laporan						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Sosial Pemberdayaan Peremuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri</b>												
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa Lintas Kabupaten/Kota	Desa		-	4	150.556.688,00	147.594.538	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	persen		-	1	408.521.688,00	396.419.830	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
		2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							APBD	Provinsi Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
		2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa							APBD	Provinsi Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
		2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	persen		-	1	469.347.080,00	464.613.100	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
		2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan							APBD	Provinsi Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							APBD	Provinsi Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
		2.13.04.1.01.21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa							APBD	Provinsi Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa			50		15.339.034.760,00	11.270.491.675	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Desa		375	6.415	238.677.984,00	237.667.248	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
		2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Desa		2	2	462.453.084,00	453.568.379	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
		2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Potensi SDA		-	1	549.589.288,00	503.760.838	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
		2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persen		-	1	16.515.677.064,00	15.881.075.656	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.</b> 2.07.06 Program Pengawasan Ketenagakerjaan												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Perusahaan		100	160	173.010.100,00	168.316.500	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
		2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	persen		49	171	138.248.002,00	137.075.550	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Bali Hyperkes dan Keselamatan Kerja
<b>INDIKATOR 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.</b>												
<b>INDIKATOR 17.1.1(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.</b>												
<b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>												
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	inovasi, persen		-	1	386.786.600,00	359.774.668	APBD	Provinsi Bali	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
		5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	rekomendasi, persen		1		282.276.800,00	128.927.520	APBD	Provinsi Bali	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
		5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	persen		6	12	141.625.000,00	111.760.980	APBD	Provinsi Bali	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Nilai IKM		-	12	2.128.311.736,00	2.040.984.704	APBD	Kabupaten Badung	UPTD Pajak Badung
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Nilai IKM		-	12	566.722.544,00	556.634.144	APBD	Kabupaten Bangli	UPTD Pajak Bangli
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Nilai IKM		-	12	1.717.135.840,00	1.639.095.754	APBD	Kabupaten Buleleng	UPTD Pajak Buleleng
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Nilai IKM		-	2	2.709.678.616,00	2.709.460.216	APBD	Kota Denpasar	UPTD Pajak Denpasar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Nilai IKM		-	12	1.175.613.296,00	1.123.329.000	APBD	Kabupaten Gianyar	UPTD Pajak Gianyar
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Nilai IKM		-	12	413.233.960,00	400.855.533	APBD	Kabupaten Jembrana	UPTD Pajak Jembrana
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Nilai IKM		-	12	509.850.752,00	502.517.752	APBD	Kabupaten Karangasem	UPTD Pajak Karangasem
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Nilai IKM		-	12	483.554.856,00	448.646.444	APBD	Kabupaten Klungkung	UPTD Pajak Klungkung
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Nilai IKM		-	12	495.584.856,00	4.747.019.284	APBD	Tabanan	UPTD Pajak Tabanan
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	persen		-	288	899.221.128,00	790.209.128	APBD	Kabupaten Badung	UPTD Pajak Badung
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	persen		-	7.264	521.056.648,00	516.736.648	APBD	Kabupaten Bangli	UPTD Pajak Bangli
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	persen		58.893	15.651	2.239.044.280,00	1.980.263.326	APBD	Kabupaten Buleleng	UPTD Pajak Buleleng
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	persen		58.893	126.523	421.631.272,00	417.284.272	APBD	Kota Denpasar	UPTD Pajak Denpasar
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	persen		58.893	43565	776.422.024,00	725.556.128	APBD	Kabupaten Gianyar	UPTD Pajak Gianyar
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	persen		58.893	24604	446.523.064,00	426.163.046	APBD	Kabupaten Jembrana	UPTD Pajak Jembrana
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	persen		58.893	23250	324.141.272,00	262.344.008	APBD	Kabupaten Karangasem	UPTD Pajak Karangasem
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	persen		58.893	22615	447.498.960,00	423.603.948	APBD	Kabupaten Klungkung	UPTD Pajak Klungkung
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	persen		58.893	36289	454.858.960,00	430.538.936	APBD	Tabanan	UPTD Pajak Tabanan
		5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	persen		6		174.174.200,00	163.376.475	APBD	Provinsi Bali	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
		5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	persen		6	0	13.971.100,00	10.474.130	APBD	Provinsi Bali	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)		
			2022								
			I	II							
<b>INDIKATOR 17.11.1(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas</b>											
3.30.05 Program Pengembangan Ekspor											
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	pelaku usaha		-	14.629.700,00	7.545.600	APBD	Provinsi Bali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
		3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	pelaku usaha		8	8.405.700,00	7.545.600	APBD	Provinsi Bali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)</b>											
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL											
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Skala Provinsi	Kali		4	140.195.744,00	65.294.850	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
		2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Kali					APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali

**PILAR 3: PEMBANGUNAN LINGKUNGAN**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)			
			2022									
			I	II								
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</b>												
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab/Kota		0	1	174.880.000,00	171.470.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.02	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen				31.814.936.672,00	30.878.634.003,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		1.03.03.1.01.03	Sub Kegiatan: Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Paket			30	9.434.382.600,00	7.069.800.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		1.03.03.1.01.05	Sub Kegiatan: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Paket			230,11	965.365.200,00	538.971.700,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)			
			2022									
			I	II								
<b>INDIKATOR 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).</b>												
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab/Kota		0	1	174.880.000,00	171.470.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
<b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>												
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.02	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen				31.814.936.672,00	30.878.634.003,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		1.03.03.1.01.03	Sub Kegiatan: Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Paket			30	9.434.382.600,00	7.069.800.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		1.03.03.1.01.05	Sub Kegiatan: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Paket			230,11	965.365.200,00	538.971.700,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		1.03.03.1.01.09	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	persen		5	5	31.814.936.672,00	30.878.634.003,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Air Minum



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah												
1.03.05.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.09	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	SR		1		11.504.884.800,00	10.185.596.361,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Air Limbah
<b>INDIKATOR 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.</b>												
<b>INDIKATOR 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.</b>												
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah												
1.03.05.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.09	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	SR		1		11.504.884.800,00	10.185.596.361,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Air Limbah
<b>INDIKATOR 6.3.2.(a) Kualitas air danau.</b>												
<b>INDIKATOR 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.</b>												
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.02.1.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	2.11.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	9 kab/kota; 10 perusahaan; 2 kasus; 10 sertifikat;						APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
2.11.02.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1 dokumen; 1 dokumen		13		377.044.992,00	367.681.417,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2022						
						I	II					
2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sungai		0	1	139.188.400,00	131.485.821,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.</b>												
<b>INDIKATOR 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.</b>												
<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>												
2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sungai		0	1	139.188.400,00	131.485.821,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 6.5.1.(d) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.</b>												
<b>3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>												
3.28.06.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.02	Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	lokasi; kelompok; hektar; kelompok			1	127.997.096,00	124.262.116,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
3.28.03.1.04	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha						APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
		3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha						APBD	Kawasan Hutan Bali Timur	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
		3.28.03.1.04.05	Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	unit						APBD	Kawasan Hutan Bali Selatan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
		3.28.03.1.04.06	Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	unit						APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
3.28.03.1.05	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	kajian teknis; pengguna; industri; kasus; patroli		1	1	10.546.633.232,00	92.173.412,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA												
3.28.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	dokumen						APBD	Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					I	II						
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok					APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok					APBD	Kawasan Hutan Bali Timur	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok					APBD	Kawasan Hutan Bali Utara	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	
<b>3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>												
3.28.06.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.02	Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	lokasi; kelompok; hektar; kelompok		0	1	127.997.096,00	124.262.116,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.</b>												
<b>INDIKATOR 6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.</b>												
<b>INDIKATOR 6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.</b>												
<b>INDIKATOR 6.5.1.(i) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.</b>												
<b>3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2022						
						I	II					
3.28.06.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.02	Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	lokasi; kelompok; hektar; kelompok		0	1	127.997.096,00	124.262.116,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.</b>												
<b>INDIKATOR 6.6.1.(b) Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.</b>												
<b>INDIKATOR 6.6.1.(c) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.</b>												
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sungai		0	1	139.188.400,00	131.485.821,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.</b>												
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
3.28.03.1.04	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha						APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
		3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha						APBD	Kawasan Hutan Bali Timur	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		3.28.03.1.04.05	Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	unit						APBD	Kawasan Hutan Bali Selatan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
		3.28.03.1.04.06	Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	unit						APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
3.28.03.1.05	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	kajian teknis; pengguna; insdutri; kasus; patroli		1		122.686.492,00	42.753.200,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA												
3.28.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	dokumen						APBD	Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok						APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok						APBD	Kawasan Hutan Bali Timur	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok						APBD	Kawasan Hutan Bali Utara	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
<b>INDIKATOR 6.6.1.(e) Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.</b>												
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)												
3.28.06.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.02	Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	lokasi		0	1	127.997.096,00	124.262.116,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
<b>INDIKATOR11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.</b>												
<b>INDIKATOR11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).</b>												
<b>INDIKATOR11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP</b>												
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.02	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen				31.814.936.672,00	30.878.634.003,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		1.03.03.1.01.03	Sub Kegiatan: Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Paket			30	9.434.382.600,00	7.069.800.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		1.03.03.1.01.05	Sub Kegiatan: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Paket			230,11	965.365.200,00	538.971.700,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan												
1.03.10.1.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen		4	10	4.470.433.986,00	3.891.707.226,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		1.03.10.1.01.02	Sub Kegiatan: Pembebasan Lahan /Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kabupaten/kota						APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		1.03.10.1.01.03	Sub Kegiatan: Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen						APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		1.03.10.1.01.04	Sub Kegiatan: Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen		1	4	1.240.506.231,00	1.184.503.599,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		1.03.10.1.01.06	Sub Kegiatan: Pelebaran Jalan Menuju Standar	Km		3	3	80.790.060.264,00	68.824.443.668,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		1.03.10.1.01.11	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jalan	Km			742,91	19.769.557.087,00	18.173.540.069,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		1.03.10.1.01.17	Sub Kegiatan: Pelebaran Jembatan	Buah						APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		1.03.10.1.01.18	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jembatan	Paket						APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		1.03.10.1.01.21	Sub Kegiatan: Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	kegiatan		0,41	2,48	7.135.813.983,00	6.743.272.400,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		1.03.10.1.01.23	Sub Kegiatan: Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Paket			7	3.845.874.443,00	3.736.694.079,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang												
1.03.12.1.01	Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.03.12.1.01.04	Sub Kegiatan: Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	paket						APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
1.03.12.1.02	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.03	Sub Kegiatan: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen		3	94,33	742.441.544,00	600.200.395,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
1.03.12.1.03	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.03.01	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dokumen			94,32	305.981.380,00	234.552.973,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
1.03.12.1.04	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.01	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen			35	414.934.176,00	270.972.940,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		1.03.12.1.04.02	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen			1	177.354.892,00	101.874.150,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
1.04.02 Program Pengembangan Perumahan												
1.04.02.1.03	Kegiatan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05	Sub Kegiatan: Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	unit			70,68	406.763.766,00	404.778.807,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan</b>												
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	RIT			100	17.461.485.088,00	6.647.304.901,00	APBD	Wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (SARBAGIT A)	UPTD Trans Bali
<b>INDIKATOR 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per100.000 orang</b>												
<b>INDIKATOR 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.</b>												
<b>INDIKATOR 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan</b>												
<b>INDIKATOR 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana</b>												
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					I	II						
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kabupaten/kota		0	9	458.304.000,00	435.743.988,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengendalian Bencana Daerah
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupaten/kota		3	6	771.586.960,00	599.434.595,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengendalian Bencana Daerah
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten/kota						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
		1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	personil Tim ESR						APBD	Provinsi Bali	UPTD Pengendalian Bencana Daerah
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	dokumen		0		25.889.000,00	25.759.100,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
		1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		0					APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
		1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	persen		0		1.745.500.000,00	4.750.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 11.6.1(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani</b>												
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					I	II					
2.11.11.1.01	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.02	Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	tahun			9.781.051.404,00	7.225.318.102,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
		2.11.11.1.01.03	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	1 tahun; 1 paket		1	9.781.051.404,00	7.225.318.102,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
		2.11.11.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1 tahun					APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
		2.11.11.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1 tahun					APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
		2.11.11.1.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1 tahun					APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

**INDIKATOR 11.b.1\* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.**

**INDIKATOR 11.b.2\* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah**

1.05.03 Program Penanggulangan Bencana

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2022						
						I	II					
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	dokumen		0	2	25.889.000,00	25.759.100,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU</b>												
<b>INDIKATOR 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)</b>												
<b>2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>												
2.11.02.1.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	2.11.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	9 kab/kota; 10 perusahaan; 2 kasus; 10 sertifikat;						APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
2.11.02.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1 dokumen; 1 dokumen		1		391.280.992,00	43.150.964,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang</b>												
<b>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>												
2.11.11.1.01	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.02	Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	tahun		0,5	1	9.781.051.404,00	7.225.318.102,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
		2.11.11.1.01.03	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	1 tahun; 1 paket		1	1	9.781.051.404,00	7.225.318.102,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
		2.11.11.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1 tahun						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					I	II						
		2.11.11.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1 tahun					APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	
		2.11.11.1.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1 tahun					APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	
<b>INDIKATOR 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah</b>												
<b>INDIKATOR 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang</b>												
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana												
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kabupaten/kota		0	9	458.304.000,00	435.743.988,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengendalian Bencana Daerah
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupaten/kota		3	6	771.586.960,00	599.434.595,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	UPTD Pengendalian Bencana Daerah
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten/kota						APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	personil Tim ESR						APBD	Provinsi Bali	UPTD Pengendalian Bencana Daerah
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	dokumen		0		25.889.000,00	25.759.100,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
		1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		0					APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
		1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	persen		0		1.745.500.000,00	4.750.000,00	APBD	9 Kabupaten/Kota di Bali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)</b>												
<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>												
2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sungai		0	1		131.485.821,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
								139.188.400,00				
<b>INDIKATOR 14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional</b>												
<b>3.25.02 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil</b>												
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	dokumen				321.000.000,00	168.990.860,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
						10000						



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
3.25.02.1.02	Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 1 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.02.02	Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	rekomendasi						APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan</b>												
3.25.02 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil												
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	dokumen		10000		321.000.000,00	168.990.860,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
		3.25.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat.	kawasan		10000		321.000.000,00	168.990.860,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
3.25.02.1.02	Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 1 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.02.02	Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	rekomendasi						APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.01	Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan	pengelolaan			20	625.001.292,00	1.197.817.442	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
		3.25.03.1.01.03	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dokumen						APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Laut Dan Perikanan												
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MIL	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil			2	0	42.101.400,00	36.000.000,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil							APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
		3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di laut sampai dengan 12 Mil			1	3	18.101.400,00	18.000.000,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 14.4.1.* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman</b>												
3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap												
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.01	Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan	pengelolaan			20	625.001.292,00	1.197.817.442	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
		3.25.03.1.01.03	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dokumen						APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Laut Dan Perikanan												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MIL	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil			2	0	42.101.400,00	36.000.000,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil							APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
		3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di laut sampai dengan 12 Mil			1	3	18.101.400,00	18.000.000,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber daya perikanan di wilayah sungai,danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/kota dalam 1 [sa	3.25.05.1.02..03	Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 [satu] daerah provinsi							APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 14.5.1.* Jumlah luas kawasan konservasi perairan</b>												
3.25.02 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil												
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	dokumen			0	42.101.400,00	36.000.000,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
						10000						

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	pelaku usaha						APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
		3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di laut sampai dengan 12 Mil	pelaku usaha		1	3	18.101.400,00	18.000.000,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
3.25.02.1.02	Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 1 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.02.02	Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	rekomendasi						APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha</b>												
3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Laut Dan Perikanan												
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MIL	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil			2	3	24.000.000,00	18.000.000,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil							APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
		3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di laut sampai dengan 12 Mil			1	3	18.101.400,00	18.000.000,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2022						
						I	II					
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber daya perikanan di wilayah sungai,danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/kota dalam 1 [sa	3.25.05.1.02..03	Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 [satu] daerah provinsi							APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil</b>												
<b>INDIKATOR 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindung</b>												
3.25.02 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil												
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	dokumen		10000		321.000.000,00	168.990.860,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
		3.25.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat.	kawasan		10000		321.000.000,00	168.990.860,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					I	II					
3.25.02.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 1 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.02.02	Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	rekomendasi					APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap											
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.01	Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan			20	625.001.292,00	1.197.817.442	-	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
		3.25.03.1.01.03	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dokumen					APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Laut Dan Perikanan											
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MIL	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil			2	42.101.400,00	36.000.000,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				24.000.000,00	18.000.000	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
		3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di laut sampai dengan 12 Mil			1	18.101.400,00	18.000.000,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
INDIKATOR 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan											
INDIKATOR 15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)			
			2022									
			I	II								
<b>INDIKATOR 15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.</b>												
<b>INDIKATOR 15.2.1.(c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.</b>												
<b>3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>												
3.28.03.1.04	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha				APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat		
		3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha				APBD	Kawasan Hutan Bali Timur	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur		
		3.28.03.1.04.05	Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	unit				APBD	Kawasan Hutan Bali Selatan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan		
		3.28.03.1.04.06	Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	unit				APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat		
3.28.03.1.05	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	kajian teknis; pengguna; insdutri; kasus; patroli		1	1	10.546.633.232,00	92.173.412,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
<b>3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>												
3.28.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	dokumen					APBD	Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	
<b>3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					I	II					
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok					APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok					APBD	Kawasan Hutan Bali Timur	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok					APBD	Kawasan Hutan Bali Utara	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
<b>INDIKATOR 15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan</b>											
<b>3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>											
3.28.03.1.04	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha					APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
		3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha					APBD	Kawasan Hutan Bali Timur	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		3.28.03.1.04.05	Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	unit						APBD	Kawasan Hutan Bali Selatan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
		3.28.03.1.04.06	Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	unit						APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA												
3.28.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	dokumen						APBD	Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok						APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok						APBD	Kawasan Hutan Bali Timur	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					I	II						
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok					APBD	Kawasan Hutan Bali Utara	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	
<b>INDIKATOR 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan</b>												
<b>3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>												
3.28.03.1.04	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha					APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
		3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha					APBD	Kawasan Hutan Bali Timur	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
		3.28.03.1.04.05	Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	unit					APBD	Kawasan Hutan Bali Selatan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	
		3.28.03.1.04.06	Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	unit					APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
3.28.03.1.05	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	kajian teknis; pengguna; industri; kasus; patroli		1	1	10.546.633.232,00	92.173.412,00	APBD	Provinsi Bali	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
<b>3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4) 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
3.28.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	dokumen						APBD	Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok						APBD	Kawasan Hutan Bali Barat	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok						APBD	Kawasan Hutan Bali Timur	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok						APBD	Kawasan Hutan Bali Utara	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara

**PILAR 4: PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)		
				2022								
				I	II							
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.</b>												
<b>INDIKATOR 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan</b>												
<b>INDIKATOR 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun</b>												
<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>												
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Orang		1	1	93.750.000,00	91.786.250,00	APBD	9 Kab/Kota	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang/kasus		7	7	4.940.000,00	1.900.000,00	APBD	9 Kab/Kota	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)</b>												
<b>6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>												
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LHP		0	9	600.197.784,00	353.474.545,00	APBD	Provinsi Bali	Inspektorat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					I	II						
		6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP		2	15	384.679.292,00	284.545.266,00	APBD	Provinsi Bali	Inspektorat
		6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	LKJIP		1	45	199.999.650,00	60.416.018,00	APBD	Provinsi Bali	Inspektorat
		6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	LHR		2	2	400.089.496,00	218.001.314,00	APBD	Provinsi Bali	Inspektorat
		6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan		34	58	1.024.912.992,00	505.710.188,00	APBD	Provinsi Bali	Inspektorat
		6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Laporan		1	1	739.459.500,00	365.575.114,00	APBD	Provinsi Bali	Inspektorat
		6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	LHP		42	55	574.178.872,00	330.416.866,00	APBD	Provinsi Bali	Inspektorat
<b>INDIKATOR 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)</b>												
4.01.02 Program Penataan Organisasi												
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	4.01..02.1.02.03	"Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja "	persen		50	1	17.310.600,00	9.215.000,00	APBD	Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
		4.01..02.1.02.04	"Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan "	persen		0%	2	75.760.900,00	29.457.336,00	APBD	Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
		4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	persen		0%	1	171.731.000,00	96.132.716,00	APBD	Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2022						
						I	II					
		4.01.02.1.02.02	"Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja "	persen		0%	1	119.962.300,00	85.458.478,00	APBD	Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
		4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	persen		0%	4	118.321.196,00	81.171.409,00	APBD	Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan</b>												
4.01.07 Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa												
4.01.07.1.02	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	laporan		0%	1	50.062.000,00	24.220.550,00	APBD	Provinsi Bali	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali
		4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	laporan		0	1	49.546.000,00	16.944.600,00	APBD	Provinsi Bali	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)</b>												
<b>INDIKATOR 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)</b>												
4.01.02 Program Penataan Organisasi												
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	4.01..02.1.02.03	"Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja "	persen		50	1	17.310.600,00	9.215.000,00	APBD	Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
		4.01..02.1.02.04	"Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan "	persen		0%	2	75.760.900,00	29.457.336,00	APBD	Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
		4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	persen		0%	1	171.731.000,00	96.132.716,00	APBD	Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		4.01.02.1.02.02	"Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja "	persen		0%	1	119.962.300,00	85.458.478,00	APBD	Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
		4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	persen		0%	4	118.321.196,00	81.171.409,00	APBD	Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)</b>												
<b>INDIKATOR 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)</b>												
2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	peserta			2	439.973.600,00	6.345.000,00	APBD	9 Kab/Kota	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi</b>												
<b>INDIKATOR 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil</b>												
<b>INDIKATOR 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik</b>												
8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik												
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	SK				16.848.269.544,00	16.639.443.096,00	APBD	Provinsi Bali	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah	Dokumen		2	5	95.781.272.488,00	95.634.877.110,00	APBD	Provinsi Bali	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
		8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah	Dokumen						APBD	Provinsi Bali	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 16.9.1*Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur</b>												
<b>INDIKATOR 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah</b>												
<b>INDIKATOR 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran</b>												
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Skala Provinsi	Kali		4	4	135.904.088,00	135.175.168,00	132.686.994,09	Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2022						
						I	II					
		2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Kali						-	9 Kabupaten/Kota di Bali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan</b>												
<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>												
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Orang		1	1	93.750.000,00	91.786.250,00	APBD	9 Kab/Kota	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang/kasus		7	7	4.940.000,00	1.900.000,00	APBD	9 Kab/Kota	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali

## Formulir *Self Assessments* Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Program Non Pemerintah

NAMA PERUSAHAAN : PT. PLN Indonesia Power Bali Power Generation Unit

ALAMAT : By Pass Bridjend I Gusti Ngurah Rai No 535 Denpasar Bali

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN (1)	SATUAN (2)	TARGET TAHUNAN (3)	REALISASI SEMESTER (4)		REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (5)	SUMBER PENDANAAN (6)	LOKASI PELAKSANAAN TAHUN 2023 (7)	INSTANSI PELAKSANA (8)
		2023	2023					
			I	II				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA								
<b>Indikator TPB/SDGs 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur</b>								
Program : Perbaikan /Rehab Fisik Bangunan								
Program : Bakti Pelayanan Masyarakat								
Kegiatan 1 : Bakti Pelayanan Masyarakat	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Mendukung Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Milik Warga Masyarakat Desa Darmasaba di Wilayah KODIM 1611/Badung	Orang	2	2	15.000.000	CSR	Warga Masyarakat Desa Darmasaba	PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali
Kegiatan 2 : Bakti Pelayanan Masyarakat	Bantuan Dana Untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih Menuju Hutan Bambu Kelompok Tani Hutan (KTH) Wana Kerta Lestari Banjar Sandan Desa Bangli Baturiti Tabanan	KK	100	100	49.500.000	CSR	Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Wana Kerta Lestari Banjar Sandan Desa Bangli Baturiti Tabanan	PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali
Kegiatan 3 : .....	Output Kegiatan : .....							
<b>Indikator TPB/SDGs 1.3.1*Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan</b>								
Program : Bakti Pembinaan Hubungan								
<b>Indikator TPB/SDGs 1.a.2*Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan,dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah</b>								
Program : Bakti Pembinaan Hubungan								

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN (1)		SATUAN (2)	TARGET TAHUNAN (3)	REALISASI SEMESTER (4)		REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (5)	SUMBER PENDANAAN (6)	LOKASI PELAKSANAAN TAHUN 2023 (7)	INSTANSI PELAKSANA (8)
			2022	2023					
Kegiatan 1 Bakti Pelayanan Masyarakat	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Mendukung Kegiatan Gerakan Literasi Masyarakat Untuk Kesejahteraan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Orang	100		100	1.000.000	CSR	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Pemerintah Kota Denpasar	PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali
Kegiatan 2 Bakti Pelayanan Masyarakat	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Pembangunan/Renovasi Fisik Gedung (Aula) Sebagai Sarana Penunjang Pendidikan Dalam Proses Pembelajaran di SMA Negeri 5 Denpasar	Orang	100		100	5.000.000	CSR	SMA Negeri 5 Denpasar	SMA Negeri 5 Denpasar
<b>Indikator TPB/SDGs 2.5.2*Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui</b>									
Program : Bakti Pemberdayaan Masyarakat									
<b>Indikator TPB/SDGs 3.8.1.(a)* Unmet Need Pelayanan Kesehatan</b>									
Program : Bakti Pemberdayaan Masyarakat									
Kegiatan 1 Bakti Pembinaan Hubungan	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Mendukung Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Tri Hita Karana Tahun 2023 di Kelurahan Serangan Denpasar Selatan	Orang	20		20	2.000.000	CSR	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPC LPM) Denpasar Selatan	PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali



PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN (1)		SATUAN (2)	TARGET TAHUNAN (3)	REALISASI SEMESTER (4)		REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (5)	SUMBER PENDANAAN (6)	LOKASI PELAKSANAAN TAHUN 2023 (7)	INSTANSI PELAKSANA (8)
			2022	2023					
Kegiatan 1 Bakti Pemberdayaan Masyarakat	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Pengadaan Mesin Penggiling Lindur Sebagai Pendukung Proses Produksi Stik Mangrove di Poklhasar Mina Lestari Batu Lumbang	Orang	33		33	4.500.000	CSR	Bantuan Dana Partisipasi Kegiatan Kreativitas Pelajar se-Kabupaten Buleleng Dalam Mendukung Penyelenggaraan Dies Natalis Universitas Panji Sakti Yang Ke-38	PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali
<b>INDIKATOR 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku</b>									
Program : Pemantaun kualitas air sungai									
Kegiatan 1 : Pemantauan kualitas air sungai	Output Kegiatan : Mengetahui kualitas Sungai Baru	Titik sampel	4	2	2	9.200.000,00	Lingkungan	Desa Pesanggaran Sungai Baru	PT Indonesia Power UP Bali
Kegiatan 2 : Pemantauan terhadap kualitas air limbah	Output Kegiatan : Memastikan kualitas air limbah tidak melebihi baku mutu	Titik sampel	48	24	24	79.200.000,00	Lingkungan	PT Indonesia Power UP Bali	PT Indonesia Power UP Bali
<b>Indikator TPB/SDGs 7.2.1* Bauran energi terbarukan</b>									
Program : .....									
Kegiatan 1 .....									
<b>Indikator TPB/SDGs 9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB</b>									
Program : Bakti Pemberdayaan Masyarakat									
<b>Indikator TPB/SDGs 11.4.1.(a)* Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil</b>									
Program : Bakti Pembinaan Hubungan									

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN (1)		SATUAN (2)	TARGET TAHUNAN (3)	REALISASI SEMESTER (4)		REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (5)	SUMBER PENDANAAN (6)	LOKASI PELAKSANAAN TAHUN 2023 (7)	INSTANSI PELAKSANA (8)
			2022	2023					
Kegiatan 1 Bakti Pelayanan Masyarakat	Output Kegiatan : Bantuan Dana Kegiatan Pentas Seni Dalam Rangka Menumbuhkan Kreativitas dan Melestarikan Seni Budaya Lokal Dengan Mengembangkan Karakter Sesuai Profil Pelajar Pancasila TK Negeri Tukad Mungga Buleleng	Orang	20		20	1.000.000	CSR	TK Negeri Tukad Mungga Buleleng	PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali
Kegiatan 2 Bakti Pelayanan Masyarakat	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Perbaikan Pelinggih di Pura Tambangan Badung Br. Sakah Desa Adat Kepaon Pemogan Denpasar Selatan	Orang	80		80	5.000.000	CSR	Pura Tambangan Badung Br. Sakah Kepaon Pemogan	PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali
Kegiatan 3 Bakti Pelayanan Masyarakat	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Pembangunan Balai Serbaguna di Pura Panti Arya Pasung Grigis Desa Adat Teruna Desa Blahbatuh Gianyar	KK	50		50	10.000.000	CSR	Pura Panti Arya Pasung Grigis Desa Adat Teruna Desa Blahbatuh Gianyar	Masyarakat Desa Adat Teruna Desa Blahbatuh Gianyar
Kegiatan 4 Bakti Pelayanan Masyarakat	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Perbaikan Bangunan di Pura Desa Lan Pura Puseh Desa Adat Kapal Kabupaten Badung	KK	80		80	10.000.000	CSR	Pura Desa Lan Pura Puseh Desa Adat Kapal	Masyarakat Pura Desa Lan Pura Puseh Desa Adat Kapal
Kegiatan 5 Bakti Pelayanan Masyarakat	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Perlengkapan Sarana Tempek Dharma Bakti, Banjar Adat Prastha Guna, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk	Orang	50		50	1.800.000	CSR	Tempek Darma Bhakti Br Adat Prastha Guna Lingk. Arum Gilimanuk	Tempek Darma Bhakti Br Adat Prastha Guna Lingk. Arum Gilimanuk

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN (1)		SATUAN (2)	TARGET TAHUNAN (3)	REALISASI SEMESTER (4)		REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (5)	SUMBER PENDANAAN (6)	LOKASI PELAKSANAAN TAHUN 2023 (7)	INSTANSI PELAKSANA (8)
			2022	2023					
Kegiatan 6 Bakti Pelayanan Masyarakat	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Perbaikan Sanitasi Umum Dan Tempat Pesraman Pemangku di Pura Dalem Perarungan Desa Pesanggaran Sesetan Denpasar	Orang	50		50	5.000.000	CSR	Pura Dalem Perarungan Desa Pesanggaran Sesetan Denpasar	Pura Dalem Perarungan Desa Pesanggaran Sesetan Denpasar
Kegiatan 7 Bakti Pelayanan Masyarakat	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Perbaikan Sanitasi Umum Dan Tempat Pesraman Pemangku di Pura Dalem Perarungan Desa Pesanggaran Sesetan Denpasar	Orang	50		50	5.000.000	CSR	Pura Dalem Perarungan Desa Pesanggaran Sesetan Denpasar	Pura Dalem Perarungan Desa Pesanggaran Sesetan Denpasar
Kegiatan 8 Bakti Pelayanan Masyarakat	output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Partisipasi Program Kreatifitas Dan Pelestarian Bahasa Dan Sastra Melalui Festival Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023	Orang	30		30	1.000.000	CSR	Universitas Pendidikan Ganesha	Universitas Pendidikan Ganesha
Kegiatan 9 Bakti Pelayanan Masyarakat	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Pembangunan Gedong Simpen Pura Luwur Pedengenan Banjar Bedha, Desa Bongan Kabupaten Tabanan	KK	80		80	5.100.000	CSR	Pengempon Pura Luhur Pedengenan Br. Bedha Desa Bongan Tabanan	Pengempon Pura Luhur Pedengenan Br. Bedha Desa Bongan Tabanan
Kegiatan 10 Bakti Pelayanan Masyarakat	Bantuan Dana Untuk Renovasi Pelinggih Pasimpangan Pura Luhur Tanah Lot Desa Adat Kediri Kabupaten Tabanan	KK	50		50	5.000.000	CSR	Pesanekan Pura Luhur Tanah Lot	Pesanekan Pura Luhur Tanah Lot
<b>Indikator TPB/SDGs 11.6.1.(a)* Persentase sampah perkotaan yang tertangani</b>									

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN (1)	SATUAN (2)	TARGET TAHUNAN (3)	REALISASI SEMESTER (4)		REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (5)	SUMBER PENDANAAN (6)	LOKASI PELAKSANAAN TAHUN 2023 (7)	INSTANSI PELAKSANA (8)	
		2022	2023						
Program : Bakti Pelayanan Masyarakat									
Kegiatan 1 Bakti Pelayanan Masyarakat	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Kegiatan Kebersihan dan Edukasi Tentang Tanaman Bakau Hutan Mangrove serta Penggunaan Teknologi Terbarukan di Ekowisata Mangrove Batu Lumbang Gerakan Pramuka Gugus Depan Pangkalan SMK N 1 Denpasar	Orang	60		60	6.400.000	CSR	Gerakan Pramuka Gugus Depan Pangkalan SMK N 1 Denpasar	PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali
Kegiatan 2 Bakti Pelayanan Masyarakat	Output Kegiatan : Bantuan Dana Partisipasi Kegiatan Clean Up di Area Mangrove Last Point Bersama Sungai Watch	Orang	115		115	2.300.000	CSR	Mangrove Last Point	Sungai Watch
<b>Indikator TPB/SDGs 11.6.1.(b)* Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan</b>									
Program : .....									
Kegiatan 1 Bakti Pembinaan Hubungan	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Mendukung Program Kerja Pelestarian dan Kebersihan Lingkungan di Sekitar Pantai Dalam Kegiatan GenBI Bali Sakasta Komisariat Warmadewa	Orang	30		30	1.500.000	CSR	GenBI Bali	PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali
Kegiatan 2 Bakti Pembinaan Hubungan	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Kegiatan Penanaman Pohon Di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng	Orang	50		50	2.175.000	CSR	Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng	Mangrove Ranger



PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN (1)		SATUAN (2)	TARGET TAHUNAN (3)	REALISASI SEMESTER (4)		REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (5)	SUMBER PENDANAAN (6)	LOKASI PELAKSANAAN TAHUN 2023 (7)	INSTANSI PELAKSANA (8)
			2022	2023					
Kegiatan 3 Bakti Pembinaan Hubungan	Output Kegiatan : Bantuan Dana Untuk Mendukung Kegiatan Penanaman Mangrove Bersama Mangrove Ranger di Arborethum Mangrove Park Pesanggaran Benoa Denpasar	Orang	30		30	800.000	CSR	Arborethum Mangrove Park Pesanggaran Benoa Denpasar	Mangrove Ranger
<b>Indikator TPB/SDGs 11.7.1.(a)* A35:M49 Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang</b>									
Program : .....									
Kegiatan 1 ..... Output Kegiatan : .....									
<b>Indikator TPB/SDGs 11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana</b>									
Kegiatan 1 Bakti Pelayanan Masyarakat	Bantuan Bahan Pangan Untuk Masyarakat Yang Terdampak Bencana Alam di Wilayah Tabanan Bekerjasama Dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan	Orang	100		100	10000000	CSR	Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan	PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali
<b>INDIKATOR 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru</b>									
Program : PT Indonesia Power ikut menjadi peserta PROPER									
Kegiatan 1 : Melakukan pengelolaan lingkungan sesuai matrik RKL-RPL	Output Kegiatan : Menjadi Perusahaan yang taat terhadap lingkungan (PROPER Biru)	Unit Pembangkit	12	6	6	763.236.000,00	Lingkungan	PT Indonesia Power UP Bali	PT Indonesia Power UP Bali
<b>INDIKATOR 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)</b>									
Program : Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan Perauran dai Lingkungan hidup									

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN (1)		SATUAN (2)	TARGET TAHUNAN (3)	REALISASI SEMESTER (4)		REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (5)	SUMBER PENDANAAN (6)	LOKASI PELAKSANAAN TAHUN 2023 (7)	INSTANSI PELAKSANA (8)
			2022	2023					
Kegiatan 1 : Mengeluarkan LB3 dengan menggunakan pihak ketiga yang berijin	Output Kegiatan : Penyimpanan LB3 sesuai dengan ijin TPS yang berlaku	Unit Pembangkit	4	4	9	848.541.307,32	Lingkungan	PT Indonesia Power UP Bali	PT Indonesia Power UP Bali
<b>Indikator TPB/SDGs 12.5.1.(a)* Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang</b>									
Program : .....									
<b>Indikator TPB/SDGs 12.6.1.(a)* Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001</b>									
Program : .....									
Kegiatan 1 ..... Output Kegiatan : .....									
<b>INDIKATOR 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK</b>									
Program : Membuat pelaporan penurunan emisi GRK									
Kegiatan 1 : Pemantauan dan pemeliharaan terhadap pengendalian pencemaran udara	Output Kegiatan : Memastikan emisi yang dikeluarkan pembangkit tidak melebihi baku mutu	Unit Pembangkit	12	6	6	503.826.000,00	Lingkungan	PT Indonesia Power UP Bali	PT Indonesia Power UP Bali
<b>Indikator TPB/SDGs 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan</b>									
Program : .....									
<b>INDIKATOR 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha</b>									
Program : Melakukan pemantauan terhadap kualitas air laut									
Kegiatan 1 : Melakukan pemantauan kualitas air laut	Output Kegiatan : Mengetahui kualitas air laut	Titik sampel	2	1	1	6.800.000,00	Lingkungan	air laut Benoa, air laut Gilimanuk, air lautPemarom	PT Indonesia Power UP Bali

NAMA PERUSAHAAN  
ALAMAT

: BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Bali, Nusa Tenggara, Papua  
:

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN (1)	SATUAN (2)	target 2023	capaian 2023		REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (5)	SUMBER PENDANAAN (6)	LOKASI PELAKSANAAN TAHUN 2022 (7)	INSTANSI PELAKSANA (8)	
			I	II					
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA									
<b>Indikator</b>									
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA									
<b>Indikator TPB/SDGs 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur</b>									
Program :									
Kegiatan 1: Pelatihan AK3 Umum, Pelatihan KNK (Kader Norma Ketenagakerjaan, Pemberian APD (Alat Pelindung Diri), Pemberian Multivitamin dan Sembako Pekerja	Output Kegiatan : - Memberikan Inside kepada Pekerja terkait keselamatan dalam bekerja - Bentuk Relationship Building BPJamsostek dengan Peserta	440	Peserta BPJS Ketenagakerjaan	200		49.968.829,00	Pelayanan Spesial Pada Hari Buruh (Mayday) pada Kantor Wilayah	Provinsi Bali	BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Bali, Nusa Tenggara, Papua
					100	103.345.000,00	Pelatihan uji kepatuhan dan riksa alat K3 di fasilitas utama.	Provinsi Bali	BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Bali, Nusa Tenggara, Papua
					140	157,050,00.00	Safety Riding Bersertifikat	Provinsi Bali	BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Bali, Nusa Tenggara, Papua

NAMA PERUSAHAAN  
ALAMAT

: PT Bank Pembangunan Daerah Bali  
: Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN (1)	SATUAN (2)	2023	capaian 2023		REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (5)	SUMBER PENDANAAN (6)	LOKASI PELAKSANAAN TAHUN 2023 (7)	INSTANSI PELAKSANA (8)	
			I	II					
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA									
<b>Indikator TPB/SDGs 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur</b>									
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA									
<b>Indikator TPB/SDGs 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur</b>									
Program : Sosial Lainnya									
Kegiatan 1: Bedah rumah	Output Kegiatan : Jumlah rumah yang diperbaiki	Unit	0	0	107	1.515.500.000,00	CSR	Provinsi Bali	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
<b>Indikator TPB/SDGs 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas</b>									
Program : Sosial Lainnya									
Kegiatan 1: Bantuan kepada penyandang disabilitas	Output kegiatan: Jumlah penyandang disabilitas	Orang		77	38	95.034.000,00	CSR	Provinsi Bali	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
<b>Indikator TPB/SDGs 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana</b>									
Program : Sosial Lainnya									
Kegiatan 1: Bantuan kepada korban bencana alama	Output kegiatan: Jumlah pemeberian bantuan	Unit		0	24	300.000.000,00	CSR	Provinsi Bali	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
<b>Indikator TPB/SDGs 2.1.1* Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan</b>									
Program : Sosial Lainnya									
Kegiatan 1: Bantuan kepada panti asuhan dan panti jompo	Output kegiatan: Jumlah panti asuhan dan panti jompo	Unit		10	0	49.920.000,00	CSR	Provinsi Bali	PT Bank Pembangunan Daerah Bali

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN (1)	SATUAN (2)	2023	capaian 2023		REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (5)	SUMBER PENDANAAN (6)	LOKASI PELAKSANAAN TAHUN 2023 (7)	INSTANSI PELAKSANA (8)	
<b>Indikator TPB/SDGs 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca (ii) matematika</b>									
Program : Pendidikan									
Kegiatan 1: Beasiswa kepada anak didik yang tidak mampu	Output kegiatan: Jumlah penerima beasiswa	Orang		343	55	690.000.000,00	CSR	Provinsi Bali	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Kegiatan 2: Bantuan kepada anak didik yang berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional, diwujudkan dengan memberikan penghargaan atau apresiasi berupa uang/barang untuk menunjang kegiatan dari siswa tersebut	Output kegiatan: Jumlah penerima bantuan	Orang		0	75	270.000.000,00	CSR	Provinsi Bali	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Kegiatan 3: Bantuan sarana dan prasarana pendidikan	Output kegiatan: Jumlah sekolah penerima bantuan	Unit		0	0		CSR	Provinsi Bali	PT Bank Pembangunan Daerah Bali

NAMA PERUSAHAAN : Yayasan Role Bali

ALAMAT : Jalan Siligita Nomor 22, Nusa Dua Bali dan Jalan Bongantik 101 Sawangan

\*Catatan: Mohon diisi realisasi di semester I saja

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN (1)	SATUAN (2)	TARGET 2023 (3)	REALISASI 2023 (4)		REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (5)	SUMBER PENDANAAN (6)	LOKASI PELAKSANAAN TAHUN 2023 (7)	INSTANSI PELAKSANA (8)	INSTANSI PELAKSANA	
			I	II						
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
<b>Indikator TPB/SDGs 4.3.1 Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.</b>										
Program : Edukasi Perempuan										
Kegiatan 1 : Bali WISE Porgram	Output Kegiatan : memberi pendidikan gratis kepada perempuan tidak mampu berfokus pada pariwisata	orang	100	38	47	Rp 164.754.650	Grants,Donation,Programs, Sponsor a Student and Tours	Bali WISE, Nusa Dua, Badung	Bali WISE, Nusa Dua, Badung	R.O.L.E. Foundation
<b>Tujuan 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</b>										
<b>INDIKATOR 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian berdasarkan jenis kelamin</b>										
Program : Pengembangan Bisnis Berkelanjutan untuk Perempuan di Bukit (Sawangan)										
Kegiatan 1 : Soap Upcycling Program	Output Kegiatan : Membantu pengadaan sabun kepada lansia,yatim piatu, sekolah dan organisasi yang mengalami kendala ekonomi	balok	3600	1810	2230	Rp 1.010.000	Recycling Soap Program, Donation dan Grants	R.O.L.E. Foundation	ZeroWaste Center,Sawangan,Kuta Selatan, Badung, Bali	R.O.L.E. Foundation
<b>INDIKATOR 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara</b>										
Program : Tour Interaktif dan Workshop Lingkungan										
Kegiatan 1 : Think Global Act Local Interactive Tour	Output Kegiatan: Membuka jasa turisme dan kunjungan untuk wisatawan ke pusat pendidikan kami untuk melakukan kegiatan seperti daur ulang, menenun, menanam pohon	orang	150	113	314	Rp 13.535.900	Grants,Donation,Programs and Tours	R.O.L.E. Foundation	ZeroWaste Center,Sawangan,Kuta Selatan, Badung, Bali	R.O.L.E. Foundation
<b>INDIKATOR 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang</b>										
Program : Beach Cleanup										
Kegiatan 1 : Beach Cleanup	Mengumpulkan sampah dari rumah tangga dan pantai	kg	4000	9677,36	9839,05	Rp 39.032.820	Grants,Donation,Programs and Tours	Pantai-Pantai	ZeroWaste Center,Sawangan,Kuta Selatan, Badung, Bali	R.O.L.E. Foundation
<b>Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.</b>										
Program : Pendidikan Lingkungan										
Kegiatan 1 : Kids Environmental Classroom and ZeroWaste Goes to	Output Kegiatan : Jumlah Murid Sekolah Sekolah Dasar di Kuta Seltan terdidik mengenai lingkungan	orang	1000	1266	5357	Rp 516.594.000	Grants,Donation,Programs and Tours	R.O.L.E. Foundation dan Sekolah	ZeroWaste Center,Sawangan,Kuta Selatan, Badung, Bali	R.O.L.E. Foundation

**FORMULIR REALISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN: (KABUPATEN  
GIANYAR)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PILAR 1: PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</b>												
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.2.02	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persen	100	15,49	0	90.332.311	14.000.000	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	48,16	0	186.844.800	90.000.000	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Sosial
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.</b>												
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Persen	100	1,6	0	131.763.350	2.118.450	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Sosial
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.2.02	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persen	100	15,49	0	90.332.311	00	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	48,16	0	186.844.800	90.000.000	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Sosial
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Persen	100	48,16	0	186.844.800	1.373.659	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Sosial
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1. (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.</b>												
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Perumahan	Persen	100	1,6	0	131.763.350	2.118.450	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Sosial
<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>												
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Persen	100	0,90	0	152.457.928	1.373.659	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Sosial
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1. (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.</b>												
<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>												
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persen	100	15,49	0	90.332.311	14.000.000	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Sosial
		1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	48,16	0	186.844.800	90.000.000	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Sosial
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</b>												
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
1.02.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen	100	4,23	0	36.143.290	1.532.000	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
		1.02.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	persen	100	23,28	0	55.996.280	13.040.000	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap</b>												
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen	100	4,23	0	36.143.290	1.532.000	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar
<b>INDIKATOR TPB 1 :1.4.1 (j) Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran</b>												
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persen	100	21,6	0	378.699.107	82.144.766	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar
<b>INDIKATOR TPB :1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</b>												
<b>INDIKATOR TPB 1 : 1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.</b>												
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana												
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.01	Respon cepat darurat bencana kabupaten	Persen	100	16,1	0	424.366.590	68.439.000	APBD	Kabupaten Gianyar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>INDIKATOR TPB 1.5.1. (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.</b>												
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana												
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.01	Respon cepat darurat bencana kabupaten	Persen	100	16,1	0	424.366.590	68.439.000	APBD	Kabupaten Gianyar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.04	Terwujud Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persen	100	0,90	0	152.457.928	1.373.659,00	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Sosial
<b>INDIKATOR TPB : 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.</b>												
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana												
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.01	Respon cepat darurat bencana kabupaten	Persen	100	16,1	0	424.366.590	68.439.000	APBD	Kabupaten Gianyar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>INDIKATOR TPB: 2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun</b>												
1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persen	100%	22,55	0	8.202.740	1.850.000	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	persen	50%	65,85	0	784.340.020	516.526.615	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	persen	100,00%	18,57	0	99.448.108,00	18.476.521	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
		1.02.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persen	85	7,80	0	838.846.100	65.509.000	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persen	80%	46,27	80	12.038.294.054	5.571.021.500	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	0	0	5.000.000	-	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.5.1.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan	7	15,30	0	292.000.688	44.692.701	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.02	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	persen	100	3,10	0	549.562.300	17.103.500	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	persen	100	15,49	0	90.332.311	14.000.000	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Sosial
2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat												
2.09.03.2.01	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.01.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persen	100	76,06	0	270.701.051	205.896.081	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan
<b>INDIKATOR TPB : 3.1.1* Angka Kematian Ibu</b>												
1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
1.02.02.2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persen	100%	22,55	0	8.202.740	1.850.000	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	persen	50%	65,85	0	784.340.020,00	516.526.615	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	persen	100,00%	18,57	0	99.448.108,00	18.476.521	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persen	85	7,80	0	838.846.100	65.509.000	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persen	80%	46,27	0	12.038.294.054	5.571.021.500	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
		1.02.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	persen	100,00%	18,57	0	99.448.108,00	18.476.521	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persen	85	7,80	0	838.846.100	65.509.000	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persen	80%	46,27	0	12.038.294.054	5.571.021.500	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	0	0	5.000.000	-	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan	7	15,30	0	292.000.688	1.775.000,00	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
<b>INDIKATOR TPB: 3.2.2 (b) Persentase kab/kota yg mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi</b>												
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persen	100%	22,55	0	8.202.740	1.850.000	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	persen	50%	65,85	0	784.340.020,00	516.526.615	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan	7	15,30	0	292.000.688	44.692.701	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.2.(a) Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.3(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5(a) Jumlah Kabupaten dengan eliminasi Kusta</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)</b>												
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
1.02.02.2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persen	100%	22,55	0	8.202.740	1.850.000	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	persen	50%	65,85	0	784.340.020,00	516.526.615	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	persen	100,00%	18,57	0	99.448.108,00	18.476.521	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persen	85	7,80	0	838.846.100	65.509.000	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persen	80%	46,27	0	12.038.294.054	5.571.021.500	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	0	0	5.000.000	-	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan	7	15,30	0	292.000.688	44.692.701	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur &gt;=18 tahun</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur &gt;=18 tahun</b>												
<b>1.02.05 PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	persen	100	0	0	5.000.000	-	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Desa/Kec.	7	15,30	0	292.000.688	44.692.701	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
<b>INDIKATOR TPB: 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan</b>												
<b>1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>												
1.02.02.2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		100%	22,55	0	8.202.740	1.850.000	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	persen	50%	65,85	0	784.340.020,00	516.526.615	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	persen	100,00%	18,57	0	99.448.108,00	18.476.521	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
		1.02.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persen	85	7,80	0	838.846.100	65.509.000	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
		1.02.2.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persen	80%	46,27	0	12.038.294.054	5.571.021.500	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan
<b>INDIKATOR TPB : 5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan</b>												
2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persen	100	0	0	64.837.422	0	APBD	Kab. Gianyar	DP3AP2KB
<b>INDIKATOR TPB : 5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 5.2.2 (a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif</b>												
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	0	0	73.399.502	-	APBD	Kab. Gianyar	DP3AP2KB

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.02	Terlaksananya penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten	persen	100	0	0	44.060.000	-	APBD	Kab. Gianyar	DP3AP2KB
<b>INDIKATOR TPB : 5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah</b>												
<b>INDIKATOR TPB 5.5.2 : Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.</b>												
<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>												
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persen	100	0	0	64.837.422	0	APBD	Kab. Gianyar	DP3AP2KB

**PILAR 2: PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)		
				2023								
				I	II							
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR TPB 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita atas dasar harga konstan (%)</b>												
<b>INDIKATOR TPB 8.1.1 (a.1) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ribu rupiah)</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.</b>												
3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri												
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	IKM	40	0	0	30.511.968	-	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar
3.30.05 Program Pengembangan Ekspor												
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.01	Pameran Dagang Nasional	pelaku usaha	15	0	0	61.932.390	0	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar
		3.30.05.2.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	pelaku usaha	50	0	0	29.660.020	0	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar
<b>INDIKATOR TPB : 8.3.1(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.</b>												
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
2.17.07.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	UMKM	100	27,35	0	272.102.266	74.438.275	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1(a) Jumlah wisatawan mancanegara.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1(b) Jumlah perjalanan yang dilakukan penduduk Indonesia menurut provinsi asal</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.</b>												
3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata												
3.26.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persen	100	7,21	0	3.365.075	0	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Pariwisata
<b>INDIKATOR TPB : 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 9.2.1(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.</b>												
3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri												
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	IKM	40	0	0	30.511.968	-	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
INDIKATOR TPB : 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.												
3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri												
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	IKM	40	0	0	30.511.968	-	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar
INDIKATOR TPB : 9.4.1* Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.												
INDIKATOR TPB : 9.4.1(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca.												
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	2	0,57	0	65.171.323	371.850	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gianyar
INDIKATOR10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.												
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100	15,49	0	67.240.339	14.000.000	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Sosial Kabupaten Gianyar
		1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	48,16	0	186.844.800	90.000.000	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Sosial Kabupaten Gianyar
INDIKATOR 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri												
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa dalam Kabupaten/Kota	Desa	7	28,62	0	41.953.247	40.881.784	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa	64	86,09	0	528.993.965	455.420.000	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	64	0	0	6.869.787	0	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Desa	64	35,15	0	9.556.454	3.360.000	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa	8	8,6	0	171.270.377	14.740.466	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Desa	64	0	0	4.917.600	0	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa	Kader	70	20,56	0	2.418.014.144	497.310.077	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	8	0	0	15.662.000	0	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kelompok	30	5,76	0	21.838.964	1.260.000	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Desa	4	88,89	4	65.342.822	58.733.555	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)	
					2023							
					I	II						
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Desa dan Kelurahan	70	0	0	78.742.000	0	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
<b>INDIKATOR 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.</b>												
<b>INDIKATOR 17.1.1(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.</b>												
<b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>												
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	persen	100	0	0	3.331.020	0	APBD	Kabupaten Gianyar	BPKAD
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	persen	100	0	0	156.282.277	0	APBD	Kabupaten Gianyar	BPKAD
		5.02.04.2.01.10	Penagihan Pajak Daerah	persen	100	50,89	0	78.600.000	40.000.000	APBD	Kabupaten Gianyar	BPKAD
		5.02.04.2.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	persen	100	0	100	522.461.072	0	APBD	Kabupaten Gianyar	BPKAD
<b>INDIKATOR 17.11.1(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas</b>												
<b>3.30.05 Program Pengembangan Ekspor</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Persen	100	0	0	61.932.390	-	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	pelaku usaha	50	0	0	29.660.020	0	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
INDIKATOR 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian ( <i>Vital Statistics Register</i> )												
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persen	100	21,69	0	378.699.107	82.144.766	APBD	Kabupaten Gianyar	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**PILAR 3: PEMBANGUNAN LINGKUNGAN**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (9)			
			2023									
			I	II								
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</b>												
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.02	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen	1	3,11	0	549.562.300	17.103.500	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.03.2.01.06	Sub Kegiatan: Peningkatan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persen	100	16,33	0	4.109.567.960	671.326.868	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>INDIKATOR 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i>/ <i>Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)</i>.</b>												
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.5.2.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.5.2.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persen	83	0	0	500.000	-	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (9)		
				2023								
				I	II							
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.02	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen	1	3,11	0	549.562.300	17.103.500	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.03.2.01.03	Sub Kegiatan: Peningkatan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persen	100	16,33	0	4.109.567.960	671.326.868	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah												
1.03.05.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.1.01.09	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100	3,44	0	541.931.424	18.657.326	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
INDIKATOR 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.												
INDIKATOR 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.												
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
1.03.05.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.1.01.09	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100	3,44	0	541.931.424	18.657.326	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>INDIKATOR 6.3.2.(a) Kualitas air danau.</b>												
<b>INDIKATOR 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.</b>												
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sungai	4	0,39	0	247.221.318	973.872	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Lingkungan Hidup
<b>INDIKATOR 6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.</b>												
<b>INDIKATOR 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.</b>												
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sungai	4	0,39	0	247.221.318	973.872	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Lingkungan Hidup
<b>INDIKATOR 6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.</b>												
<b>INDIKATOR 6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.</b>												
<b>INDIKATOR 6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.</b>												
<b>INDIKATOR 6.5.1.(i) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.</b>												
<b>3.28.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>												
3.28.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.28.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	Persen	100	4,07	0	69.835.723	2.848.840	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Lingkungan Hidup
<b>INDIKATOR 6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.</b>												
<b>INDIKATOR 6.6.1.(b) Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.</b>												
<b>INDIKATOR 6.6.1.(c) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.</b>												
<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sungai	4	0,39	4	247.221.318	973.872	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.												
INDIKATOR11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).												
INDIKATOR11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP												

1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.02	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Dokumen	1	3,11	1	549.562.300	17.103.500	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.03.2.01.03	Sub Kegiatan: Peningkatan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persen	100	16,33	100	4.109.567.960	671.326.868	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

INDIKATOR 11.5.1\* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per100.000 orang

INDIKATOR 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.

INDIKATOR 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan

INDIKATOR 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

1.05.03 Program Penanggulangan Bencana

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (9)	
					2023							
					I	II						
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Persen	100	0	0	81.598.290	-	APBD	Kab. Gianyar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100	0	0	284.529.800	-	APBD	Kab. Gianyar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persen	100	0	0	109.200.000	-	APBD	Kab. Gianyar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**INDIKATOR 11.6.1(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani**

**2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.02	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persen	74	33,68	0	1.421.719.854	478.838.815	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Lingkungan Hidup
--------------	--------------------	-----------------	---	--------	----	-------	---	---------------	-------------	------	--------------	------------------------

**INDIKATOR 12.5.1(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (9)		
				2023								
				I	II							
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.02	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persen	74	33,68	0	1.421.719.854	478.838.815	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah												
INDIKATOR 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang												
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana												
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.02	Terwujudnya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana	Persen	100	0	0	81.598.290	-	APBD	Kab. Gianyar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.05.03.2.02.03	Pengelolaan Risiko Bencana kabupaten/Kota	Persen	100	7,25	0	221.226.339	16.042.500	APBD	Kab. Gianyar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	16,12	0	424.366.590	68.439.000	APBD	Kab. Gianyar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
<b>INDIKATOR 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)</b>												
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sungai	2	0,57	0	65.171.323	371.850	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Lingkungan Hidup

**PILAR 4: PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)			
			2023									
			I	II								
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.</b>												
<b>INDIKATOR 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan</b>												
<b>INDIKATOR 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun</b>												
<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>												
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	persen	100	0	0	73.399.502	-	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	persen	100	0	0	44.060.000	-	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
<b>INDIKATOR 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)</b>												
<b>6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LHP	20	0	20	849.000	-	APBD	Kab. Gianyar	Inspektorat
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP	1	47,67	1	18.249.000	8.700.000	APBD	Kab. Gianyar	Inspektorat
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	LHP	10	0	10	849.000	-	APBD	Kab. Gianyar	Inspektorat
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	LHP	10	0	10	849.000	-	APBD	Kab. Gianyar	Inspektorat
		6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	LHP	4	0	4	849.000	-	APBD	Kab. Gianyar	Inspektorat
		6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	LHP	10	0	10	849.000	-	APBD	Kab. Gianyar	Inspektorat

**INDIKATOR 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)**

4.01.02 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
4.01.02.2.13	Penataan Organisasi	4.01..02.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	persen	100	26,17	0	215.627.982	56.446.105	APBD	Kabupaten Gianyar	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		4.01..02.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	persen	100	29,44	0	302.617.893	89.118.940	APBD	Kabupaten Gianyar	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		4.01.02.1.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	persen	100	10,81	0	129.540.147	14.014.050	APBD	Kabupaten Gianyar	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

**INDIKATOR 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan**

4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan

4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persen	100	46,15	0	139.992.000	64.613.724	APBD	Kabupaten Gianyar	Bagian Pengadaan
--------------	---------------------------------------	-----------------	---	--------	-----	-------	---	-------------	------------	------	-------------------	------------------

**INDIKATOR 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)**

**INDIKATOR 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)**

4.01.02 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

4.01.02.2.13	Penataan Organisasi	4.01..02.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	persen	100	29,44	0	302.617.893	89.118.940	APBD	Kabupaten Gianyar	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		4.01.02.1.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	persen	100	10,81	0	129.540.147	14.014.050	APBD	Kabupaten Gianyar	Bagian Organisasi dan Tata Laksana



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
			2023						
			I	II					

**INDIKATOR 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

**INDIKATOR 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)**

2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, sosial dan Ekonomi	persen	100	0	100	83.936.038	-	APBD	Kab.Gianyar	DP3AP2KB Kab. Gianyar
--------------	---	-----------------	--	--------	-----	---	-----	------------	---	------	-------------	-----------------------

**INDIKATOR 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi**

**INDIKATOR 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil**

**INDIKATOR 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik**

8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persen	100	8,04	0	33.354.831.000	2.683.602.000	APBD	Kab. Gianyar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar
<b>INDIKATOR 16.9.1*Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur</b>												
<b>INDIKATOR 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah</b>												
<b>INDIKATOR 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran</b>												
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persen	100	21,69	0	378.699.107	82.144.766	APBD	Kab. Gianyar	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gianyar
<b>INDIKATOR 16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan</b>												
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (6)	Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksana (9)
						2023						
						I	II					
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	persen	100	0	100	73.399.502	-	APBD	Kab. Gianyar	DP3AP2KB Kab. Gianyar
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	persen	100	0	100	44.060.000	-	APBD	Kab. Gianyar	DP3AP2KB Kab. Gianyar

**FORMULIR REALISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PILAR 1: PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4) 2023		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>											
<b>INDIKATOR 1.2.1 Terlaksananya Pengembangan Perumahan</b>											
<b>1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>											
1.04.03.2.01	Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1.04.03.2.01.02	Dokumen	3	1		499.721.788	3.112.226	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perkim
		1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan	Laporan	6	1	2.253.939	1.996.021	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perkim
<b>INDIKATOR 1.2.2 Terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh</b>											
<b>1.04.03. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>											
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	6	1	1.071.677	848.741	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perkim
		1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	1.051.674	828.877	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perkim
		1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	6	1	1.021.674	804.241	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perkim

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>											
		1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	6	1	8.751.129	2.277.113	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perkim
		1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	6	1	851.529.814	154.715.031	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perkim
		1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Dokumen	1	1	95.241.518	2.327.565	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perkim
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	178.499.523	904.309	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perkim
		1.04.03.2.03.03	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	1	1	1.205.402	1.045.741	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perkim
		1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	1.103.864	951.741	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perkim
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1. (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.</b>											
<b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>											
01.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Cacat	01.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	orang	115	0	171.088.473	61.346.240	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Sosial
		01.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	orang	40	40	235.294.875	177.436.672	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		01.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi	orang	500	358		127.586.777	50.821.960	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Sosial
		01.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, dan Penyandang Masalah Kesehatan Lainnya	orang	100	180		31.919.393	31.747.000	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Sosial
		01.06.04.2.01.07	Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan	orang	100	26		5.086.399	2.660.100	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Sosial
01.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan	01.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	orang	100	25		475.399	351.000	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Sosial
		01.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0		548.563	428.000		Kabupaten Badung	
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1. (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.</b>												
<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>												
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	orang	1978	1680		39.875.051	2.030.700	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	keluarga	1978	1680		5.401.169	1.813.100	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Masyarakat	orang	24760	0		864.880.039	552.424.976	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Sosial
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</b>												
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	12517	3322		568.541.928	33.072.630	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		1.02.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	11948	3190		153.052.288	60.239.415	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02..02. 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.	orang	11379	3020		435.144.607	21.552.150	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	54939	12629		59.975.799	8.177.225	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	orang	337684	105627		4.462.100.135	318.958.218	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap</b>												
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	52	24		25.038.952	10.245.500	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	dokumen	3	1		411.800.313	204.177.400	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan</b>												
<b>1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												
1.02.05.02.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif tingkat Daerah kabupaten/Kota	1.02.05.02.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	2	0		325.742.758	114.653.400	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
<b>INDIKATOR TPB 1 : 1.4.1 (J) Persentase Penduduk 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran</b>												
<b>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>												
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	10 Dokumen	5		117.545.447	112.373.100	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
		I	II									
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan	5 Layanan	2		1.397.290.760	679.735.482	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
<b>INDIKATOR TPB :1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</b>												
<b>INDIKATOR TPB 1.5.1. (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.</b>												
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana												
1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupten/Kota	Dokumen	1	0		2.944.975.594	983.067.100	APBD	Kabupaten Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung
		1.05.03.2.03.03	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	25	99		201.500.661	119.904.500	APBD	Kabupaten Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	orang	10	0		33.996.247	33.132.900	APBD	Kabupaten Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	orang	50			26.202.066		APBD	Kabupaten Badung	Dinas Sosial
		1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	50			10.843.121		APBD	Kabupaten Badung	Dinas Sosial
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	orang	40			29.801.107		APBD	Kabupaten Badung	Dinas Sosial
<b>INDIKATOR TPB :1.5.3 (b) Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.</b>												
1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0,5		12.395.927.784	5.817.655.319	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan	12	12		43.994.844	42.017.700	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>INDIKATOR TPB: 2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita</b>											
<b>INDIKATOR TPB: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita</b>											
<b>INDIKATOR TPB: 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta</b>											
<b>INDIKATOR TPB: 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun</b>											
<b>1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>											

1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	12517	3322		568.541.928	33.072.630	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	11948	3190		153.052.288	60.239.415	APBD	143 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.	orang	11379	3020		435.144.607	21.552.150	APBD	144 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	54939	12629		59.975.799	8.177.225	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	orang	337684	105627		4.462.100.135	318.958.218	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	286	175		325.094.489,00	182.993.644,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	2	1		509.315.549,00	6.867.500,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	220	110		114.240.598.499,00	54.230.638.732,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	dokumen	6	3		819.011.829,00	226.978.610,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
1.02.05.02.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif tingkat Daerah kabupaten/Kota	1.02.05.02.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	2	0		325.742.758	114.653.400	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
<b>INDIKATOR TPB : 3.1.1* Angka Kematian Ibu</b>												
<b>1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	12517	3322		568.541.928	33.072.630	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	11948	3190		153.052.288	60.239.415	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02..02. 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.	orang	11379	3020		435.144.607	21.552.150	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	54939	12629		59.975.799	8.177.225	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	orang	337684	105627		4.462.100.135	318.958.218	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	286	175		325.094.489,00	182.993.644,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>											
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	2	1	509.315.549,00	6.867.500,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	202	110	114.240.598.499,00	54.230.638.732,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>											
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.05.02.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	dokumen	6	3	819.011.829,00	226.978.610,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
1.02.05.02.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif tingkat Daerah kabupaten/Kota	1.02.05.02.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	2	0	325.742.758	114.653.400	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
<b>INDIKATOR TPB : 3.1.2 * Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya terakhir ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih</b>											
<b>INDIKATOR TPB : 3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</b>											
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>											
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	12517	3322	568.541.928	33.072.630	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	11948	3190	153.052.288	60.239.415	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.	orang	11379	3020	435.144.607	21.552.150	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	54939	12629	59.975.799	8.177.225	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	orang	337684	105627	4.462.100.135	318.958.218	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)		
			2023								
			I	II							
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>											
<b>INDIKATOR TPB : 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup</b>											
<b>INDIKATOR TPB : 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup</b>											
<b>INDIKATOR TPB : 3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup</b>											
<b>1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>											
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	12517	3322	568.541.928	33.072.630	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	11948	3190	153.052.288	60.239.415	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02..02. 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.	orang	11379	3020	435.144.607	21.552.150	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	54939	12629	59.975.799	8.177.225	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	286	175	325.094.489,00	182.993.644,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	2	1	509.315.549,00	6.867.500,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	220	110	114.240.598.499,00	54.230.638.732,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>											
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	dokumen	6	3	819.011.829,00	226.978.610,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
1.02.05.02.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif tingkat Daerah kabupaten/Kota	1.02.05.02.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	2	0	325.742.758	114.653.400	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
<b>INDIKATOR TPB: 3.2.2 (b) Persentase kab/kota yg mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi</b>												
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	11040	15036		568.541.928	33.072.630	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	10538	14176		153.052.288	60.239.415	APBD	143 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02..02. 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.	orang	10036	13531		435.144.607	21.552.150	APBD	144 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	33048	64936		59.975.799	8.177.225	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	orang	330317	405478		4.462.100.135	318.958.218	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.2.(a) Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.3(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5(a) Jumlah Kabupaten dengan eliminasi Kusta</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)</b>												
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	12517	3322		568.541.928,00	33.072.630,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	11948	3190		153.052.288,00	60.239.415,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02..02. 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.	orang	11379	3020		435.144.607,00	21.552.150,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		1.02.02.02.2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	54939	12629		59.975.799,00	8.177.225,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	orang	337684	105627		4.462.100.135,00	318.958.218,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	orang	34898	18891		889.196.636,00	302.000,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	2	1		509.315.549,00	6.867.500,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.02.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	8	4		28.384.826.798,00	13.770.227.863,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	220	110		114.240.598.499,00	54.230.638.732,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	52	24		25.038.952,00	10.245.500,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
		1.02.02.02.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	paket	28	8		7.070.042,00	311.000,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
1.02.02.02.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.02.02.02.03.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	12	6		1.063.516.255,00	363.758.872,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	dokumen	6	3		819.011.829,00	226.978.610,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
1.02.05.02.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif tingkat Daerah kabupaten/Kota	1.02.05.02.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	2	0		325.742.758,00	114.653.400,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur &gt;=18 tahun</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur &gt;=18 tahun</b>												
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	dokumen	6	3		819.011.829,00	226.978.610,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
1.02.05.02.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif tingkat Daerah kabupaten/Kota	1.02.05.02.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	2	0		325.742.758,00	114.653.400,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
<b>INDIKATOR TPB: 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan</b>												
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di wilayah Kabupaten Kota	1.02.03.02.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	orang	24	24		977.975.511,00	489.727.110,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
<b>INDIKATOR TPB: 4.1.2.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/SD/SMP</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 4.1.2. (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.</b>												
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan												
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	4	0		8.946.576.746,00	388.442.405,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	4	0		721.605.839,00	1.651.275,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	357	0		185.191.865,00	178.360.825,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Siswa	580	0		761.380.852,00	1.650.100,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik	553	0		786.324.364,00	314.135.498,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Satuan Pendidikan	357	0		121.413.688,00	42.902.360,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	28	0		1.107.203.082,00	531.962.566,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	350	0		132.908.131,00	76.504.800,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	60	0		375.277.767,00	0,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	357	0		12.684.800.000,00	3.941.960.000,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1	0		148.032.000,00	0,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>											
		1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1	0	678.369.503,00	396.800,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	7	0	105.841.748.137,00	7.921.473.828,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang	2	0	7.077.314.997,00	2.852.800,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1	0	2.643.148.992,00	667.100,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	249	0	8.176.952.530,00	2.664.478.416,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Paket	246	0	15.019.803.588,00	4.146.501,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Unit	12	0	2.774.402.630,00	126.516.422,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	416	0	239.705.099,00	596.700,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	2	0	250.000.000,00	0,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	298	0	7.947.600,00	0,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan	271	0		186.070.202,00	74.533.167,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	2.542	0		83.499.832.474,00	46.019.128.046,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	100	0		213.038.468,00	198.320.500,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	271	0		866.273.885,00	185.347.519,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	271	0		67.186.615.000,00	5.323.500.000,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	2	0		359.947.000,00	0,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1	0		85.064.579.898,00	57.841.020,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	2	0		270.680.000,00	0,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	9	0		1.568.829.967,00	828.550,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1	0		2.750.793.600,00	0,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang	1	0		595.630.000,00	0,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	1	0		335.024.000,00	0,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2	0		192.882.000,00	0,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	2	0		1.876.780.462,00	0,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	28	0		3.311.533.396,00	1.001.991.294,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Paket	28	0		17.031.029.858,00	2.735.275,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Unit	10	0		971.945.413,00	99.577.892,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	10	0		1.146.389.218,00	529.250,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	85	0		134.478.336,00	6.690.510,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	2	0		250.000.000,00	0,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	55	0		136.693.407,00	72.718.401,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.064	0		35.299.885.530,00	18.951.839.777,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	50	0		104.299.733,00	103.992.300,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	55	0		769.378.109,00	249.710.525,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	55	0		49.589.025.000,00	6.979.875.000,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	1	0		306.968.000,00	0,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
		1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	1	0		60.670.730,00	0,00	APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Satuan Pendidikan	10	0		1.214.570.000,00		APBD	Kecamatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
<b>INDIKATOR TPB : 5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan</b>												
<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>												
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab./Kota	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab./Kota	Orang	300	200		860.484.899,00	468.225.360,00	APBD	Kabupaten Badung	DP2KBP3A
<b>INDIKATOR TPB : 5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 5.2.2 (a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif</b>												
<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>												
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab./Kota	2.08.03.2.01.02	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab./kota	kasus	30	15		294.760.644,00	147.875.114,00	APBD	Kabupaten Badung	DP2KBP3A
<b>INDIKATOR TPB : 5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 5.5.2 (a) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial</b>												
<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>												
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kab./Kota	2.08.03.2.02.01	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab./Kota	Dirainya penghargaan APE	utama	madya		1.539.088,00	1.298.600,00	APBD	Kabupaten Badung	DP2KBP3A
<b>Indikator 2.3.1.(a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/ kehutanan</b>												
<b>3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>												
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen	3 Dokumen	0		384.876.846,00	16.676.410,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perikanan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
				I	II							
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		3.25.03.2.01.01	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	16 Unit	8		58.147.946,00	824.100,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perikanan
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	orang	60 orang	20		50.166.808,00	6.722.600,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perikanan
		3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	kelompok	56 kelompok	0		4.188.904,00	2.026.900,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perikanan
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	2 Layanan	1		5.663.279,00	3.382.588,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perikanan
<b>Indikator 2.3.1.(a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/ kehutanan</b>												
<b>3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>												
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	33 Kelompok	10		47.460.481,00	250.000,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perikanan
		3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	29 Kelompok	19		4.133.783,00	1.813.000,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perikanan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	2 Kelompok	1		456.368.424,00	214.925.364,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumenn	2 Dokumen	1		225.806.968,00	20.281.396,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perikanan
		3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit BBI	2 Unit BBI	0		418.670.394,00	99.472.984,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perikanan
		3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumenn	1 Dokumen	0		54.955.614,00	28.703.780,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perikanan
		3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	orang	50 orang	25		330.143.179,00	0,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perikanan
<b>Indikator 2.3.1.(a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/ kehutanan</b>												
<b>3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>												
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	3 Dokumen	1		28.913.173	18.626.150	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perikanan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)			
			2023									
			I	II								
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
Indikator 2.3.1.(a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/ kehutanan												
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN												
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah	ton	19436,89 ton	8900		324.198.468	63.394.720	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perikanan
<b>INDIKATOR TPB : 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.5.2(a) Persentase Setengah Pengangguran</b>												
<b>INDIKATOR TPB : Persentase Tingkat Ketepatan Kualitas dan Kuantitas Informasi Data</b>												
<b>INDIKATOR TPB : Persentase Calon Tenaga Kerja/ tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi serta Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri dan Luar Negeri</b>												
2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja												
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	orang	215	142		43.912.060,00	23.358.880,00	APBD	Kabupaten Badung	Disperinaker
		2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	LPK	43	23		67.391.989,00	35.355.980,00	APBD	Kabupaten Badung	Disperinaker
<b>INDIKATOR TPB : 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan</b>												
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja												
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	orang	15	0		248.729.271,00	2.002.800,00	APBD	Kabupaten Badung	Disperinaker
2.07.04.2.03	Pengelola Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	orang	1300	290		247.108.530,00	124.780.280,00	APBD	Kabupaten Badung	Disperinaker
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang okasi Kerja dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	IMTA	130	36		166.781.265,00	83.325.820,00	APBD	Kabupaten Badung	Disperinaker





**PILAR 2: PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4) 2023		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)			
			I	II								
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.3.1(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.</b>												
2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	600	300		330.019.288,00	155.537.662,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
<b>INDIKATOR 8.4.1 : Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan</b>												
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	100	3,17		874.185.865,00	874.185.865,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pertanian dan Pangan
		2.09.03.2.01.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2	0		535.622.534,00	431.232.556,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Ton	15	0		162.885.000,00	0	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok	12	0		369.795.716,00	316.246.525,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>											
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	1	0	5.815.590,00	2.861.400,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	4.805.485,00	0	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pertanian dan Pangan
<b>2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>											
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	1	0	16.476.720,00	0	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pertanian dan Pangan
		2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	12.940.504,00	0	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pertanian dan Pangan
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.</b>											
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1 (a) Jumlah Wisatawan Mancanegara</b>											
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1(b) Jumlah perjalanan yang dilakukan penduduk Indonesia menurut provinsi asal</b>											
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.</b>											
<b>3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata</b>											
3.26.03.1.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	12	6	761.610.191,00	679.931.100,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pariwisata

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
		3.26.03.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	12	6		4.429.931.939,00	3.848.700.410,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pariwisata
		3.26.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	12	6		153.740.764,00	11.531.700,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pariwisata
<b>INDIKATOR 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri</b>												
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA												
2.13.02.2.01.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Desa	1	0		14.444.856	2.073.500	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												
2.13.04.2.01.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	46	22		1.159.551.083	583.267.893	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	46	20		19.227.660	6.633.500	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	46	30		467.906.678	42.680.530	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dokumen	46	36		178.883.802	60.238.833	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	46	20		120.552.138	120.552.138	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	46	46		184.169.709	107.196.750	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
				I		II						
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	1	1		96.354.860	68.927.910	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	4	2		254.214.224	59.592.250	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	46	20		21.394.328	14.533.160	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	0		2.537.512.173	532.461.657	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.</b>												
<b>INDIKATOR 17.1.1(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.</b>												
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
5.02.04.2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	4		172.244.162,00	37.513.222,00	APBD	Kabupaten Badung	Badan Pendapatan Daerah



**PILAR 3: PEMBANGUNAN LINGKUNGAN**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4) 2023		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (7)		
			I	II							
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>											
<b>INDIKATOR 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</b>											
<b>INDIKATOR 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.</b>											
<b>INDIKATOR 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</b>											
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
1.02.05.02.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif tingkat Daerah kabupaten/Kota	1.02.05.02.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	2	0	325.742.758,00	114.653.400,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	2	1	509.315.549,00	6.867.500,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
<b>INDIKATOR 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).</b>											
1.02.05 PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
1.02.05.02.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif tingkat Daerah kabupaten/Kota	1.02.05.02.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	2	0	325.742.758,00	114.653.400,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	2	1	509.315.549,00	6.867.500,00	APBD	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Badung
1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Paket	2	2	351.588.095,00	314.124.741,00	APBD	Desa Pecatu	Dinas PUPR

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		1.03.03.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Paket	1	0		98.238.897,00	97.858.773,00	APBD	Desa Pecatu	Dinas PUPR
		1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Paket	1	0		3.628.481.920,00	3.091.647.278,00	APBD	Desa Pecatu	Dinas PUPR
<b>INDIKATOR 11.2.1(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik</b>												
<b>INDIKATOR 11.2.1(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum</b>												
<b>2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>												
2.15.02.2.08	Audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Laporan	13	7		13.253.493,00	11.999.500,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.08	Audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	12	6		1.987.763,00	1.757.500,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Perhubungan
<b>11.6.1(b) Persentase Sampah Nasional Yang Terkelola</b>												
<b>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>												
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Ton	27%	15,87		245.096.360,00	112.501.272,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Persentase	72%	31,80		108.216.292.524,00	37.771.706.577,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok	18	3		81.026.061,00	77.428.800,00	APBD	Pura Kahyangan Jagat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
<b>11.7.1.(a) Proforsi Ruang Terbuka Perkotaan Untuk Semua</b>												
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)												
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	10,689519	10,68952		14.332.712.518,00	7.195.578.109,00	APBD	6 Kecamatan di Kabupaten Badung (Data terlampir)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

**PILAR 4: PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)		
				2023								
				I	II							
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR. Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)</b>												
8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan												
8.01.02.2.01	(Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)	8.01.02.2.01.03	(Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan)	Orang	100	12		3.896.837.542,00	477.105.303,00	APBD	Kabupaten Badung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	2	1		1.506.142,00	536.700,00	APBD	Kabupaten Badung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>INDIKATOR. Persentase Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>												
8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
8.01.03.2.01	(Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik)	8.01.03.2.01.03	(Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah)	Orang	240	0		62.289.440.822,00	3.829.474.296,00	APBD Kab. Badung	Kabupaten Badung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)		
				2023								
				I	II							
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya, Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelmbagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	6	4		8.485.167,00	4.462.300,00	APBD	Kabupaten Badung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>INDIKATOR. Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>												
8.01.04 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)		
				2023								
				I	II							
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
8.01.04.2.01	(Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan)	8.01.04.2.01.05	(Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah)	Laporan	4	0		4.084.344,00	-	APBD	Kabupaten Badung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>INDIKATOR. Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>												
8.01.05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya												
8.01.05.2.01	(Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya)	8.01.05.2.01.03	(Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah)	Orang	185	137		956.710.499,00	29.599.500,00	APBD	Kabupaten Badung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Kordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1200	598		1.569.120.317,00	813.688.900,00	APBD	Kabupaten Badung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>INDIKATOR. Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial</b>												
8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Kordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Orang	300	176		652.555.599,00	21.445.000,00	APBD	Kabupaten Badung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1		379.730.283,00	127.331.000,00	APBD	Kabupaten Badung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>INDIKATOR TPB :1.5.3 (b) Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.</b>												
1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)		
				2023								
				I	II							
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0,5	0	12.395.927.784,00	5.817.655.319,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan	12	12	0	43.994.844,00	42.017.700,00	APBD	Kabupaten Badung	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung
<b>INDIKATOR 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)</b>												
4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan												
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	60	15		240.471.582,00	203.705.464,00	APBD	Kelurahan Sempidi Kabupaten Badung	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Badung
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Dokumen	1,00	0		153.304.933,00	77.571.415,00	APBD	Kelurahan Sempidi Kabupaten Badung	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Badung



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
		4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	55,00	55		38.753.337,00	32.445.847,00	APBD	Kelurahan Sempidi Kabupaten Badung	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Badung
6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan												
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	9	4		31.820.861,00	18.324.572,00	APBD	Kabupaten Badung	Inspektorat
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	6	3		37.701.857,00	7.663.214,00	APBD	Kabupaten Badung	Inspektorat
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Laporan	10	5		28.875.484,00	14.722.300,00	APBD	Kabupaten Badung	Inspektorat
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan	3	2		17.343.550,00	12.902.200,00	APBD	Kabupaten Badung	Inspektorat
		6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Laporan	8	4		28.603.886,00	6.406.000,00	APBD	Kabupaten Badung	Inspektorat
		6.01.02.2.01.06	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	2	0		11.975.937,00	4.416.330,00	APBD	Kabupaten Badung	Inspektorat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	8	2		367.832.770,00	31.743.395,00	APBD	Kabupaten Badung	Inspektorat
<b>Indikator 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP <math>\geq</math> B</b>												
<b>Indikator 16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB <math>\geq</math> B</b>												
4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota												
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	10	4		884.098.423,00	48.685.826,00	APBD	Kabupaten Badung	Bagian Organisasi Setda
<b>Indikator 16.6.2 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.</b>												
<b>Indikator 16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.</b>												
4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota												
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1	-		114.399.410,00	25.848.790,00	APBD	Kabupaten Badung	Bagian Organisasi Setda
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1	-		30.562.220,00	250.000,00	APBD	Kabupaten Badung	Bagian Organisasi Setda

**PILAR 4: PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)</b>												
<b>2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAAN PENDUDUK</b>												
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2000 Dokumen	96.360.700	-	150.000.000	-	BKK	Kota Denpasar	Disdukcapil
		2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1 Laporan	24.682.900	-	66.298.071	-	APBD	Kota Denpasar	Disdukcapil
<b>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>												
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1 Laporan	22.398.300	-	27.750.289	-	APBD	Kota Denpasar	Disdukcapil
<b>2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>												
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dokumen	6 Dokumen	23.876.400	-	35.376.731	-	APBD	Kota Denpasar	Disdukcapil
		2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	3 Dokumen	6.192.500	-	10.917.219	-	APBD	Kota Denpasar	Disdukcapil
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Desa/Kelurahan	43 Desa/Kelurahan	2.850.000	-	58.804.850	-	APBD	Kota Denpasar	Disdukcapil

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)			
			2023									
			I	II								
<b>INDIKATOR 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi</b>												
<b>INDIKATOR 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil</b>												
<b>INDIKATOR 16.7.2.(c) Indeks Hak-Hak Politik</b>												
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK												
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Orang	70	70	0	2.099.762.800,00	2.099.762.800,00	APBD	Kota Denpasar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

<b>INDIKATOR 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.</b>									
<b>INDIKATOR 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan</b>									
<b>INDIKATOR 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun</b>									
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	dokumen	3	1		149.500.000	19.800.000	DAK NON FISIK	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan kabupaten/ Kota	layanan	100	50		171.286.386	46.877.100	DAK NON FISIK	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	2	2		59.729.865	1.922.175	APBD	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar

**INDIKATOR 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

**INDIKATOR 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)**

**2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	dokumen	7	5		516.994.450	311.705.850	APBD	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar
--------------	--	-----------------	--	---------	---	---	--	-------------	-------------	------	---------------	--

**INDIKATOR 16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan**

**2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjuan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	layanan	100	21		175.553.614	5.156.000	DAK NON FISIK	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar

# FORMULIR REALISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN: KOTA DENPASAR

## TAHUN ANGGARAN 2023

### PILAR 1: PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)			
			2023									
			I	II								
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</b>												
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban</b>												
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1. (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.</b>												
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1. (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</b>												
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
1.02.02.2.01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	17051	7830	0	33.150.884,00	-	Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Denbar	Orang	294	128	0	11.560.000,00	3.520.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Denbar	Orang	889	357	0	32.860.000,00	12.260.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Dentim	Orang	648	392	0	56.460.000,00	24.140.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Dentim	Orang	230	115	0	55.480.000,00	16.740.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Densel	Orang	62	26	0	2.280.000,00	940.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Densel	Orang	373	263	0	13.050.000,00	5.450.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk III Densel	Orang	1344	390	0	53.460.000,00	16.690.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk IV Densel	Orang	233	87	0	9.120.000,00	4.080.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Denut	Orang	200	148	0	27.180.000,00	9.150.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Denut	Orang	175	51	0	6.410.000,00	1.820.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk III Denut	Orang	323	194	0	34.680.000,00	13.800.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Orang	732987	19011	0	2.235.472.220,00	251.286.000,00	Pajak Rokok dan DAU Kesehatan	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Denbar	Orang	76	12	0	3.040.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Denbar	Orang	4934	1710	0	83.060.000,00	21.680.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Dentim	Orang	180	97	0	14.400.000,00	4.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Dentim	Orang	31204	13000	0	2.800.000,00	720.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Densel	Orang	1190	914	0	36.600.000,00	10.560.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk III Densel	Orang	70	16	0	2.800.000,00	640.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Denut	Orang	5000	300	0	6.200.000,00	440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Denut	Orang	212	28	0	8.480.000,00	1.120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk III Denut	Orang	191	153	0	7.640.000,00	5.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	16332	7454	0	271.802.450,00	70.440.000,00	Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap</b>												
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
1.02.02.2.01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	54424	31004		183.112.213,00	27.000.000,00	Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Denbar	Orang	49	30		15.920.000,00	5.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Denbar	Orang	1404	471		57.060.000,00	9.160.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Dentim	Orang	8	2		3.200.000,00	480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Dentim	Orang	120	50		14.400.000,00	2.920.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Densel	Orang	505	108		7.920.000,00	2.880.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk III Densel	Orang	228	96		9.120.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk IV Densel	Orang	126	56		5.040.000,00	2.240.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Denut	Orang	100	50		6.740.000,00	1.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Denut	Orang	406	16		16.240.000,00	640.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk III Denut	Orang	326	184		26.080.000,00	10.080.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara

**INDIKATOR TPB: 1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	6	4,2	0	398.170.000,00	-	PKB	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Denbar	Dokumen	376	188	0	15.040.000,00	4.400.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Denbar	Dokumen	35	18	0	16.480.000,00	5.440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Dentim	Dokumen	7	5	0	17.200.000,00	5.360.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Dentim	Dokumen	31	10	0	17.680.000,00	5.360.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Densel	Dokumen	12	4	0	1.560.000,00	560.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Densel	Dokumen	51	27	0	13.040.000,00	4.160.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk III Densel	Dokumen	84	48	0	3.360.000,00	1.120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk IV Densel	Dokumen	21	10	0	10.080.000,00	4.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Denut	Dokumen	12	6	0	6.800.000,00	1.680.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Denut	Dokumen	532	108	0	21.280.000,00	4.320.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk III Denut	Dokumen	243	136	0	19.440.000,00	7.040.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	0,02		120.515.000,00	2.500.000,00	PKB	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (e) Persentase RT yg memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</b>												
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	6	4,2	0	398.170.000,00	-	PKB	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Denbar	Dokumen	376	188	0	15.040.000,00	4.400.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Denbar	Dokumen	35	18	0	16.480.000,00	5.440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Dentim	Dokumen	7	5	0	17.200.000,00	5.360.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Dentim	Dokumen	31	10	0	17.680.000,00	5.360.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Densel	Dokumen	12	4	0	1.560.000,00	560.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Densel	Dokumen	51	27	0	13.040.000,00	4.160.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk III Densel	Dokumen	84	48	0	3.360.000,00	1.120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk IV Densel	Dokumen	21	10	0	10.080.000,00	4.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Denut	Dokumen	12	6	0	6.800.000,00	1.680.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Denut	Dokumen	532	108	0	21.280.000,00	4.320.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk III Denut	Dokumen	243	136	0	19.440.000,00	7.040.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	0,02		120.515.000,00	2.500.000,00	PKB	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar

**INDIKATOR TPB 1 :1.4.1 (j) Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran**

**INDIKATOR TPB :1.5.1\* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.**

**INDIKATOR TPB 1 : 1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.**

**INDIKATOR TPB 1.5.1. (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.**

**INDIKATOR TPB 1.5.1. (c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.**

**INDIKATOR TPB 1 : 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.**

**INDIKATOR TPB 1 : 1.5.3 (b) Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.**

**Indikator TPB 1: 2.1.1.\* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)**

**INDIKATOR TPB: 2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita**

**INDIKATOR TPB: 2.2.1\* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita**

**INDIKATOR TPB: 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta**

**INDIKATOR TPB: 2.2.2\* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun**

**1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
1.02.02.2.01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Orang	732987	19011	0	2.235.472.220,00	251.286.000,00	Pajak Rokok dan DAU Kesehatan	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Denbar	Orang	76	12	0	3.040.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Denbar	Orang	4934	1710	0	83.060.000,00	21.680.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Dentim	Orang	180	97	0	14.400.000,00	4.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Dentim	Orang	31204	13000	0	2.800.000,00	720.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Densel	Orang	1190	914	0	36.600.000,00	10.560.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk III Densel	Orang	70	16	0	2.800.000,00	640.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Denut	Orang	5000	300	0	6.200.000,00	440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Denut	Orang	212	28	0	8.480.000,00	1.120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk III Denut	Orang	191	153	0	7.640.000,00	5.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	54424	31004		183.112.213,00	27.000.000,00	Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Denbar	Orang	49	30		15.920.000,00	5.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Denbar	Orang	1404	471		57.060.000,00	9.160.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Dentim	Orang	8	2		3.200.000,00	480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Dentim	Orang	120	50		14.400.000,00	2.920.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Densel	Orang	505	108		7.920.000,00	2.880.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk III Densel	Orang	228	96		9.120.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk IV Densel	Orang	126	56		5.040.000,00	2.240.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Denut	Orang	100	50		6.740.000,00	1.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Denut	Orang	406	16		16.240.000,00	640.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.14	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk III Denut	Orang	326	184		26.080.000,00	10.080.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	16513	7439	0	92.701.200,00	-	Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	11	6	0	193.016.440,00	17.900.000,00	BOK dan Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Denbar	Dokumen	696	81	0	27.240.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Denbar	Dokumen	169	101	0	9.860.000,00	6.270.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Dentim	Dokumen	4	2	0	23.960.000,00	5.440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Dentim	Dokumen	76	31	0	139.905.000,00	53.155.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Densel	Dokumen	12	4	0	23.760.000,00	8.670.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Densel	Dokumen	26	15	0	19.860.000,00	5.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk III Densel	Dokumen	1721	282	0	32.815.000,00	5.340.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk IV Densel	Dokumen	3	3	0	1.410.000,00	1.410.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Denut	Dokumen	12	7	0	55.299.970,00	12.120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Denut	Dokumen	468	119	0	18.720.000,00	4.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk III Denut	Dokumen	274	214	0	10.820.000,00	5.140.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	6	4,2	0	398.170.000,00	-	PKB	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Denbar	Dokumen	376	188	0	15.040.000,00	4.400.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Denbar	Dokumen	35	18	0	16.480.000,00	5.440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Dentim	Dokumen	7	5	0	17.200.000,00	5.360.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Dentim	Dokumen	31	10	0	17.680.000,00	5.360.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Densel	Dokumen	12	4	0	1.560.000,00	560.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Densel	Dokumen	51	27	0	13.040.000,00	4.160.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk III Densel	Dokumen	84	48	0	3.360.000,00	1.120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk IV Densel	Dokumen	21	10	0	10.080.000,00	4.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Denut	Dokumen	12	6	0	6.800.000,00	1.680.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Denut	Dokumen	532	108	0	21.280.000,00	4.320.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk III Denut	Dokumen	243	136	0	19.440.000,00	7.040.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	6	4	0	42.850.685.900,00	16.187.853.300,00	Dau Bidang Kesehatan, PAD, Pajak Rokok, BKK	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	40	5		302.984.606,00	19.800.000,00	BOK dan Pajak rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Denbar	Dokumen	4336	1142		68.440.000,00	19.975.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Denbar	Dokumen	12	4		125.882.500,00	43.843.550,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Dentim	Dokumen	6	3		235.284.080,00	46.190.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Dentim	Dokumen	2	0		6.450.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Densel	Dokumen	12	4		210.090.000,00	99.100.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Densel	Dokumen	65	34		137.970.000,00	48.580.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk III Densel	Dokumen	123	123		1.920.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Denut	Dokumen	12	0		23.520.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Denut	Dokumen	1553	460		49.900.000,00	17.140.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk III Denut	Dokumen	2904	1464		61.950.000,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.05.2.03.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	24	6	0	734.419.638,00	6.000.000,00	DAK BPOM, Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis & Supervisi Pengembangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	11	0	0	475.968.657,00	6.000.000,00	BOK, Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Denbar	Dokumen	30	0	0	12.240.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Denbar	Dokumen	3	0	0	13.500.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	2	0	0	12.600.000,00	-	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	4	12	0	8.400.000,00	-	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	21	64	0	23.995.000,00	8.000.000,00	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	136	2	0	12.670.000,00	3.000.000,00	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk IV Densel	Dokumen	3	6	0	3.968.303,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Denut	Dokumen	12	211	0	11.880.000,00	3.960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	331	240	0	11.580.000,00	6.780.000,00	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk III Denut	Dokumen	480		0	16.320.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
<b>INDIKATOR 2.5.1.* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 3.1.1* Angka Kematian Ibu</b>												
<b>1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
1.02.02.2.01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	17051	7830	0	33.150.884,00	-	Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Denbar	Orang	294	128	0	11.560.000,00	3.520.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Denbar	Orang	889	357	0	32.860.000,00	12.260.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Dentim	Orang	648	392	0	56.460.000,00	24.140.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Dentim	Orang	230	115	0	55.480.000,00	16.740.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Densel	Orang	62	26	0	2.280.000,00	940.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Densel	Orang	373	263	0	13.050.000,00	5.450.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk III Densel	Orang	1344	390	0	53.460.000,00	16.690.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk IV Densel	Orang	233	87	0	9.120.000,00	4.080.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Denut	Orang	200	148	0	27.180.000,00	9.150.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Denut	Orang	175	51	0	6.410.000,00	1.820.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk III Denut	Orang	323	194	0	34.680.000,00	13.800.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	16332	7454	0	271.802.450,00	70.440.000,00	Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Orang	732987	19011	0	2.235.472.220,00	251.286.000,00	Pajak Rokok dan DAU Kesehatan	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Denbar	Orang	76	12	0	3.040.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Denbar	Orang	4934	1710	0	83.060.000,00	21.680.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Dentim	Orang	180	97	0	14.400.000,00	4.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Dentim	Orang	31204	13000	0	2.800.000,00	720.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Densel	Orang	1190	914	0	36.600.000,00	10.560.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk III Densel	Orang	70	16	0	2.800.000,00	640.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Denut	Orang	5000	300	0	6.200.000,00	440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Denut	Orang	212	28	0	8.480.000,00	1.120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk III Denut	Orang	191	153	0	7.640.000,00	5.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	11	6	0	193.016.440,00	17.900.000,00	BOK dan Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Denbar	Dokumen	696	81	0	27.240.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Denbar	Dokumen	169	101	0	9.860.000,00	6.270.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Dentim	Dokumen	4	2	0	23.960.000,00	5.440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Dentim	Dokumen	76	31	0	139.905.000,00	53.155.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Densel	Dokumen	12	4	0	23.760.000,00	8.670.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Densel	Dokumen	26	15	0	19.860.000,00	5.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk III Densel	Dokumen	1721	282	0	32.815.000,00	5.340.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk IV Densel	Dokumen	3	3	0	1.410.000,00	1.410.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Denut	Dokumen	12	7	0	55.299.970,00	12.120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Denut	Dokumen	468	119	0	18.720.000,00	4.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk III Denut	Dokumen	274	214	0	10.820.000,00	5.140.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	6	4,2	0	398.170.000,00	-	PKB	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Denbar	Dokumen	376	188	0	15.040.000,00	4.400.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Denbar	Dokumen	35	18	0	16.480.000,00	5.440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Dentim	Dokumen	7	5	0	17.200.000,00	5.360.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Dentim	Dokumen	31	10	0	17.680.000,00	5.360.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Densel	Dokumen	12	4	0	1.560.000,00	560.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Densel	Dokumen	51	27	0	13.040.000,00	4.160.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk III Densel	Dokumen	84	48	0	3.360.000,00	1.120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk IV Densel	Dokumen	21	10	0	10.080.000,00	4.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Denut	Dokumen	12	6	0	6.800.000,00	1.680.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00	Pengelolaan pelayanan	Dokumen	532	108	0	21.280.000,00	4.320.000,00	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas
		1.02.1.02.0.00.00	Pengelolaan pelayanan	Dokumen	243	136	0	19.440.000,00	7.040.000,00	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	40	5		302.984.606,00	19.800.000,00	BOK dan Pajak rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Denbar	Dokumen	4336	1142		68.440.000,00	19.975.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Denbar	Dokumen	12	4		125.882.500,00	43.843.550,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Dentim	Dokumen	6	3		235.284.080,00	46.190.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Dentim	Dokumen	2	0		6.450.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Densel	Dokumen	12	4		210.090.000,00	99.100.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Densel	Dokumen	65	34		137.970.000,00	48.580.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk III Densel	Dokumen	123	123		1.920.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Denut	Dokumen	12	0		23.520.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Denut	Dokumen	1553	460		49.900.000,00	17.140.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk III Denut	Dokumen	2904	1464		61.950.000,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas I Dentim	Dokumen	28	10		920.450.000,00	283.067.966,00	JKN dan BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas II Dentim	Dokumen	24	12		643.340.000,00	93.408.827,00	JKN dan BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas I Denbar	Dokumen	24	15		762.620.640,00	143.967.331,00	JKN dan BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas II Denbar	Dokumen	24	12		814.368.560,00	150.740.792,00	JKN dan BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas I Densel	Dokumen	24	12		514.521.280,00	222.787.085,00	JKN dan BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas II Densel	Dokumen	24	12		474.907.320,00	152.162.206,00	JKN dan BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas III Densel	Dokumen	24	12		308.115.680,00	75.320.180,00	JKN dan BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas IV Densel	Dokumen	24	8		472.086.320,00	129.587.018,00	JKN dan BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas I Denut	Dokumen	24	12		607.617.080,00	119.828.601,00	JKN dan BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas II Denut	Dokumen	1088	64		578.896.840,00	239.899.622,00	JKN dan BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas III Denut	Dokumen	24	12		826.419.480,00	138.804.980,00	JKN dan BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	6	4	0	42.850.685.900,00	16.187.853.300,00	Dau Bidang Kesehatan, PAD, Pajak Rokok, BKK	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.05.2.03.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	24	6	0	734.419.638,00	6.000.000,00	DAK BPOM, Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis & Supervisi Pengembangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	11	0	0	475.968.657,00	6.000.000,00	BOK, Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	30	0	0	12.240.000,00	-	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Denbar	Dokumen	3	0	0	13.500.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Dentim	Dokumen	2	0	0	12.600.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	4	12	0	8.400.000,00	-	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Densel	Dokumen	21	64	0	23.995.000,00	8.000.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk III Densel	Dokumen	136	2	0	12.670.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	3	6	0	3.968.303,00	-	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Denut	Dokumen	12	211	0	11.880.000,00	3.960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Denut	Dokumen	331	240	0	11.580.000,00	6.780.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	480		0	16.320.000,00	-	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas

**INDIKATOR TPB : 3.1.2 \* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya terakhir ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih**

**INDIKATOR TPB : 3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan**

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
1.02.02.2.01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	17051	7830	0	33.150.884,00	-	Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Denbar	Orang	294	128	0	11.560.000,00	3.520.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Denbar	Orang	889	357	0	32.860.000,00	12.260.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Dentim	Orang	648	392	0	56.460.000,00	24.140.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Dentim	Orang	230	115	0	55.480.000,00	16.740.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Densel	Orang	62	26	0	2.280.000,00	940.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Densel	Orang	373	263	0	13.050.000,00	5.450.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk III Densel	Orang	1344	390	0	53.460.000,00	16.690.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk IV Densel	Orang	233	87	0	9.120.000,00	4.080.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Denut	Orang	200	148	0	27.180.000,00	9.150.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Denut	Orang	175	51	0	6.410.000,00	1.820.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.01.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk III Denut	Orang	323	194	0	34.680.000,00	13.800.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	16332	7454	0	271.802.450,00	70.440.000,00	Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Orang	732987	19011	0	2.235.472.220,00	251.286.000,00	Pajak Rokok dan DAU Kesehatan	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Denbar	Orang	76	12	0	3.040.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Denbar	Orang	4934	1710	0	83.060.000,00	21.680.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Dentim	Orang	180	97	0	14.400.000,00	4.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Dentim	Orang	31204	13000	0	2.800.000,00	720.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Densel	Orang	1190	914	0	36.600.000,00	10.560.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk III Densel	Orang	70	16	0	2.800.000,00	640.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Denut	Orang	5000	300	0	6.200.000,00	440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Denut	Orang	212	28	0	8.480.000,00	1.120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk III Denut	Orang	191	153	0	7.640.000,00	5.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
<b>INDIKATOR TPB : 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup</b>												
<b>1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
1.02.02.2.01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	16513	7439	0	92.701.200,00	-	Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	54424	31004		183.112.213,00	27.000.000,00	Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan pelayanan	Orang	49	30		15.920.000,00	5.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Denbar	Orang	1404	471		57.060.000,00	9.160.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Dentim	Orang	8	2		3.200.000,00	480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Dentim	Orang	120	50		14.400.000,00	2.920.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Densel	Orang	505	108		7.920.000,00	2.880.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk III Densel	Orang	228	96		9.120.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk IV Densel	Orang	126	56		5.040.000,00	2.240.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Denut	Orang	100	50		6.740.000,00	1.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Denut	Orang	406	16		16.240.000,00	640.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.14	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk III Denut	Orang	326	184		26.080.000,00	10.080.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	11	6	0	193.016.440,00	17.900.000,00	BOK dan Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Denbar	Dokumen	696	81	0	27.240.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Denbar	Dokumen	169	101	0	9.860.000,00	6.270.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Dentim	Dokumen	4	2	0	23.960.000,00	5.440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Dentim	Dokumen	76	31	0	139.905.000,00	53.155.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Densel	Dokumen	12	4	0	23.760.000,00	8.670.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Densel	Dokumen	26	15	0	19.860.000,00	5.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk III Densel	Dokumen	1721	282	0	32.815.000,00	5.340.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk IV Densel	Dokumen	3	3	0	1.410.000,00	1.410.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Denut	Dokumen	12	7	0	55.299.970,00	12.120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Denut	Dokumen	468	119	0	18.720.000,00	4.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk III Denut	Dokumen	274	214	0	10.820.000,00	5.140.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	6	4,2	0	398.170.000,00	-	PKB	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Denbar	Dokumen	376	188	0	15.040.000,00	4.400.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Denbar	Dokumen	35	18	0	16.480.000,00	5.440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Dentim	Dokumen	7	5	0	17.200.000,00	5.360.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Dentim	Dokumen	31	10	0	17.680.000,00	5.360.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Densel	Dokumen	12	4	0	1.560.000,00	560.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Densel	Dokumen	51	27	0	13.040.000,00	4.160.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk III Densel	Dokumen	84	48	0	3.360.000,00	1.120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk IV Densel	Dokumen	21	10	0	10.080.000,00	4.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Denut	Dokumen	12	6	0	6.800.000,00	1.680.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Denut	Dokumen	532	108	0	21.280.000,00	4.320.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.17.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk III Denut	Dokumen	243	136	0	19.440.000,00	7.040.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	40	5		302.984.606,00	19.800.000,00	BOK dan Pajak rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
			Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Denbar	Dokumen	4336	1142		68.440.000,00	19.975.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
			Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Denbar	Dokumen	12	4		125.882.500,00	43.843.550,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
			Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Dentim	Dokumen	6	3		235.284.080,00	46.190.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
			Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Dentim	Dokumen	2	0		6.450.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
			Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Densel	Dokumen	12	4		210.090.000,00	99.100.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
			Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Densel	Dokumen	65	34		137.970.000,00	48.580.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
			Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk III Densel	Dokumen	123	123		1.920.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
			Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Denut	Dokumen	12	0		23.520.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
			Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Denut	Dokumen	1553	460		49.900.000,00	17.140.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
			Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk III Denut	Dokumen	2904	1464		61.950.000,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	6	4	0	42.850.685.900,00	16.187.853.300,00	Dau Bidang Kesehatan, PAD, Pajak Rokok, BKK	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.05.2.03.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	24	6	0	734.419.638,00	6.000.000,00	DAK BPOM, Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis & Supervisi Pengembangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	11	0	0	475.968.657,00	6.000.000,00	BOK, Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Denbar	Dokumen	30	0	0	12.240.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Denbar	Dokumen	3	0	0	13.500.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Dentim	Dokumen	4	12	0	8.400.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Densel	Dokumen	21	64	0	23.995.000,00	8.000.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Denbar	Dokumen	2	0	0	12.600.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	136	2	0	12.670.000,00	3.000.000,00	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk IV Densel	Dokumen	3	6	0	3.968.303,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Denut	Dokumen	12	211	0	11.880.000,00	3.960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	331	240	0	11.580.000,00	6.780.000,00	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk III Denut	Dokumen	480		0	16.320.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara

**INDIKATOR TPB: 3.2.2 (b) Persentase kab/kota yg mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi**

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
1.02.02.2.01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	54424	31004		183.112.213,00	27.000.000,00	Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Denbar	Orang	49	30		15.920.000,00	5.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan pelayanan	Orang	1404	471		57.060.000,00	9.160.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Dentim	Orang	8	2		3.200.000,00	480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Dentim	Orang	120	50		14.400.000,00	2.920.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Densel	Orang	505	108		7.920.000,00	2.880.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk III Densel	Orang	228	96		9.120.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk IV Densel	Orang	126	56		5.040.000,00	2.240.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Denut	Orang	100	50		6.740.000,00	1.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Denut	Orang	406	16		16.240.000,00	640.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.14	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk III Denut	Orang	326	184		26.080.000,00	10.080.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis & Supervisi Pengembangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	11	0	0	475.968.657,00	6.000.000,00	BOK, Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Denbar	Dokumen	30	0	0	12.240.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Dentim	Dokumen	3	0	0	13.500.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Dentim	Dokumen	2	0	0	12.600.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Dentim	Dokumen	4	12	0	8.400.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk III Densel	Dokumen	21	64	0	23.995.000,00	8.000.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk IV Densel	Dokumen	136	2	0	12.670.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk IV Densel	Dokumen	3	6	0	3.968.303,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk IV Densel	Dokumen	12	211	0	11.880.000,00	3.960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Denut	Dokumen	331	240	0	11.580.000,00	6.780.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk III Denut	Dokumen	480		0	16.320.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.2.(a) Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.3(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5(a) Jumlah Kabupaten dengan eliminasi Kusta</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)</b>												
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Orang	732987	19011	0	2.235.472.220,00	251.286.000,00	Pajak Rokok dan DAU Kesehatan	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Denbar	Orang	76	12	0	3.040.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Denbar	Orang	4934	1710	0	83.060.000,00	21.680.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Dentim	Orang	180	97	0	14.400.000,00	4.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Dentim	Orang	31204	13000	0	2.800.000,00	720.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Densel	Orang	1190	914	0	36.600.000,00	10.560.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk III Densel	Orang	70	16	0	2.800.000,00	640.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Denut	Orang	5000	300	0	6.200.000,00	440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Denut	Orang	212	28	0	8.480.000,00	1.120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.06.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk III Denut	Orang	191	153	0	7.640.000,00	5.480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	11	6	0	193.016.440,00	17.900.000,00	BOK dan Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Denbar	Dokumen	696	81	0	27.240.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Denbar	Dokumen	169	101	0	9.860.000,00	6.270.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Dentim	Dokumen	4	2	0	23.960.000,00	5.440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Dentim	Dokumen	76	31	0	139.905.000,00	53.155.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Densel	Dokumen	12	4	0	23.760.000,00	8.670.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Densel	Dokumen	26	15	0	19.860.000,00	5.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk III Densel	Dokumen	1721	282	0	32.815.000,00	5.340.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk IV Densel	Dokumen	3	3	0	1.410.000,00	1.410.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Denut	Dokumen	12	7	0	55.299.970,00	12.120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Denut	Dokumen	468	119	0	18.720.000,00	4.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk III Denut	Dokumen	274	214	0	10.820.000,00	5.140.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	12	6	0	954.861.900,00	309.541.750,00	Pendapatan bagi hasil pajak rokok, DID, BOK, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.20.	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk I Denbar	Dokumen	730	70	0	29.200.000,00	1.920.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.20.	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk II Denbar	Dokumen	50	17	0	13.280.000,00	1.040.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.20.	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk I Dentim	Dokumen	5	3	0	29.680.000,00	4.320.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.20.	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk II Dentim	Dokumen	24	10	0	9.560.000,00	2.960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.20.	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk II Densel	Dokumen	10	0	0	1.200.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.20.	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk III Densel	Dokumen	80	28	0	3.200.000,00	960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.20.	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk IV Densel	Dokumen	10	3	0	800.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.20.	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk I Denut	Dokumen	12	2	0	4.440.000,00	560.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.20.	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk II Denut	Dokumen	967	10	0	38.680.000,00	400.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.20.	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk III Denut	Dokumen	44	20	0	1.760.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	11	6	0	11.379.119.424,00	5.761.830.406,00	PAD, Dana Alokasi Umum (DAU Kesehatan, Dana Insentif Daerah (DID), Pajak Rokok, BOK	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk I Denbar	Dokumen	6233	2680	0	254.720.000,00	70.680.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk II Denbar	Dokumen	99	31	0	75.200.950,00	30.440.950,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk I Dentim	Dokumen	18	11	0	85.840.000,00	24.520.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk II Dentim	Dokumen	93	28	0	75.000.000,00	19.980.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk I Densel	Dokumen	12	4	0	18.240.000,00	2.560.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk II Densel	Dokumen	83	48	0	75.565.000,00	18.995.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk III Densel	Dokumen	859	177	0	34.360.000,00	5.840.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk IV Densel	Dokumen	8	4	0	12.560.000,00	4.560.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk I Denut	Dokumen	60	30	0	94.460.000,00	29.880.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk II Denut	Dokumen	2587	767	0	103.480.000,00	49.520.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk III Denut	Dokumen	2635	1308	0	104.200.000,00	37.200.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan	Orang	27949	4371		733.159.117,00	292.839.713,00	PKB dan BBNKB	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk I Denbar	Orang	40	20		1.600.000,00	480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk II Denbar	Orang	312	123		12.480.000,00	3.960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk I Dentim	Orang	33	15		2.640.000,00	1.760.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk II Dentim	Orang	40	18		3.200.000,00	960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk I Densel	Orang	42	21		1.680.000,00	840.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk II Densel	Orang	66	24		2.640.000,00	960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk III Densel	Orang	72	13		2.880.000,00	840.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk IV Densel	Orang	1	1		40.000,00	40.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk I Denut	Orang	24	12		10.560.000,00	3.840.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk II Denut	Orang	75	11		3.000.000,00	440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk III Denut	Orang	15	8		1.800.000,00	960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	20587	11566		1.201.611.779,00	307.374.766,00	DID,Pajak Rokok, PAD	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk II Denbar	Orang	30	18		1.200.000,00	400.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk I Dentim	Orang	78	30		6.240.000,00	960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk II Dentim	Orang	100	25		1.120.000,00	160.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk III Densel	Orang	50	16		2.000.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk IV Densel	Orang	10	4		400.000,00	160.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk I Denut	Orang	20	10		8.800.000,00	3.200.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk III Denut	Orang	49	29		3.920.000,00	1.600.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Orang	16526	743		1.040.331.491,00	3.360.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Kesehatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Insentif Daerah (DID)	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk II Denbar	Orang	40	16		1.600.000,00	480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk I Dentim	Orang	33	15		2.640.000,00	960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk II Dentim	Orang	33	12		2.640.000,00	960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk II Densel	Orang	66	36		2.640.000,00	960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk III Densel	Orang	12	9		2.880.000,00	840.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk IV Densel	Orang	1	1		80.000,00	80.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk I Denut	Orang	33	21		3.960.000,00	1.440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk II Denut	Orang	36	12		1.440.000,00	480.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk III Denut	Orang	22	12		2.640.000,00	1.440.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Orang	24165	6053		1.893.038.547,00	256.453.367,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah (DID), BOK	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Orang	1	0		1.050.000,00	521.500,00	Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk I Denbar	Dokumen	6	0		240.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk I Dentim	Orang	1	0		40.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk II Dentim	Orang	1	0		520.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk II Densel	Orang	176	0		7.040.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk III Densel	Orang	54	26		2.160.000,00	640.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk IV Densel	Orang	2	0		80.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk I Denut	Orang	12	0		1.440.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	40	5		302.984.606,00	19.800.000,00	BOK dan Pajak rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Denbar	Dokumen	4336	1142		68.440.000,00	19.975.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Denbar	Dokumen	12	4		125.882.500,00	43.843.550,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Dentim	Dokumen	6	3		235.284.080,00	46.190.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Dentim	Dokumen	2	0		6.450.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Densel	Dokumen	12	4		210.090.000,00	99.100.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Densel	Dokumen	65	34		137.970.000,00	48.580.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk III Densel	Dokumen	123	123		1.920.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Denut	Dokumen	12	0		23.520.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Denut	Dokumen	1553	460		49.900.000,00	17.140.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk III Denut	Dokumen	2904	1464		61.950.000,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	6	4	0	42.850.685.900,00	16.187.853.300,00	Dau Bidang Kesehatan, PAD, Pajak Rokok, BKK	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.1.02.0.00.00 2.2.02.28.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Paket	20	0	0	800.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
1.02.05 PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.05.2.03.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	24	6	0	734.419.638,00	6.000.000,00	DAK BPOM, Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis & Supervisi Pengembangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	11	0	0	475.968.657,00	6.000.000,00	BOK, Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Denbar	Dokumen	30	0	0	12.240.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	3	0	0	13.500.000,00	-	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Dentim	Dokumen	2	0	0	12.600.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Dentim	Dokumen	4	12	0	8.400.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	21	64	0	23.995.000,00	8.000.000,00	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk III Densel	Dokumen	136	2	0	12.670.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk IV Densel	Dokumen	3	6	0	3.968.303,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Denut	Dokumen	12	211	0	11.880.000,00	3.960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Denut	Dokumen	331	240	0	11.580.000,00	6.780.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk III Denut	Dokumen	480		0	16.320.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)			
			2023									
			I	II								
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur &gt;=18 tahun</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur &gt;=18 tahun</b>												
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	195194	5265		153.916.000,00	20.722.400,00	Pajak Rokok dan Pajak Kendaraan Bermotor	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	14444	665		1.083.510.000,00	-	Pajak Rokok dan DAK Non Fisik	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Orang	41	30		406.983.000,00	300.000,00	Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk II Denbar	Orang	150	80		6.000.000,00	1.680.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk I Dentim	Orang	4	1		480.000,00	120.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan pelayanan	Orang	10915	4032		2.800.000,00	720.000,00	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan pelayanan	Orang	63	36		2.520.000,00	960.000,00	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk III Densel	Orang	22	15		1.000.000,00	400.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk IV Densel	Orang	28	14		1.120.000,00	560.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk I Denut	Orang	5016	0		5.880.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk III Denut	Orang	21	0		840.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	40	5		302.984.606,00	19.800.000,00	BOK dan Pajak rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Denbar	Dokumen	4336	1142		68.440.000,00	19.975.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Denbar	Dokumen	12	4		125.882.500,00	43.843.550,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Dentim	Dokumen	6	3		235.284.080,00	46.190.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Dentim	Dokumen	2	0		6.450.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Densel	Dokumen	12	4		210.090.000,00	99.100.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Densel	Dokumen	65	34		137.970.000,00	48.580.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk III Densel	Dokumen	123	123		1.920.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Denut	Dokumen	12	0		23.520.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Denut	Dokumen	1553	460		49.900.000,00	17.140.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Utara
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk III Denut	Dokumen	2904	1464		61.950.000,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.05.2.03.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	24	6	0	734.419.638,00	6.000.000,00	DAK BPOM, Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis & Supervisi Pengembangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	11	0	0	475.968.657,00	6.000.000,00	BOK, Pajak Rokok	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Denbar	Dokumen	30	0	0	12.240.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Denbar	Dokumen	3	0	0	13.500.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Barat
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Dentim	Dokumen	4	12	0	8.400.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Timur
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Dentim	Dokumen	2	0	0	12.600.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Barat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Densel	Dokumen	21	64	0	23.995.000,00	8.000.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	136	2	0	12.670.000,00	3.000.000,00	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk IV Densel	Dokumen	3	6	0	3.968.303,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Denut	Dokumen	12	211	0	11.880.000,00	3.960.000,00	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas I Denpasar Utara
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan	Dokumen	331	240	0	11.580.000,00	6.780.000,00	DAK Non	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk III Denut	Dokumen	480		0	16.320.000,00	-	DAK Non Fisik/BOK	Kota Denpasar	UPTD Puskesmas III Denpasar Utara
<b>INDIKATOR TPB: 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan</b>												
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	100	10		7.699.800,00		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Orang	44	0	0	3.190.000.000,00	-	PKB	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
		1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	8	-	-	90.460.750,00	-	BOK dan PKB	Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
<b>INDIKATOR TPB: 4.1.2.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 4.1.2. (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 5.2.2 (a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
<b>INDIKATOR TPB 5.5.2 : Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.</b>												
<b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>												
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	215	-	-	75.870.529.221	2.846.774.100	DAU & DID	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1	-	-	126.016.738	-	DAK Fisik	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1	-	-	275.368.713	-	DAK Fisik	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	5	-	-	2.403.620.587	3.294.500	DID & DAK Fisik	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang	7	-	-	1.310.154.948	2.043.000	DAU	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1	-	-	219.223.625	1.121.500	DID	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	2	-	-	511.845.032	3.169.500	DID	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1	-	-	161.486.500	-	DAU	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	215	-	215	399.026.945	398.316.500	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	3	-	-	693.979.177	1.860.500	DAU & DAK Fisik	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	167	-	167	181.200.822	60.600.500	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Orang	140	-	400	475.574.164	200.369.500	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	828	594	594	19.157.747.920	5.844.484.618	PAD	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	300	-	300	18.390.059	8.416.300	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana	Satuan	167	-	214	79.758.337.281	15.874.016.881	PAD & DAK	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan,
		1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	2	-	-	561.449.632	-	DAK Fisik	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1	-	-	20.145.000.000	-	DBH	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	2	-	-	716.884.632	-	DAK Fisik	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	8	-	-	1.506.919.138	-	DAK Fisik	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	2	-	-	49.292.230	-	DAK Fisik	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	2	-	-	436.000.000	-	DID	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	15	-	-	2.343.236.978	6.398.500	DID	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1	-	-	436.348.133	10.975.000	DAU	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	435	-	435	1.363.030.197	1.254.570.900	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	3	-	-	569.859.749	3.894.900	DAU	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Peserta Didik	15.000	-	15.000	405.552.743	27.262.250	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	870	-	270	363.051.008	11.710.000	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	281	156	156	6.503.086.195	1.529.297.817	PAD	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	100	-	-	4.722.511	817.000	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan	Satuan	85	-	-	57.740.605	-	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan,
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	15	-	68	44.142.238.100	115.315.450	PKB & DAK Non Fisik	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	1	-	-	200.177.760	-	DAU	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	3	-	-	228.261.746	258.000	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik	328	-	328	290.654.940	147.163.720	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	848	846	846	4.290.021.639	120.651.468	BBNKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	60	-	35	2.980.770	1.744.800	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	258	-	-	11.051.460.000	4.529.994.185	DAK Non Fisik	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Paket	8	-	-	120.893.744	-	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Paket	2	-	-	18.127.929	-	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik	344	-	-	49.647.108	-	PKB	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Satuan Pendidikan	11	-	-	3.040.700.000	419.260.880	DAK Non Fisik	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
<b>INDIKATOR PERSENTASE PENINGKATAN CAKUPAN KAPASITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR TIK</b>												
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA												
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase	100	50	50	2.715.801.220	2.586.194.719	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi; Pendapatan Asli Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
<b>INDIKATOR MASYARAKAT MEMEROLEH INFORMASI MENGENAI PEMBANGUNAN DAERAH</b>												
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
2.16.02.2.01	PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.02.2.01.05	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase	100	50	50	979.559.041	909.538.425	Pendapatan Asli Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
<b>INDIKATOR KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM BUKU PROFIL, PEMBANGUNAN SISTEM BANK DATA DI KOTA DENPASAR</b>												
<b>2.20.02 PROGRAM PENYELENGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>												
2.20.02.2.01	PENYELENGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	LAPORAN	1 Laporan	0	1	79.987.800	78.364.799	pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan/pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
<b>INDIKATOR TPB : 5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan</b>												
<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>												
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarustamaan Gendetr (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	perangkat daerah	36	36		88.599.650	76.613.600	APBD	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarustamaan Gendetr (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	perangkat daerah	36	0		76.794.950	840.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
<b>INDIKATOR TPB : 5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 5.2.2 (a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif</b>												
<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>												
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	0		93.449.130	9.867.500	APBD	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	layanan	100	21		175.553.614	5.156.000	DAK NON FISIK	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah kabupaten/Kota	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	20	0		101.660.000	17.791.894	DAK NON FISIK	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar
<b>INDIKATOR TPB : 5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah</b>												
<b>INDIKATOR TPB 5.5.2 : Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.</b>												
<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>												
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	dokumen	7	5		516.994.450	311.705.850	APBD	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar
<b>Indikator TPB 1: 2.1.1.* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)</b>												
2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan												
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	3.490.936	295.000	69.132.113	3.785.936	APBD	4 Kecamatan di Kota Denpasar	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
<b>INDIKATOR TPB: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita</b>												
2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1 Laporan	-	25.925.000	27.500.000	25.925.000	APBD	4 Kecamatan di Kota Denpasar (10 Lokus stunting)	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
<b>3.25.06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>												
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- orang dan - paket	- 300 orang dan - 1.000 paket	- 300	- 1.000	69.699.500	66.475.000	APBD II	Kota Denpasar	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Ton	35.525	17.760		15.156.002	7.231.395	APBD		Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
<b>INDIKATOR 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindung</b>												
<b>3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>												
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Ton	1.460	678,5		25.108.297	18.503.950	APBD		Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pebentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Ton	1.460	678,5		78.638.144	51.923.105	APBD		Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
Dst...												
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (e) Persentase RT yg memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</b>												
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Penyediaan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Paket	2	0	2	3.896.599.500,00	2.896.191.890,00	DAK Fisik - BAM	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Paket	1	0	1	1.174.212.250,00	1.069.693.585,00	DTU - DAU	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
<b>INDIKATOR: Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah</b>												
<b>5.02.04.1.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>												
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			1 Dokumen	52.100.000	0		52.100.000	0	APBD	Kota Denpasar	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Keb.Pajak			1 Dokumen	275.750.000	75.000.000		275.750.000	75.000.000	APBD	Kota Denpasar	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.1.01.11	Penagih Pajak Daerah			3 Dokumen	209.875.000	0		209.875.000	0	APBD	Kota Denpasar	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.1.01.12	Penyelesaian Kebaratan Pajak Daerah			1 Dokumen	3.150.000	0		3.150.000	0	APBD	Kota Denpasar	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.1.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			2 Dokumen	488.600.000	28.070.000		488.600.000	28.070.000	APBD	Kota Denpasar	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.15	Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah			1 Laporan	100.000.000	0		100.000.000	0	APBD	Kota Denpasar	Badan Pendapatan Daerah
<b>INDIKATOR TPB 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</b>												
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	9741	10004	58.900.275	8.550.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga	1742	2501	149.220.488	30.300.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
		1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	100	100	197.491.450	59.878.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang</b>											
<b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>											
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Orang	40	10	28.198.800	-	DID	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
		1.06.04.2.01.06	Pemberian	Orang	15	9	12.000.000	3.000.000	APBD	Kota	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.02.03	Penyediaan	Orang	16	16	69.120.000	-	DID	Kota	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	500	330		429.431.774	188.212.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
		1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Orang	3900	314		306.750.000	101.125.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	9741	10004		58.900.275	8.550.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga	1742	2501		149.220.488	30.300.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
		1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	100	100		197.491.450	59.878.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					2023						
					I	II					
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Orang	35		60.935.060	2.250.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1. (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.</b>											
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Orang	40	10	28.198.800	-	DID	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	15	9		12.000.000	3.000.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1. (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.</b>												
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	9741	10004		58.900.275	8.550.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga	1742	2501		149.220.488	30.300.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
<b>INDIKATOR TPB 1.5.1. (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.</b>												
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Orang	35			60.935.060	2.250.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
<b>INDIKATOR TPB 1.5.1. (c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.</b>												
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Orang	35			60.935.060	2.250.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar

**PILAR 2: PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)		
				2023								
				I	II							
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.5.2 (a) Persentase Setengah Pengangguran</b>												
2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja												
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	orang	180 Orang	-	330 orang	990.000.000	982.759.400	APBD	Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja												
2.07.04.2.03	Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Buku	75 Buku	-	75 Buku	203.950.000	198.726.130	APBD	Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
		2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Perusahaan	40 Perusahaan	-	40 Perusahaan	677.401.000	675.474.500	APBD	Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
2.07.04.2.04	Kegiatan Perlindungan PMI ( Pra dan Purna Penempatan ) di Daerah Kabupaten /Kota	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	orang	1.000 Orang	500 Orang	500 Orang	19.925.000	15.425.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
<b>INDIKATOR 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan</b>												
2.07.05 Program Hubungan Industrial												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					2023							
					I	II						
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Perusahaan	100 Perusahaan	50 Perusahaan	50 Perusahaan	224.705.000	212.800.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkara	35 Perkara	15 Perkara	20 Perkara	36.175.000	27.095.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
		2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Perusahaan	55 Perusahaan	55 Perusahaan	-	124.179.250	115.564.250	APBD	Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
<b>INDIKATOR TPB : 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.</b>												
3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri												
3.31.02.1.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	kali	36	19	17	74.628.800,00	9.952.600,00	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
		3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	IKM	170 IKM	80	90	356.034.400,00	347.139.702,00	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
3.30.05 Program Pengembangan Ekspor												
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Tedapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	3.30.05.2.01.01	Pameran Dagang Nasional	Kali	1 Kali	0	1	1.134.982.720	118.318.574	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
		3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	pelaku usaha	30 pelaku usaha	30	0	49.970.214	47.306.084	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

**INDIKATOR TPB : 8.3.1\* Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian, Berdasarkan Jenis Kelamin**

**INDIKATOR TPB : 8.3.1(b) Presentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian**

3.30.05 Program Pengembangan Ekspor

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Tedapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	3.30.05.2.01.01	Pameran Dagang Nasional	Kali	1 Kali	0	1	1.134.982.720	118.318.574	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
		3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	pelaku usaha	30 pelaku usaha	30	0	49.970.214	47.306.084	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

**INDIKATOR TPB : 9.2.1\* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.**

**INDIKATOR TPB : 9.2.1(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.**

3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

3.31.02.1.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	kali	36	19	17	74.628.800,00	9.952.600,00	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
		3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	IKM	170 IKM	80	90	356.034.400,00	347.139.702,00	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

**INDIKATOR 17.11.1(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas**

3.30.05 Program Pengembangan Ekspor

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Tedapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	3.30.05.2.01.01	Pameran Dagang Nasional	Kali	1 Kali	0	1	1.134.982.720	118.318.574	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
		3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	pelaku usaha	30 pelaku usaha	30	0	49.970.214	47.306.084	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
<b>Indikator TPB 1: 2.1.1.* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)</b>												
<b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>												
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	5 Laporan	0	0	19.940.123,00	7.939.490,00	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
		2.09.03.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	14 Dokumen	0	3 Dokumen	50.999.809,00	3.219.142,00	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
		2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Unit	2 Unit	1 Unit	0	102.100.045,00	28.522.388,00	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
<b>2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	4 Dokumen	0	0	21.220.149,00	1.182.500,00	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Kecamatan	4 Kecamatan	0	4 Kecamatan	7.154.089,00	3.428.290,00	APBD	4 Kecamatan di Kota Denpasar	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
		2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	202.181.051,00	4.082.230,00	APBD	Kota Denpasar	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
<b>INDIKATOR TPB : 8.3.1(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan</b>												
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA												
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket	2 Paket	2		77.300.000,00	0	APBD II	Kota Denpasar	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
Dst...												

**INDIKATOR TPB 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.**

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	9741	10004		58.900.275	8.550.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga	1742	2501		149.220.488	30.300.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar
		1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	100	100		197.491.450	59.878.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar

**INDIKATOR 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri**

**2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**

2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen						Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
					1	1		11.563.600	9.773.200			

**2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	27		27	72.532.950	71.735.800	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1		43.267.530	41.839.830	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
		2.13.04.2.01.09	Penyeleggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1		1	381.035.190	362.289.165	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.02	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1		1	127.219.420	118.078.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
					I	II					
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	2	2	139.693.750	128.695.750	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	5.867.600	5.598.200	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)	
					I	II						
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1		1	1.754.559.530	1.644.400.325	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintahan Daerah Provinsi	Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

### PILAR 3: PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (7)		
				2023								
				I	II							
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</b>												
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Penyediaan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Paket	2	0	2	3.896.599.500,00	2.896.191.890,00	DAK Fisik - BAM	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
<b>INDIKATOR 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.</b>												
<b>INDIKATOR 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.</b>												
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Paket	1	0	1	1.174.212.250,00	1.069.693.585,00	DTU - DAU	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
<b>INDIKATOR 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.</b>												
<b>INDIKATOR 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.</b>												
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	1.03.10.2.01.03	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Paket	2	0	2	359.241.150,00	257.219.506,00	PBH - PAD	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	KM	0,305	0	0,305	2.950.474.150,00	2.099.870.600,00	DTU - DAU, PAD	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
		1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	87	2.964,3	0	2.964,3	35.228.379.843,00	26.927.579.646,00	DAK Fisik - Bidang Jalan, PAD	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
		1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	KM	22	0	22	3.031.840.508,00	2.329.527.220,00	PBH - PAD	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
		1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jembatan	Buah	1	0	1	3.687.145.600,00	2.858.777.857,00	DTU - DAU, PAD	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
		1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Buah	10	0	10	101.150.000,00	99.240.000,00	DTU - DBH	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
<b>INDIKATOR11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.</b>												
<b>INDIKATOR11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).</b>												
<b>INDIKATOR11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP</b>												
<b>1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>												
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	1	4	1.324.250.000,00	1.200.679.895,00	PAD	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Laporan	1	0	1	134.950.000,00	130.536.600,00	PAD	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang dan Penataan Ruang	Pengawasan	240	70	170	293.800.000,00	269.435.000,00	PAD	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
		1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan	1	0	1	135.610.000,00	133.600.000,00	PAD	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
<b>INDIKATOR 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang</b>												
<b>1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Unit	9	2	7	21.089.495.000,00	2.781.267.668,00	DAK Fisik - Bidang Sanitasi	Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
<b>INDIKATOR TPB : 9.4.1* Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 9.4.1(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca.</b>												
<b>2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>												
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1 dokumen	0		72.450.513	3.253.080	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
<b>2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>												
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan ruang terbuka hijau	1 tahun	1 tahun	0		8.809.419.925	1.322.274.435	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
		2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1 tahun	1 tahun	0		8.589.121.509	3.309.688.550	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
<b>INDIKATOR 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku</b>												
<b>2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>												
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1 dokumen	0		72.450.513	3.253.080	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
<b>2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kab/kota	Sungai	10	10		322.408.109	27.431.751	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
<b>2.11.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>												
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	1 tahun	1 tahun	0		137.094.077	8.905.500	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	1 tahun	1 tahun	0		154.466.685	8.131.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
<b>INDIKATOR 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani</b>												
<b>2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>												
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1 dokumen	0		72.450.513	3.253.080	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
<b>2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	1 tahun	1 tahun	0		33.803.000.031	603.732.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SDA kab/kota	1 tahun	1 tahun	0		33.639.570.627	4.126.253.447	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
<b>INDIKATOR 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)</b>												
<b>2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>												
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1 dokumen	0		72.450.513	3.253.080	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
<b>2.11.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan/atau izin PPLH	1 tahun	1 tahun	0		137.094.077	8.905.500	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	1 tahun	1 tahun	0		154.466.685	8.131.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
<b>INDIKATOR 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang</b>												
<b>2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>												
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1 dokumen	0		72.450.513	3.253.080	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
<b>2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (7)
						I	II					
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	1 tahun	1 tahun	0		33.803.000.031	603.732.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SDA kab/kota	1 tahun	1 tahun	0		33.639.570.627	4.126.253.447	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
<b>INDIKATOR 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)</b>												
<b>2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>												
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1 dokumen	0		72.450.513	3.253.080	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
<b>2.11.04 Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)</b>												
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan ruang terbuka hijau	1 tahun	1 tahun	0		8.809.419.925	1.322.274.435	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
		2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	1 tahun	1 tahun	0		8.589.121.509	3.309.688.550	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
<b>2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>												
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.07	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Dokumen	1 dokumen	0		53.666.628	946.000	APBD	Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

# FORMULIR REALISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

## PILAR 1: PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
					2023						
					I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>											
<b>INDIKATOR 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</b>											
<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>											
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	500	250	440.090.345,00	82.090.476,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	4000	2000	242.521.393,00	98.118.475,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.</b>											
<b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>											
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	orang	400	65	312.072.027,00	45.658.995,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	orang	30	13	99.388.593,00	36.922.963,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.04	Pemberian Reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/ kota	orang	100	38	66.414.416,00	20.886.547,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	orang	100	45	96.289.424,00	42.033.766,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	orang	2031	65		6.226.240.088,00	52.631.965,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	orang	15	6		29.020.481,00	6.793.891,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	orang	200	70		55.043.608,00	18.540.133,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	orang	100	28		83.526.831,00	21.539.400,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	4000	2000		242.521.393,00	98.118.475,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	500	250		440.090.345,00	82.090.476,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial





Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1. (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.</b>												
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
1.06.04.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	orang	400	65		312.072.027,00	45.658.995,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	orang	30	13		99.388.593,00	36.922.963,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.04	Pemberian Reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/ kota	orang	100	38		66.414.416,00	20.886.547,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	100	45		96.289.424,00	42.033.766,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	orang	2031	65		6.226.240.088,00	52.631.965,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	orang	400	217		230.164.253,00	57.635.712,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1. (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.</b>												
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	4000	2000		242.521.393,00	98.118.475,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	500	250		440.090.345,00	82.090.476,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</b>												
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	11.009	3.500		54.260.000	16.700.000	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	10.630	5.776		978.440.000	133.659.000	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	10.508	3.311		6.800.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	orang	424.726	87.926		650.185.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	orang	389.915	71.169		164.645.000	12.376.000	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap</b>												
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	831	12791		6.800.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	19.342	7127		634.490.000,00	16.360.000,00	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan</b>												
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	20	3		6.800.000,00	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	0,5		444.951.000,00	47.533.000,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	133	34		164.342.104	-	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SPAM	3,00	1,44		211.833.140	75.111.740	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	PAM Desa	15,00	7,25		125.704.300	45.679.080	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (e) Persentase RT yg memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	20	3		6.800.000,00	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	0,5		444.951.000,00	47.533.000,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	133	34		164.342.104	-	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SPAM	3,00	1,44		211.833.140	75.111.740	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	PAM Desa	15,00	7,25		125.704.300	45.679.080	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
<b>INDIKATOR TPB :1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</b>												
<b>INDIKATOR TPB 1 : 1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.</b>												
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana												
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	orang	300	210		182.151.074	76.523.788	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,5	0	207.000.000	19.091.400	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	orang	60	40		29.910.500	10.760.383	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,5		221.999.600	97.881.190	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	unit	10	2		71.782.000	12.187.800	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,5		130.000.000	53.359.219	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	350	305		68.930.850	25.211.650	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0		12.461.750	2.559.950	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	25	19		755.381.666	280.514.275	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	200	109		254.382.000	105.684.190	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan	12	6		27.595.250	10.192.150	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	5	1		12.272.356	1.631.950	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>INDIKATOR TPB 1.5.1. (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.</b>												
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana												
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0		12.461.750	2.559.950	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	25	19		755.381.666	280.514.275	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	200	109		254.382.000	105.684.190	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan	12	6		27.595.250	10.192.150	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>												
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	orang	400	217		230.164.253	57.635.712	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
<b>INDIKATOR TPB 1.5.1. (c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.</b>												
<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>												
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	orang	400	217		230.164.253	57.635.712	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
<b>INDIKATOR TPB 1 : 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.</b>												
<b>1.05.03 Program Penanggulangan Bencana</b>												
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	orang	300	210		182.151.074	76.523.788	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,5	0	207.000.000	19.091.400	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	orang	60	40		29.910.500	10.760.383	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,5		221.999.600	97.881.190	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	unit	10	2		71.782.000	12.187.800	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,5		130.000.000	53.359.219	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	350	305		68.930.850	25.211.650	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0		12.461.750	2.559.950	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	25	19		755.381.666	280.514.275	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	200	109		254.382.000	105.684.190	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan	12	6		27.595.250	10.192.150	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	5	1		12.272.356	1.631.950	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>INDIKATOR TPB 1 : 1.5.3 (b) Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.</b>												
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana												
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 05 03 2.01 01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	orang	300	210		182.151.074	76.523.788	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	5	1		12.272.356	1.631.950	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Indikator TPB 1: 2.1.1.* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)</b>												
2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan												
2.09.04.2.01	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kabupaten/Kota	2.09.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	laporan	12	6		67.246.060	27.217.680	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
<b>INDIKATOR TPB: 2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun</b>												
<b>1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang	10.008	3266		6.800.000	1.950.000	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	831	12791		6.800.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	19.342	7127		634.490.000,00	16.360.000,00	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	12	6		99.590.000	16.485.000	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
				dokumen	238	64		859.265.000	66.969.000	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	6	2		6.800.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
				Dokumen	216	52		166.835.000,00	-	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	20	3		6.800.000,00	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	0,5		444.951.000,00	47.533.000,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	133	34		164.342.104	-	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SPAM	3,00	1,44		211.833.140	75.111.740	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	PAM Desa	15,00	7,25		125.704.300	45.679.080	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah												
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	01.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	unit	200	110		227.667.350	89.585.053	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase												
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Meter	51,33	20,96		2.586.380.233,00	757.066.552,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	4000	2000		242.521.393	98.118.475	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	500	250		440.090.345	82.090.476	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1	0,5		92.142.649,00	40.780.270,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2	1,33		130.128.315,00	24.129.180,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	2	1		29.339.270,00	12.936.540,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	0,6		82.312.129,00	35.387.320,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan
		2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Unit	10	9		27.980.470,00	12.329.840,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Unit	8	7		32.028.470,00	13.351.540,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan												
2.09.04.2.01	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kabupaten/Kota	2.09.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	laporan	12		6	67.246.060	27.217.680	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan												
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,5		79.860.733	35.954.030	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
<b>INDIKATOR 2.5.1.* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.</b>												
2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat												
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1	0,5		92.142.649,00	40.780.270,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2	1,33		130.128.315,00	24.129.180,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	2	1		29.339.270,00	12.936.540,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	0,6		82.312.129,00	35.387.320,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan
		2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Unit	10	9		27.980.470,00	12.329.840,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Unit	8	7		32.028.470,00	13.351.540,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan												
2.09.04.2.01	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kabupaten/Kota	2.09.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	laporan	12	6		67.246.060	27.217.680	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan												
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,5		79.860.733	35.954.030	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian												
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	laporan	27	15		1.349.530.514,00	202.484.015,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pertanian
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	6	4		420.198.848,00	100.396.696,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pertanian
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.27.02.2.02.02	Peningkatan kualitas SDG hewan/ tanaman	dokumen	89	51		420.525.467,00	179.053.804,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pertanian

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG hewan/ tanaman	dokumen	33	17		479.992.452,00	83.416.919,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pertanian
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	68	33		933.466.627,00	117.010.576,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pertanian
3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian												
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	dokumen	1	0,5		131.686.960	17.805.600	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pertanian
		3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	laporan	40	20		195.130.110	63.757.369	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pertanian
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	unit	1	0,33		8.099.000.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pertanian

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	unit	3	0,5		1.051.330.000	0	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pertanian

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
<b>INDIKATOR TPB : 3.1.1* Angka Kematian Ibu</b>												
<b>1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	11.009	3.500		54.260.000	16.700.000	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	10.630	5.776		978.440.000	133.659.000	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	10.508	3.311		6.800.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	orang	424.726	87.926		650.185.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	orang	389.915	71.169		164.645.000	12.376.000	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	12	6		99.590.000	16.485.000	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
				dokumen	238	64		859.265.000	66.969.000	APBD	Kab. Buleleng	UPTD
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	6	2		6.800.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
				Dokumen	216	52		166.835.000,00	-	APBD	Kab. Buleleng	UPTD
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	20	3		6.800.000,00	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	0,5		444.951.000,00	47.533.000,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	133	34		164.342.104	-	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
<b>INDIKATOR TPB : 3.1.2 * Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya terakhir ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih</b> <b>INDIKATOR TPB : 3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</b> <b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	11.009	3.500		54.260.000	16.700.000	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	10.630	5.776		978.440.000	133.659.000	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	10.508	3.311		6.800.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	orang	424.726	87.926		650.185.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	orang	389.915	71.169		164.645.000	12.376.000	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	20	3		6.800.000,00	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	0,5		444.951.000,00	47.533.000,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	133	34		164.342.104	-	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
<b>INDIKATOR TPB: 3.2.2 (b) Persentase kab/kota yg mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi</b>												
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang	10.008	3266		6.800.000	1.950.000	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	831	12791		6.800.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	19.342	7127		634.490.000,00	16.360.000,00	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	12	6		99.590.000	16.485.000	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
				dokumen	238	64		859.265.000	66.969.000	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	20	3		6.800.000,00	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	0,5		444.951.000,00	47.533.000,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	133	34		164.342.104	-	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa</b>												
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02..02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	orang	12.012	6.311		196.000.000		APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
				orang	11.015	2.728		86.440.000	760.000	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.2.(a) Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk</b>												
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang	8.940	2.969		1.483.200.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
				orang	8.967	1.452		119.180.000	3.610.000	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.3(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5(a) Jumlah Kabupaten dengan eliminasi Kusta</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)</b>												
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	831	12791		6.800.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	19.342	7127		634.490.000	16.360.000	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	12	6		99.590.000	16.485.000	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
				dokumen	238	64		859.265.000	66.969.000	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	6	2		6.800.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
				Dokumen	216	52		166.835.000,00	-	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	20	3		6.800.000,00	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	0,5		444.951.000,00	47.533.000,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
				dokumen	133	34		164.342.104	-	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1(a) Persentase merokok pada penduduk umur &gt;=18 tahun</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.</b>												
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	orang	44.448	11.393		6.800.000		APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur &gt;=18 tahun</b>												
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	20	3		6.800.000,00	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	0,5		444.951.000,00	47.533.000,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
				dokumen	133	34		164.342.104	-	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
<b>INDIKATOR TPB: 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan</b>												
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	12	6		6.800.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	12	6		174.740.000	18.090.000	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	50	-		857.122.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
<b>INDIKATOR TPB: 4.1.2.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
<b>INDIKATOR TPB: 4.1.2. (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan</b>												
2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,5		30.546.339	11.602.640	APBD	Kab. Buleleng	Dinas PPKBPPPA
		2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perangkat Daerah	40	40		22.156.562	10.423.944	APBD	Kab. Buleleng	Dinas PPKBPPPA
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	dokumen	2	1		236.920.510	24.482.228	APBD	Kab. Buleleng	Dinas PPKBPPPA
2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak												
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	12	6		91.947.548	20.189.080	APBD	Kab. Buleleng	Dinas PPKBPPPA
<b>INDIKATOR TPB : 5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 5.2.2 (a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif</b>												
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	12	5		132.846.339	51.602.640	APBD	Kab. Buleleng	Dinas PPKBPPPA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
			2023						
			I	II					
<b>INDIKATOR TPB : 5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah</b>									
<b>INDIKATOR TPB 5.5.2 : Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.</b>									
2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,5		30.546.339	11.602.640	APBD	Kab. Buleleng	Dinas PPKBPPPA
		2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perangkat Daerah	40	40		22.156.562	10.423.944	APBD	Kab. Buleleng	Dinas PPKBPPPA
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	dokumen	2	1		236.920.510	24.482.228	APBD	Kab. Buleleng	Dinas PPKBPPPA

## PILAR 2: PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2023 (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR TPB 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita atas dasar harga konstan (%)</b>												
<b>INDIKATOR TPB 8.1.1 (a.1) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ribu rupiah)</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.</b>												
2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja												
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perusahaan	24	12		7.600.000	1.725.880	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	orang	15	0		13.641.000	435.200	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	dokumen	1	-		2.000.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
		2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	orang	1000	1000		42.403.967	16.157.222	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
		2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	orang	600	600		71.838.720	40.613.840	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri												
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	1	0,5		281.500.002	46.840.838	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	1	0,5		87.196.183	50.054.950	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
<b>INDIKATOR TPB : 8.3.1* Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian, Berdasarkan Jenis Kelamin</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.3.1(b) Presentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian</b>												
2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja												
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1	1		32.209.305	10.794.500	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
<b>INDIKATOR TPB : 8.3.1(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.</b>												
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan, dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	unit usaha	25	12		95.999.828	37.920.220	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	unit usaha	50	25		111.741.690	39.723.750	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
		2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	unit usaha	50	24		29.375.552	13.394.540	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
		2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	orang	50	24		54.000.000	20.786.380	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
		2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	orang	60	25		136.000.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
<b>INDIKATOR TPB : 8.5.1* Upah rata-rata per jam kerja</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.5.2(a) Persentase Setengah Pengangguran</b>												
2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja												
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perusahaan	24	12		7.600.000	1.725.880	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja												
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	orang	15	0		13.641.000	435.200	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	dokumen	1	-		2.000.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
		2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	orang	1000	1000		42.403.967	16.157.222	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
		2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	orang	600	600		71.838.720	40.613.840	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1(a) Jumlah wisatawan mancanegara.</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1(b) Jumlah perjalanan yang dilakukan penduduk Indonesia menurut provinsi asal</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.</b>												
3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata												
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.01	Penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik dalam maupun luar negeri	dokumen	12	6		844.882.988	258.614.040	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pariwisata
		3.26.03.2.01.02	Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten kota	laporan	12	6		171.130.107	65.124.140	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pariwisata
		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	13	6		60.266.140	24.251.180	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pariwisata
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.</b>												
3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif												
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.01	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	orang	190	130		126.852.100	50.654.360	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pariwisata
		3.26.05.2.01.02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	orang	200	140		1.054.482.293	447.870.780	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pariwisata

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	orang	30	1		31.705.920	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pariwisata
		3.26.05.2.01.06	Fasilitas Pengembangan Kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	orang	40	1		78.904.558	27.979.320	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pariwisata
<b>INDIKATOR TPB : 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 9.2.1(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.</b>												
3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri												
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	1	0,5		281.500.002	46.840.838	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	1	0,5		87.196.183	50.054.950	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
<b>INDIKATOR TPB : 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.</b>												
2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja												
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1	1		32.209.305	10.794.500	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja												
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	orang	15	0		13.641.000	435.200	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	dokumen	1	-		2.000.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
		2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	orang	1000	1000		42.403.967	16.157.222	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
		2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	orang	600	600		71.838.720	40.613.840	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
<b>INDIKATOR TPB : 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.</b>												
3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri												
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	1	0,5		281.500.002	46.840.838	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	1	0,5		87.196.183	50.054.950	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
<b>INDIKATOR TPB : 9.4.1* Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 9.4.1(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca.</b>												
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.01	Koordinasi,Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaraan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,Air,Udara,dan Laut	dokumen	2	1		85.955.514	39.543.434	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	dokumen	1	0,5		6.122.800	2.466.100	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	dokumen	2	1		229.940.420	112.719.908	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	laporan	6	3		76.790.859	25.597.706	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	dokumen	1	0,5		5.197.750	3.259.870	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.03.03	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanan Remediasi	dokumen	1	0,5		64.723.608	24.541.084	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		2.11.03.2.03.04	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	dokumen	20	10		6.427.750	4.433.520	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
<b>INDIKATOR10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</b>												
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	4000	2000		242.521.393,00	98.118.475,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	500	250		440.090.345,00	82.090.476,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
<b>INDIKATOR 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri</b>												
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA												
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten / Kota	Dokumen	1	0		64.436.578	27.696.616	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	Dokumen	1	1		60.700.408	27.163.376	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	0		66.963.588	27.833.136	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	4	2		63.739.860	26.393.376	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	dokumen	1	1		6.959.975	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	dokumen	129	50		37.783.045	15.063.168	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	129	40		49.106.940	18.948.382	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Orang	55	25		2.065.764.565	1.068.618.472	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	dokumen	2	1		30.534.000	11.063.728	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	dokumen	129	18		40.000.000	18.188.382	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	dokumen	129	15		44.106.970	19.328.382	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	orang	55	25		39.144.820	12.873.448	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen	2	2		87.878.032	23.020.416	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi penataan , pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	dokumen	18	0		4.259.600	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyaraktan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	18	10		135.637.245	97.978.199	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	unit	12	7		742.111.135	279.457.748	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dokumen	2	0		68.786.045	79.970.037	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	12	5		55.243.545	33.438.618	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	dokumen	1	0		30.528.620	10.403.728	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	2	0		1.220.000.000	562.715.238	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.</b>												
2.07.05 Program Hubungan Industrial												
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Laporan	30	20		39.873.680,00	11.832.617,00	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Tenaga Kerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	50	0		1.000.000,00	-	APBD	Kabupaten Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
<b>INDIKATOR 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.</b> <b>INDIKATOR 17.1.1(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.</b> <b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>												
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen	4	1		309.668.171	78.514.600	APBD	Kab. Buleleng	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	2	1		11.629.250	995.000	APBD	Kab. Buleleng	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	0,5		72.771.500	26.300.000	APBD	Kab. Buleleng	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	39	39		1.198.823.712	439.288.588	APBD	Kab. Buleleng	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	laporan	10	6		93.380.000	26.434.656	APBD	Kab. Buleleng	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				laporan	36	6		261.150.481	100.062.999	APBD	Kab. Buleleng	UPTD PAD Buleleng I
				laporan	36	6		476.115.820	182.623.200	APBD	Kab. Buleleng	UPTD PAD Buleleng II
				laporan	36	18		182.327.687	69.422.900	APBD	Kab. Buleleng	UPTD PAD Buleleng III
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	10	6		311.194.823	127.878.280	APBD	Kab. Buleleng	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Obyek Pajak	14.500	4.331		185.406.560	58.501.900	APBD	Kab. Buleleng	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	dokumen	1	0,9		64.780.635	5.948.250	APBD	Kab. Buleleng	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	dokumen	400	400	2.000	143.502.403	47.869.380	APBD	Kab. Buleleng	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	dokumen	12	6		281.558.006	65.309.787	APBD	Kab. Buleleng	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				dokumen	12	6		522.892.846	165.186.345	APBD	Kab. Buleleng	UPTD PAD Buleleng I
				dokumen	12	6		498.879.012	195.595.527	APBD	Kab. Buleleng	UPTD PAD Buleleng II
				dokumen	12	6		567.679.272	197.984.600	APBD	Kab. Buleleng	UPTD PAD Buleleng III
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	100	100		121.469.660	44.677.400	APBD	Kab. Buleleng	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	30	11		102.402.220	33.452.800	APBD	Kab. Buleleng	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	6		359.832.248	101.021.460	APBD	Kab. Buleleng	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1	0		97.602.500	12.395.200	APBD	Kab. Buleleng	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
<b>INDIKATOR 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)</b> 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	dokumen	31.610	23951		351.147.191	142.556.375	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan	3	2		3.129.554	1.365.000	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

### PILAR 3: PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2023 (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</b>												
<b>1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	20	3		6.800.000,00	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	0,5		444.951.000,00	47.533.000,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	133	34		164.342.104	-	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SPAM	3,00	1,44		211.833.140	75.111.740	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	PAM Desa	15,00	7,25		125.704.300	45.679.080	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
<b>INDIKATOR 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i>/ <i>Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)</i>.</b>												
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	20	3		6.800.000,00	-	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	0,5		444.951.000,00	47.533.000,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	133	34		164.342.104	-	APBD	Kab. Buleleng	UPTD Puskesmas
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	01.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	unit	200	110		227.667.350	89.585.053	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
<b>INDIKATOR 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.</b>												
<b>INDIKATOR 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.</b>												
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah												
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	01.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	unit	200	110		227.667.350	89.585.053	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
<b>INDIKATOR 6.3.2.(a) Kualitas air danau.</b>												
<b>INDIKATOR 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.</b>												
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RRPLH) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RRPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0,85		152.143.884	90.182.346	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	dokumen	1	0,3		202.274.668	1.885.380	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	2	1		85.955.514	39.543.434	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	dokumen	2	1		229.940.420	112.719.908	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	laporan	6	3		76.790.859	25.597.706	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	dokumen	1	0,5		5.197.750	3.259.870	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanan Remediasi	dokumen	1	0,5		64.723.608	24.541.084	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	dokumen	20	10		6.427.750	4.433.520	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
<b>INDIKATOR 6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.</b>												
<b>INDIKATOR 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.</b>												
<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>												





Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	laporan	6	3		76.790.859	25.597.706	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
<b>INDIKATOR 6.5.1.(d) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.</b>												
<b>INDIKATOR 6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.</b>												
<b>INDIKATOR 6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.</b>												
<b>INDIKATOR 6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.</b>												
<b>INDIKATOR 6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.</b>												
<b>INDIKATOR 6.5.1.(i) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.</b>												
<b>INDIKATOR 6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.</b>												
<b>INDIKATOR 6.6.1.(b) Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.</b>												
<b>INDIKATOR 6.6.1.(c) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.</b>												
<b>2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>												
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RRPLH) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RRPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0,85		152.143.884	90.182.346	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	dokumen	1	0,3		202.274.668	1.885.380	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.01	Koordinasi,Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaraan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,Air,Udara,dan Laut	dokumen	2	1		85.955.514	39.543.434	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	dokumen	2	1		229.940.420	112.719.908	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	laporan	6	3		76.790.859	25.597.706	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	dokumen	1	0,5		5.197.750	3.259.870	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.03.03	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanan Remediasi	dokumen	1	0,5		64.723.608	24.541.084	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.03.04	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	dokumen	20	10		6.427.750	4.433.520	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup

**INDIKATOR 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.**

**INDIKATOR 6.6.1.(e) Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.**

**INDIKATOR11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
<b>INDIKATOR11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).</b>												
<b>INDIKATOR11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP</b>												
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SPAM	3,00	1,44		211.833.140	75.111.740	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	PAM Desa	15,00	7,25		125.704.300	45.679.080	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah												
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	01.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	unit	200	110		227.667.350	89.585.053	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase												
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Meter	51,33	20,96		2.586.380.233,00	757.066.552,00	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
01.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	01.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan	%	72	0,16		251.400.000	57.975.130	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		01.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	%	72	0,02		2.213.325.000	70.918.860	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan
		01.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	%	72	0,13		19.746.300.000	3.052.247.412	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan
		01.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	%	72	0,34		3.212.071.904	2.982.690.406	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		01.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	%	72	0		3.322.950.000	4.755.200	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang												
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0,51		124.091.448	52.558.600	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0,71		789.832.970	20.690.515	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0,55		257.345.739	32.546.930	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0,51		102.110.849	45.223.900	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kecamatan	1	0,45		243.841.870	101.649.905	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04.02 Program Pengembangan Perumahan												
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	9	4,27		103.361.000	40.924.220	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit	36	19,59		431.529.001	228.600.113	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	laporan	2	1,04		39.474.000	18.405.600	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03 Program Kawasan Permukiman												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	laporan	2	0,81		179.168.000	62.310.887	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)												
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	2	1,41		189.824.000	112.620.140	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
<b>INDIKATOR 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan</b>												
<b>2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>												
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit	2	2		133.630.372	57.577.371	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kab/Kota	Posko	1	1		10.907.414	10.062.565	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Perhubungan
<b>INDIKATOR 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per100.000 orang</b>												
<b>INDIKATOR 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.</b>												
<b>INDIKATOR 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
<b>INDIKATOR 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana</b>												
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana												
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	orang	300	210		182.151.074	76.523.788	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,25		207.000.000	19.091.400	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,5		221.999.600	97.881.190	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	unit	10	2		71.782.000	12.187.800	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.05	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,5		130.000.000	53.359.219	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	350	305		68.930.850	25.211.650	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0		12.461.750	2.559.950	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	25	19		755.381.666	280.514.275	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	200	109		254.382.000	105.684.190	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan	12	6		27.595.250	10.192.150	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	5	1		12.272.356	1.631.950	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>INDIKATOR 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani</b>												
<b>2.11.1 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>												
2.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	laporan	2	1		55.315.394	23.656.116	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pembilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	ton	118.477,07	59.238,54		15.463.689.967	6.685.149.401	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok	35	17		306.016.298	123.049.778	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	dokumen	2	1		2.148.800	1.485.300	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Dokumen	58	30		4.428.215	2.338.400	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	unit	6	3		66.050.539	36.860.226	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
<b>01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>												
01.03.04.2.01	Pengembangan	01.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana,	Dokumen	1		1	17.435.000	17.310.550	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan
		01.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Desa	5		5	2.576.693.005	2.573.924.400	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		01.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Desa	5		5	11.499.775	11.493.680	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
<b>INDIKATOR 11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.</b>												
<b>INDIKATOR 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah</b>												
<b>1.05.03 Program Penanggulangan Bencana</b>												
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	orang	300	210		182.151.074	76.523.788	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,25		207.000.000	19.091.400	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan	12	6		27.595.250	10.192.150	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	5	1		12.272.356	1.631.950	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>INDIKATOR 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU</b>												
<b>INDIKATOR 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)</b>												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)												
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	dokumen	30	15		5.619.480	5.197.700	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	laporan	12	7		56.678.964	24.817.506	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	dokumen	12	6		4.466.500	3.126.800	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
<b>INDIKATOR 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang</b>												
2.11.1 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
2.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	laporan	2	1		55.315.394	23.656.116	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pembilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah	ton	118.477,07	59.238,54		15.463.689.967	6.685.149.401	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok	35	17		306.016.298	123.049.778	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	dokumen	2	1		2.148.800	1.485.300	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Dokumen	58	30		4.428.215	2.338.400	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	unit	6	3		66.050.539	36.860.226	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL												
01.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	01.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	%	41,86	18,99		174.792.877	18.496.600	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
<b>INDIKATOR 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah</b>												
<b>INDIKATOR 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang</b>												
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	orang	300	210		182.151.074	76.523.788	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,25		207.000.000	19.091.400	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,5		221.999.600	97.881.190	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	unit	10	2		71.782.000	12.187.800	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.05	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0,5		130.000.000	53.359.219	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	350	305		68.930.850	25.211.650	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	0		12.461.750	2.559.950	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	25	19		755.381.666	280.514.275	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	200	109		254.382.000	105.684.190	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan	12	6		27.595.250	10.192.150	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	5	1		12.272.356	1.631.950	APBD	Kab. Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>INDIKATOR 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)</b>												
<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>												
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.01	Koordinasi,Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaraan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,Air,Udara,dan Laut	dokumen	2	1		85.955.514	39.543.434	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	dokumen	1	0,5		6.122.800	2.466.100	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	dokumen	2	1		229.940.420	112.719.908	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	laporan	6	3		76.790.859	25.597.706	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	dokumen	1	0,5		5.197.750	3.259.870	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanan Remediasi	dokumen	1	0,5		64.723.608	24.541.084	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	dokumen	20	10		6.427.750	4.433.520	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
<b>INDIKATOR 14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional</b>												
<b>INDIKATOR 14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan</b>												
3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap												
3.25.02.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.02.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	orang	180	288		839475916	11709540	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.25.02.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan	Kelompok	25	14		20.934.450	8.535.600	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		3.25.02.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	unit usaha	2	0,6		260.995.914	53.033.495	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.02.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.02.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Laporan	12	6		24.053.720	10.265.240	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Laut Dan Perikanan												
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pelaku usaha	50	26		61.688.370	25.800.980	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
<b>INDIKATOR 14.4.1.* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman</b>												
3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap												
3.25.02.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.02.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	orang	180	288		839475916	11709540	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.25.02.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok	25	14		20.934.450	8.535.600	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.25.02.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	unit usaha	2	0,6		260.995.914	53.033.495	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan





Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
<b>INDIKATOR 14.5.1.* Jumlah luas kawasan konservasi perairan</b>												
<b>INDIKATOR 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha</b>												
3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Laut Dan Perikanan												
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pelaku usaha	50	26		61.688.370	25.800.980	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
<b>INDIKATOR 14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil</b>												
<b>INDIKATOR 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindung</b>												
3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap												
3.25.02.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.02.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	orang	180	288		839475916	11709540	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.25.02.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok	25	14		20.934.450	8.535.600	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.25.02.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	unit usaha	2	0,6		260.995.914	53.033.495	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.02.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.02.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Laporan	12	6		24.053.720	10.265.240	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Laut Dan Perikanan												
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pelaku usaha	50	26		61.688.370	25.800.980	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
INDIKATOR 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan												
INDIKATOR 15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
			2023						
			I	II					
INDIKATOR 15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.									
INDIKATOR 15.2.1.(c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.									
INDIKATOR 15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
INDIKATOR 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan									

#### PILAR 4: PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (7)		
			2023								
			I	II							
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
INDIKATOR 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.											
INDIKATOR 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan											
INDIKATOR 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun											
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	12	5	132.846.339	51.602.640	APBD	Kab. Buleleng	Dinas PPKBPPPA
INDIKATOR 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)											
6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	4	0		1.110.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Inspektorat
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD	8	0		1.110.000	-	APBD	Kab. Buleleng	Inspektorat
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	laporan	1	1		5.900.000	5.787.500	APBD	Kab. Buleleng	Inspektorat
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	laporan	1	1		5.900.000	5.787.500	APBD	Kab. Buleleng	Inspektorat
		6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	laporan	4	1		158.810.000	6.460.000	APBD	Kab. Buleleng	Inspektorat
		6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokumen	16	10		37.020.000	9.860.000	APBD	Kab. Buleleng	Inspektorat
<b>INDIKATOR 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)</b>												
4.01.01. Program Administrasi Umum												
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.03.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	20	18		377.713.752	130.462.800	APBD	Kab. Buleleng	Bagian Organisasi Setda
<b>INDIKATOR 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan</b>												
4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan												
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	5	2,5		466.500.000	164.485.802	APBD	Kab. Buleleng	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	dokumen	3	1,5		307.900.000	105.157.802	APBD	Kab. Buleleng	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
<b>INDIKATOR 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)</b>												
<b>INDIKATOR 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)</b>												
4.01.01. Program Administrasi Umum												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)		
			2023								
			I	II							
<b>INDIKATOR 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi</b>											
<b>INDIKATOR 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil</b>											
<b>INDIKATOR 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik</b>											
8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik											
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Parpol	8	8	22.362.554.513	57.391.638	APBD	Kab. Buleleng	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	orang	100	100	52.449.260	9.387.500	APBD	Kab. Buleleng	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Semester I (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
						2023						
						I	II					
		8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan	4	2		117.102.735	32.382.158	APBD	Kab. Buleleng	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>INDIKATOR 16.9.1*Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur</b>												
<b>INDIKATOR 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah</b>												
<b>INDIKATOR 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran</b>												
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa		31.610	23951		351.147.191	142.556.375	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan	3	2		3.129.554	1.365.000	APBD	Kab. Buleleng	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
<b>INDIKATOR 16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan</b>												
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	12	5		132.846.339,00	51.602.640	APBD	Kab. Buleleng	Dinas PPKBPPPA

























































---







































































































































**FORMULIR REALISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PILAR 1: PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahun 2023(3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2023 (4)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
						2023						
						I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</b>												
<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>												
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	orang	40	0	40	130.384.900,00	7.326.800,00	APBD	Kabupaten Klun	Dinas Sosial P3A
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	keluarga	30	0	30	182.790.624,00	50.787.008,00	APBD	Kabupaten Klun	Dinas Sosial P3A
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.</b>												
<b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>												
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	orang	130	0	130	333.655.800,00	154.649.200,00	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas Sosial P3A
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	orang	40	0	13	27.708.700,00	25.281.150,00	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas Sosial P3A
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	orang	25	0	10	139.191.774,00	20.381.260,00	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas Sosial P3A
		1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	57	0	8	178.739.186,00	47.649.104,00	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas Sosial P3A
<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>												
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	orang	40	0	40	130.384.900,00	7.326.800,00	APBD	Kabupaten Klun	Dinas Sosial P3A
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	keluarga	30	0	30	182.790.624,00	50.787.008,00	APBD	Kabupaten Klun	Dinas Sosial P3A
<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>												

1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	KK	40	0	0	473.809.700,00	54.126.800,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Sosial P3A
--------------	--	-----------------	--------------------	----	----	---	---	----------------	---------------	------	---------------	------------------

**INDIKATOR TPB 1.3.1. (b) Proposi peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan**

**2.07.05 Program Hubungan Industrial**

2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu)	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	laporan	12	0	6	213.022.000,00	7.671.200,00	APBD	Kab. Klungkung	Dinas KetenagaKerjaan
2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	perkara	2	0	1	14.369.150,00	2.578.700,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas KetenagaKerjaan
		2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi	serikat pekerja	2	0	1	16.177.700,00	8.670.000,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas KetenagaKerjaan

**INDIKATOR TPB 1.3.1. (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.**

**1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	orang	300	0	300	333.689.500,00	288.301.900,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Sosial P3A
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	orang	123	0	123	26.008.800,00	25.578.910,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Sosial P3A
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	orang	130	0		158.372.984,00	89.170.762,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Sosial P3A

		1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	300	0		112.037.242,00	58.727.242,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Sosial P3A
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial	1.06.06.2.01.01	Penyediaan	KK	40	0	0	443.397.600,00	194.837.050,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Sosial P3A
<b>INDIKATOR TPB 1.3.1. (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.</b>												
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	orang	40	0	40	130.384.900,00	7.326.800,00	APBD	Kabupaten Klun	Dinas Sosial P3A
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	keluarga	30	0	30	182.790.624,00	50.787.008,00	APBD	Kabupaten Klun	Dinas Sosial P3A
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</b>												
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	orang	110.593,00	0	55.072,00	377.798.100,00	19.237.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap</b>												
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	9.441,00	0	5.683,00	10.531.750,00	200.000,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan</b>												
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1200%	0	500%	6.124.000,00	-	APBD	Kab. Klungkung	Dinas Kesehatan
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen	4,00	0	2	60.801.500	1.750.000	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SPAM	300,00	0	0	115.995.786	30216890	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



		1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa	20,00	0	0	101.311.400	0	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
<b>INDIKATOR TPB: 1.4.1 (e) Persentase RT yg memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</b>												
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1200%	0	500%	6.124.000,00	-	APBD	Kab. Klungkung	Dinas Kesehatan
<b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>												
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen	4,00	0	2	60.801.500	1.750.000	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SPAM	300,00	0	0	115.995.786	30216890	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa	20,00	0	0	101.311.400	0	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
<b>1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>												
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	01.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	1	45.685.850	2.412.650	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		01.03.05.2.01.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	rumah tangga	150	-	50	2.741.590.056	2.532.031.924	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
<b>INDIKATOR TPB 1 :1.4.1 (j) Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran</b>												
<b>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>												

2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	dokumen	2.400		1.245	2.098.000	1.123.700	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	layanan	1.200		650	2.409.900	1.597.900	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**INDIKATOR TPB : 1.5.1\* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.**

**INDIKATOR TPB 1 : 1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.**

1.05.03 Program Penanggulangan Bencana

1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	persen	200		70	32.677.000	6.334.400	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 05 03 2.02 02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten /Kota	orang	200		1	78.671.250	14.150.500	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 05 03 2.02 09	Penyusunan rencana Kontijensi	dokumen	1		200	58.088.100	6.788.080	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04	Penataan sistem dasar penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02.04	Penanganan pascabencana Kabupaten /Kota	dokumen	1		1	13.659.700	9.183.005	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	%	1		1	16.453.750	8.393.185	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	1		300	759.770.680	268.610.200	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	15		13	19.070.000	1.920.500	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**INDIKATOR TPB 1.5.1. (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.**

1.05.03 Program Penanggulangan Bencana

1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	%	1		1	16.453.750	8.393.185	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
--------------	--	-----------------	---	---	---	--	---	------------	-----------	------	---------------	-------------------------------------

		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	1		300	759.770.680	268.610.200	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	15		13	19.070.000	1.920.500	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>												
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	KK	40	0	0	473.809.700,00	54.126.800,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Sosial P3A
<b>INDIKATOR TPB 1.5.1. (c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.</b>												
<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>												
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Orang	40	0	0	443.397.600	194.837.050	APBD	Kab.Klungkung	Dinas SosialP3A
<b>INDIKATOR TPB 1 : 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.</b>												
<b>1.05.03 Program Penanggulangan Bencana</b>												
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	persen	200		70	32.677.000	6.334.400	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.05.03.2.02.02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten /Kota	orang	200		1	78.671.250	14.150.500	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.09	Penyusunan rencana Kontijensi	dokumen	1		200	58.088.100	6.788.080	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04	Penataan sistem dasar penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02.04	Penanganan pascabencana Kabupaten /Kota	dokumen	1		1	13.659.700	9.183.005	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	%	1		1	16.453.750	8.393.185	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	1		300	759.770.680	268.610.200	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

		1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	15		13	19.070.000	1.920.500	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>INDIKATOR TPB 1 : 1.5.3 (b) Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.</b>												
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana												
1.05.03.2.01	pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/kota	1.05.03.2.01.2	Sosialisasi Komunikasi informasi dan edukasi(KIE)Rawan Bencana ka/Kota(Per jenis Bencana)	orang	200		70	32.677.000	6.334.000	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Indikator TPB 1: 2.1.1.* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)</b>												
2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan												
2.09.04.2.01	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.01	Penyusunan,pemut ahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dokumen	1	0	0	127.981.450	1.844.900	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan												
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	4		0	13.090.350	12.946.800	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
<b>INDIKATOR TPB: 2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun</b>												
1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	orang	2697	0	979	70.622.000,00	59.000.000,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	orang	110593	0	45782	377.798.100,00	19.237.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan

		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	0	12	72.427.100,00	2.368.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12	0	5	360.220.900,00	11.960.400,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12		5	46.289.267.462,00	14.403.484.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	6	0	2	137.152.000,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	0	5	6.124.000,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat kabupaten/ Kota	1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12	0	5	29.623.200,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen	4,00	0	2	60.801.500	1.750.000	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SPAM	300,00	0	666	115.995.786	30.216.890	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		1.03.03.201.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SPAM	20,00	0	0	101.311.400	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah												

1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	01.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah	Dokumen	1	-	0	45.685.850	2.412.650	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		01.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	KK	150	-	0	2.741.590.056	2.532.031.924	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

#### 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	orang	40	0	40	130.384.900,00	7.326.800,00	APBD	Kabupaten Klun	Dinas Sosial P3A
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	keluarga	30	0	30	182.790.624,00	50.787.008,00	APBD	Kabupaten Klun	Dinas Sosial P3A

#### 2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	12		6	41.329.300,00	18.808.700,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	12		6	3.730.350,00	1.255.000,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

#### 2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan

2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	dokumen	1	0	0	127.981.450	1.844.900	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
--------------	---	-----------------	--	---------	---	---	---	-------------	-----------	------	---------------	--------------------------------------

#### 2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan

2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	4		0	13.090.350	12.946.800	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
<b>INDIKATOR 2.5.1.* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.</b>												

2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	12		6	41.329.300,00	18.808.700,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	12		6	3.730.350,00	1.255.000,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan

2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	dokumen	1	0	0	127.981.450	1.844.900	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
--------------	---	-----------------	--	---------	---	---	---	-------------	-----------	------	---------------	--------------------------------------

2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan

2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	4		0	13.090.350	12.946.800	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
--------------	--	-----------------	--	---------	---	--	---	------------	------------	------	---------------	--------------------------------------

3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	laporan	12			72.359.100,00	3.214.100,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pertanian
							6					
		3.27.02.2.02.01	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	laporan	12			42.439.050,00	19.259.050,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pertanian
							6					

**3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.01	pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2 B	paket	2	0	0	130.000.000	66.824.400	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pertanian
		3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	laporan	12	0	6	11.540.700	4.930.700	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pertanian

**INDIKATOR TPB : 3.1.1\* Angka Kematian Ibu**

**1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	orang	2697	0	979	70.622.000,00	59.000.000,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	orang	110593	0	45782	377.798.100,00	19.237.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	0	12	72.427.100,00	2.368.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12	0	5	360.220.900,00	11.960.400,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan



		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12		5	46.289.267.462,00	14.403.484.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	6	0	2	137.152.000,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	0	5	6.124.000,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat kabupaten/ Kota	1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12	0	5	29.623.200,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan

**INDIKATOR TPB : 3.1.2 \* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirannya terakhir ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih**

**INDIKATOR TPB : 3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan**

**1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	orang	2697	0	979	70.622.000,00	59.000.000,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	orang	110593	0	45782	377.798.100,00	19.237.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	0	12	72.427.100,00	2.368.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12	0	5	360.220.900,00	11.960.400,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12		5	46.289.267.462,00	14.403.484.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan

**INDIKATOR TPB : 3.2.1\* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup**

**INDIKATOR TPB : 3.2.2\* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup**

**INDIKATOR TPB : 3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup****1.02.02 PPROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	orang	2697	0	979	70.622.000,00	59.000.000,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	orang	110593	0	45782	377.798.100,00	19.237.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	0	12	72.427.100,00	2.368.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12	0	5	360.220.900,00	11.960.400,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12		5	46.289.267.462,00	14.403.484.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												

1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	6	0	2	137.152.000,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	0	5	6.124.000,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat kabupaten/ Kota	1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12	0	5	29.623.200,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan

**INDIKATOR TPB: 3.2.2 (b) Persentase kab/kota yg mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi****1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	orang	2697	0	979	70.622.000,00	59.000.000,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	orang	110593	0	45782	377.798.100,00	19.237.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	0	12	72.427.100,00	2.368.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12	0	5	360.220.900,00	11.960.400,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12		5	46.289.267.462,00	14.403.484.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	6	0	2	137.152.000,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	0	5	6.124.000,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat kabupaten/ Kota	1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12	0	5	29.623.200,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.2.(a) Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.3(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5(a) Jumlah Kabupaten dengan eliminasi Kusta</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.3.5(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)</b>												
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												

1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	orang	2697	0	979	70.622.000,00	59.000.000,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	orang	110593	0	45782	377.798.100,00	19.237.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	0	12	72.427.100,00	2.368.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12	0	5	360.220.900,00	11.960.400,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12		5	46.289.267.462,00	14.403.484.300,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	2	0	2	9.946.750,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	6	0	2	137.152.000,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	0	5	6.124.000,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat kabupaten/ Kota	1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12	0	5	29.623.200,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur &gt;=18 tahun</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.</b>												
<b>INDIKATOR TPB: 3.4.1(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur &gt;=18 tahun</b>												
<b>1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												

1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	6	0	2	137.152.000,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	0	5	6.124.000,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat kabupaten/ Kota	1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12	0	5	29.623.200,00	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan

**INDIKATOR TPB: 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan**

**1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan standar	orang	65	0	65	7.203.986.124,00	2.319.889.790,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	40,00	-	40,00	27.238.500,00	11.938.012,00	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan

**INDIKATOR TPB: 4.1.2.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.**

**INDIKATOR TPB: 4.1.2. (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.**

**INDIKATOR TPB : 5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan**

**2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	perangkat daerah	39		0	16.838.700	2.969.600	APBD	Kab.Klungkung	DinsosP3A
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dokumen	5		4	66.938.650	17.527.150	APBD	Kab.Klungkung	DinsosP3A

**INDIKATOR TPB : 5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan**

INDIKATOR TPB : 5.2.2 (a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif														
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap	Dokumen	5		3	25.220.100	6.868.000	APBD	Kab.Klungkung	DinsosP3A		
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.02	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	orang	5		2	161.092.048	15.097.600	APBD	Kab.Klungkung	DinsosP3A		

**INDIKATOR TPB : 5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah**

**INDIKATOR TPB 5.5.2 : Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.**

2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	perangkat daerah	39		0	16.838.700	2.969.600	APBD	Kab.Klungkung	DinsosP3A		
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dokumen	5		4	66.839.650	17.527.150	APBD	Kab.Klungkung	DinsosP3A		

**PILAR 2: PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2021 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)
			I	II					
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>									
<b>INDIKATOR TPB : 7.2.1* Bauran energi terbarukan</b>									
<b>INDIKATOR TPB 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita atas dasar harga konstan (%)</b>									
<b>INDIKATOR TPB 8.1.1 (a.1) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ribu rupiah)</b>									
<b>INDIKATOR TPB : 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.</b>									
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja									

2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar kerja	orang	44		44	886.107.059	53.390.500	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	orang	200	-	150	30.411.250	12.387.500	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Tenaga Kerja

**3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**

3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	6		3	46.078.000	26.065.100	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	dokumen	2		0	79.542.350	39.196.600	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	3		1	363.513.162	60.510.480	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM

**INDIKATOR TPB : 8.3.1\* Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian, Berdasarkan Jenis Kelamin**

**INDIKATOR TPB : 8.3.1(b) Presentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian**

**2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja**

2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar kerja	orang	44		44	886.107.059	53.390.500	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	orang	200	-	150	30.411.250	12.387.500	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Tenaga Kerja

**INDIKATOR TPB : 8.3.1(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.**

**2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan, dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan potensidan pengembangan Usaha Mikro	UMKM	25		8	45.438.050	8.039.500	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
		2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	orang	8		8	27.056.500	12.502.200	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
<b>INDIKATOR TPB : 8.5.1* Upah rata-rata per jam kerja</b>												
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN												
<b>INDIKATOR TPB : 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.5.2(a) Persentase Setengah Pengangguran</b>												
2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja												
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	dokumen	35		16	581.113.750	62.358.500	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja												
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar kerja	orang	44		44	886.107.059	53.390.500	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	orang	200	-	150	30.411.250	12.387.500	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Tenaga Kerja
<b>INDIKATOR TPB : 8.8.1(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.</b>												
2.07.06 Program Pengawasan Ketenagakerjaan												
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1(a) Jumlah wisatawan mancanegara.</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1(b) Jumlah perjalanan yang dilakukan penduduk Indonesia menurut provinsi asal</b>												
<b>INDIKATOR TPB : 8.9.1(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.</b>												
3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata												
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	3.26.03.2.01.01	Penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik dalam maupun luar negeri	dokumen	5	0	5	366.109.350	290.933.200	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pariwisata



		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	0	2	1.012.400	933.150	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pariwisata
		3.26.03.2.01.04	Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Dokumen	2	0	2	407.432.050	358.125.800	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pariwisata

**INDIKATOR TPB : 8.9.1\* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.**

**3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**

3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.01.01	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	orang	40		40	1.019.200	946.000	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pariwisata
		3.26.05.2.01.02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan	orang	175		175	778.992.858	546.050.000	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pariwisata
		3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	laporan	3		3	144.736.750	143.658.900	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pariwisata
		3.26.05.2.01.06	Fasilitas Pengembangan Kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	orang	2		2	137.366.150	135.872.500	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Pariwisata

**INDIKATOR TPB : 9.2.1\* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.**

**INDIKATOR TPB : 9.2.1(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.**

**3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**

3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	6		3	46.078.000	26.065.100	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	dokumen	2		0	79.542.350	39.196.600	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM

		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	3		1	363.513.162	60.510.480	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
--	--	-----------------	--	---------	---	--	---	-------------	------------	------	---------------	---

**INDIKATOR TPB : 9.2.2\* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.**

**2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja**

2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar kerja	orang	44		44	886.107.059	53.390.500	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	orang	200	-	150	30.411.250	12.387.500	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Tenaga Kerja

**INDIKATOR TPB : 9.3.1\* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.**

**3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**

3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	6		3	46.078.000	26.065.100	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	dokumen	2		0	79.542.350	39.196.600	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	3		1	363.513.162	60.510.480	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM

**INDIKATOR TPB : 9.4.1\* Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.**

**INDIKATOR TPB : 9.4.1(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca.**

**2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	usaha	95	0	100	1.540.868.824	21.343.060	APBD	Kab.Klungkung	DLHP
<b>INDIKATOR10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</b>												
<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>												
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	orang	40	0	40	130.384.900,00	7.326.800,00	APBD	Kabupaten Klun	Dinas Sosial P3A
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	keluarga	30	0	30	182.790.624,00	50.787.008,00	APBD	Kabupaten Klun	Dinas Sosial P3A
<b>INDIKATOR 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri</b>												
<b>2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>												
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalamn Kabupaten / Kota	Dokumen	1		0	10.481.750,00	2.929.750	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PMDPPKB
<b>2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>												
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	4		0	12.745.650	360.000	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PMDPPKB
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1		0	890.347.532	426.439.876	DAK	Kab.Klungkung	Dinas PMDPPKB
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen	1		0	231.206.936	141.079.290	DAK	Kab.Klungkung	Dinas PMDPPKB
<b>2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>												

2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	2		0	1.992.813.126	640.729.763	DAK	Kab.Klungkung	Dinas PMDPPKB
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1		0	54.893.750	16.649.750	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PMDPPKB
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1		0	862.751.760	352.410.950	DAK	Kab.Klungkung	Dinas PMDPPKB

**INDIKATOR 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.**

2.07.05 Program Hubungan Industrial

2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Laporan	12	0	7	213.022.000	205.350.800	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Ketenagakerjaan
--------------	--	-----------------	---	---------	----	---	---	-------------	-------------	------	---------------	-----------------------

2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	perkara	2	0	1	14.369.150	11.790.450	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Ketenagakerjaan
		2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi	serikat pekerja	2	0	1	16.177.700	7.507.700	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Ketenagakerjaan

**INDIKATOR 17.1.1\* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.**

**INDIKATOR 17.1.1(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.**

**5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	laporan	12	0	6	310.363.900	45.104.000	APBD	Kab.Klungkung	BPKPD
		5.02.04.1.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	objek pajak	1800	0	688	315.556.378	82.576.595	APBD	Kab.Klungkung	BPKPD
		5.02.04.1.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	dokumen	2700	0	1550	375.229.092	70.718.755	APBD	Kab.Klungkung	BPKPD
		5.02.04.1.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	layanan	400	0	2636	10.719.000	-	APBD	Kab.Klungkung	BPKPD
		5.02.04.1.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	dokumen	1300	0	590	448.074.150	41.326.115	APBD	Kab.Klungkung	BPKPD
		5.02.04.1.01.11	Penagihan Pajak Daerah	dokumen	12	0	6	246.734.800	1.160.000	APBD	Kab.Klungkung	BPKPD
		5.02.04.1.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	12	0	6	455.930.453	38.093.068	APBD	Kab.Klungkung	BPKPD

**INDIKATOR 17.11.1(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas**

**3.30.05 Program Pengembangan Ekspor**

3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	pelaku usaha	12	0	7	370.152.000	10.454.250	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
--------------	---	-----------------	--	--------------	----	---	---	-------------	------------	------	---------------	---

**INDIKATOR 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)**

**2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL**

2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persen	0	0	0	11.759.020	1.136.950	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.03.1.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	100	0	0	1.702.300	1.631.800	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Persen	100	0	0	801.683.850	1.100.812.500	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**PILAR 3: PEMBANGUNAN LINGKUNGAN**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2021 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)			
			2021									
			I	II								
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.</b>												
<b>INDIKATOR 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</b>												
<b>1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	0	12	1.897.950	1552200	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan
<b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>												

1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen	4	0	8	60.801.500	1.750.000	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
		1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR	300	0	6	115.995.786	35.332.268	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
		1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR	20	0	451	101.311.400	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR

300

1.02.05 PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1.02.05.1.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	0	12	1.897.950	1552200	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
--------------	---	-----------------	---	---------	----	---	----	-----------	---------	------	---------------	-------------------------------

1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen	4	0	8	60.801.500	1.750.000	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
		1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR	300	0	6	115.995.786	35.332.268	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
		1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR	20	0	451	101.311.400	-	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR

1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	45.685.850	2.412.650	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas PUPR
--------------	---	-----------------	---	---------	---	---	---	------------	-----------	------	---------------------	------------

		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	RT	150	0	0	2.741.590.056	2.532.031.924	APBD	Kabupaten Klungkung	
--	--	-----------------	--	----	-----	---	---	---------------	---------------	------	---------------------	--

**INDIKATOR 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.**

**INDIKATOR 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.**

**1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	45.685.850	2.412.650	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas PUPR
--------------	---	-----------------	---	---------	---	---	---	------------	-----------	------	---------------------	------------

		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	RT	150	0	0	2.741.590.056	2.532.031.924	APBD	Kabupaten Klungkung	
--	--	-----------------	--	----	-----	---	---	---------------	---------------	------	---------------------	--

**INDIKATOR 6.3.2.(a) Kualitas air danau.**

**INDIKATOR 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.**

**2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	usaha	95	0	97	50.764.184	44.128.184	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
--------------	--	-----------------	---	-------	----	---	----	------------	------------	------	---------------------	------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**INDIKATOR 6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.**

**INDIKATOR 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.**

**2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	usaha	95	0	97	50.764.184	44.128.184	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
--------------	--	-----------------	---	-------	----	---	----	------------	------------	------	---------------------	------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**INDIKATOR 6.5.1.(d) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) lintas Negara.**

**1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**





**INDIKATOR 6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.**

**INDIKATOR 6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.**

**INDIKATOR 6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.**

**INDIKATOR 6.5.1.(i) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.**

**1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**

1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Dokumen	9	0	3	43.113.500	12.396.444	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas PUPR
		1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	KM	1	0	0	218.352.500	6.703.869	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas PUPR
		1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	KM	1	0	0	204.818.500	4.696.528	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas PUPR
												Dinas PUPR

**INDIKATOR 6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.**

**INDIKATOR 6.6.1.(b) Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.**

**INDIKATOR 6.6.1.(c) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.**

**2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

2.11.03.1.01	Kegiatan	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, usaha		95	0	97	50.764.184	44.128.184	APBD	Kabupaten	DLHP
--------------	----------	-----------------	-------------------	--	----	---	----	------------	------------	------	-----------	------

**INDIKATOR 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.**

**3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman	3.28.04.2.01.09	Pengelolaan Daerah Ha		1	0	1	11.441.250	941.250	APBD	Kabupaten	DLHP
--------------	-------------------	-----------------	-----------------------	--	---	---	---	------------	---------	------	-----------	------

**INDIKATOR 6.6.1.(e) Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.**

**1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**

1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Dokumen	9	0	3	43.113.500	12.396.444	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas PUPR
		1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	KM	1	0	0	218.352.500	6.703.869	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas PUPR

		1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	KM		1	0	0	204.818.500	4.696.528	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas PUPR
													Dinas PUPR
<b>INDIKATOR11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.</b>													
<b>INDIKATOR11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).</b>													
<b>INDIKATOR11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP</b>													
<b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>													
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen		4	0	2	60.801.500	1.750.000	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
		1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR		300	0	0	115.995.786	35.332.268	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
		1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR		20	0	0	101.311.400	0	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
<b>1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan</b>													
1.03.10.2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen		12		8	3.756.526.000	731.950.684	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
		1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	km		8		0	37.674.212.760	1.799.508.277	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	km		10		0	15.210.000.000	720.272.004	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
		1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	km		12		0	19.426.205.310	5.601.554.716	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
		1.03.10.2.01.10	Pembangunan Jembatan	M		100		0	1.515.000.000	0	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR

		1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	unit	35	0	0	388.000.000	0	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
<b>1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>												
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	3	0	0	176.120.700	16.023.620	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	dokumen	1	0	0	498.372.700	96.495.868	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dokumen	6	0	0	38.144.500	8.497.190	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
<b>1.04.02 Program Pengembangan Perumahan</b>												
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	unit rumah	2	0	0	101.498.100	1.475.200	APBD	Kab.Klungkung	Dinas PUPR
<b>INDIKATOR 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan</b>												
<b>2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>												
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen	1	0	0	22.944.460	5.340.300	APBD	Kab.Klungkung	Dinas Perhubungan
<b>INDIKATOR 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per100.000 orang</b>												
<b>INDIKATOR 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.</b>												
<b>INDIKATOR 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan</b>												
<b>INDIKATOR 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana</b>												
<b>1.05.03 Program Penanggulangan Bencana</b>												
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	persen	200		200	30.896.050	25.928.900	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	%	1	1	2.127.050	2.118.200	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 05 03 2.02 03	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten /Kota	%	200	200	51.858.350	45.295.850	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.04	Penanganan pascabencana Kabupaten /Kota	%	1	1	14.106.300	13.651.400	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	%	1	1	16.740.800	14.973.900	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	1	1	763.478.530	715.465.880	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	12	13	5.307.200	2.950.000	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**INDIKATOR 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani**

**2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,	Persen	50	0	50	1.510.875.352	753.101.091	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,	Persen	90	0	90	3.940.299.128	2.119.082.207	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persen	90	0	90	1.551.280.472	774.483.176	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persen	75	0	75	7.735.111.350	1.735.351.149	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
		2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Persen	75	0	73	57.067.774	22.049.262	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP

**INDIKATOR 11.b.1\* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.**

**INDIKATOR 11.b.2\* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah**

1.05.03 Program Penanggulangan Bencana												
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	persen	200		200	30.896.050	25.928.900	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	%	1		1	2.127.050	2.118.200	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 05 03 2.02 03	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten /Kota	%	200		200	51.858.350	45.295.850	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.04	Penanganan pascabencana Kabupaten /Kota	%	1		1	14.106.300	13.651.400	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	%	1		1	16.740.800	14.973.900	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	1		1	763.478.530	715.465.880	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	12		13	5.307.200	2.950.000	APBD	Kab.Klungkung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**INDIKATOR 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU**

**INDIKATOR 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)**

**2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	usaha	95	0	94	1.540.868.824	24.753.312	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
--------------	--	-----------------	---	-------	----	---	----	---------------	------------	------	---------------------	------

**INDIKATOR 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang**

**2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,	Persen	50	0	50	1.510.875.352	753.101.091	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,	Persen	90	0	90	3.940.299.128	2.119.082.207	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persen	90	0	90	1.551.280.472	774.483.176	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persen	75	0	75	7.735.111.350	1.735.351.149	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
		2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Persen	75	0	73	57.067.774	22.049.262	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP

**INDIKATOR 13.1.1\* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah**

**INDIKATOR 13.1.2\* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang**

**2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,	Persen	50	0	50	1.510.875.352	753.101.091	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,	Persen	90	0	90	3.940.299.128	2.119.082.207	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persen	90	0	90	1.551.280.472	774.483.176	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persen	75	0	75	7.735.111.350	1.735.351.149	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
		2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Persen	75	0	73	57.067.774	22.049.262	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP

<b>INDIKATOR 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)</b>												
<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>												
2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	usaha	95	0	94	1.540.868.824	24.753.312	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
<b>INDIKATOR 14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional</b>												
<b>INDIKATOR 14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan</b>												
<b>3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>												
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	orang	75	0	20	90.771.904	6.230.476	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas Ketapang dan perikanan
<b>INDIKATOR 14.4.1.* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman</b>												
<b>3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>												
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	orang	75	0	20	90.771.904	6.230.476	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas Ketapang dan perikanan
<b>INDIKATOR 14.5.1.* Jumlah luas kawasan konservasi perairan</b>												
<b>INDIKATOR 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha</b>												
<b>INDIKATOR 14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil</b>												
<b>INDIKATOR 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindung</b>												
<b>3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>												
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	orang	75	0	20	90.771.904	6.230.476	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas Ketapang dan perikanan
<b>INDIKATOR 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan</b>												
<b>INDIKATOR 15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.</b>												
<b>INDIKATOR 15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.</b>												
<b>INDIKATOR 15.2.1.(c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.</b>												
<b>3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>												
3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	3.28.04.2.01.09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota	Ha	1	0	1	11.441.250	941.250	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
<b>INDIKATOR 15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan</b>												
<b>3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>												



3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	3.28.04.2.01.09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota	Ha	1	0	1	11.441.250	941.250	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP
<b>INDIKATOR 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan</b>												
<b>3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>												
3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	3.28.04.2.01.09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota	Ha	1	0	1	11.441.250	941.250	APBD	Kabupaten Klungkung	DLHP

#### PILAR 4: PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2021 (3)	Realisasi Semester (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana (7)			
			2021									
			I	II								
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAERAH</b>												
<b>INDIKATOR 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.</b>												
<b>INDIKATOR 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan</b>												
<b>INDIKATOR 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun</b>												
<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>												
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Dokumen	5	0	2	25.220.100,00	6.868.000,00	APBD	Kabupaten Klungkung	DinsosP3A
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	0	2	161.092.048,00	15.097.600,00	APBD	Kabupaten Klungkung	
<b>INDIKATOR 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)</b>												
<b>6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>												
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	40		0	4.119.250	0	APBD	Kabupaten Klungkung	Inspektorat
		6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	43		4	132.190.250	20.415.000	APBD	Kabupaten Klungkung	Inspektorat
		6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	laporan	1		1	2.693.500	1.050.000	APBD	Kabupaten Klungkung	Inspektorat
		6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	laporan	1		1	7.920.800	7.306.000	APBD	Kabupaten Klungkung	Inspektorat

		6.01.02.1.01.05	Pengawasan Desa	Laporan		12		11	577.826.412	113.112.656	APBD	Kabupaten Klungkung	Inspektorat	
		6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan		13		7	332.994.700	49.991.300	APBD	Kabupaten Klungkung	Inspektorat	
<b>INDIKATOR 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)</b>														
<b>4.01.02 Program Penataan Organisasi</b>														
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	persen		70%		0	29%	16.804.000	5.400.000	APBD	Kabupaten Klungkung	Bagian Organisasi
		4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	persen		70%		0	87,50%	47.140.600	7.285.000	APBD	Kabupaten Klungkung	Bagian Organisasi
		4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	opd		31%		0	0	311.671.600	14.135.159	APBD	Kabupaten Klungkung	Bagian Organisasi
<b>INDIKATOR 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan</b>														
<b>4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan</b>														
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen		12		0	7	267.268.212	114.537.221	APBD	Kabupaten Klungkung	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen		12		0	7	58.774.562	17.664.506	APBD	Kabupaten Klungkung	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang		100		0	134	153.226.362	99.261.706	APBD	Kabupaten Klungkung	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
<b>INDIKATOR 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)</b>														
<b>INDIKATOR 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)</b>														
<b>4.01.02 Program Penataan Organisasi</b>														
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	persen		70%		0	29%	16.804.000	5.400.000	APBD	Kabupaten Klungkung	Bagian Organisasi

		4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	persen	70%	0	87,50%	47.140.600	7.285.000	APBD	Kabupaten Klungkung	Bagian Organisasi
		4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	opd	31%	0	0	311.671.600	14.135.159	APBD	Kabupaten Klungkung	Bagian Organisasi
<b>INDIKATOR 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)</b>												
<b>INDIKATOR 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)</b>												
<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>												
2.08.02.1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.1.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	peserta	27	0	27	280.562.400	314.125.000	APBD	Kabupaten Klungkung	DinsosP3A
<b>INDIKATOR 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi</b>												
<b>INDIKATOR 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil</b>												
<b>INDIKATOR 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik</b>												
<b>8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>												
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	100	0	85	727.784.385	629.826.665	APBD	Kabupaten Klungkung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

		8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan	4	0	2	21.203.450	800.000	APBD	Kabupaten Klungkung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
<b>INDIKATOR 16.9.1*Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur</b>												
<b>INDIKATOR 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah</b>												
<b>INDIKATOR 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran</b>												
<b>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>												
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	dokumen	2400	0	1245	2.098.000	1.123.700	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	layanan	1200	0	496	2.409.900	1.597.900	APBD	Kabupaten Klungkung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>INDIKATOR 16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan</b>												
<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>												
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Dokumen	5	0	2	25.220.100,00	6.868.000,00	APBD	Kabupaten Klungkung	DinsosP3A
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	0	2	161.092.048,00	15.097.600,00	APBD	Kabupaten Klungkung	DinsosP3A